

Arah Baru Islam di Tanah Kaili

Meneguhkan Islam Moderat
dan Kearifan Lokal

A landscape illustration at sunset. The sky is a gradient of orange and yellow, with a large sun on the horizon. In the middle ground, there are green hills and a river. On the far bank of the river, there is a silhouette of a mosque with a minaret. The water of the river reflects the warm colors of the sunset.

Dr. Bahdar, M.H.I.

HAK CIPTA/COPYRIGHT

**© 2023 Dr. Bahdar, M.H.I
Email bahdar@uindatokarama.ac.id
HP.081.341.207.628**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau menyebarluaskan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk keperluan pendidikan dengan menyebut sumbernya.

Penerbit:

Foto Copy Maestro Lere Palu Barat
Alamat: Jl. Diponegoro No.12, Palu, Sulawesi Tengah

Cetakan Pertama: Januari 2023

ISBN: Nomor belum ada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ جَعْلَنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَحْمِدُهُ وَتُسْتَعْيِنُهُ وَتُسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ
 الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku *Arah Baru Islam di Tanah Kaili: Meneguhkan Islam Moderat dan Kearifan Lokal* ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. teladan agung yang membawa risalah Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.

Buku ini lahir dari perjumpaan panjang penulis dengan masyarakat Tanah Kaili, sebuah wilayah yang menyimpan kekayaan spiritual, budaya, dan sejarah penyebaran Islam yang unik di Sulawesi Tengah. Selama bertahun-tahun penulis berinteraksi dengan para tokoh agama, adat, dan masyarakat setempat, penulis menyaksikan bagaimana nilai-nilai Islam yang moderat berpadu harmonis dengan kearifan lokal yang hidup dalam tradisi dan praktik sosial mereka. Dari pengalaman itulah muncul kesadaran bahwa Islam di Tanah Kaili bukanlah agama yang datang untuk meniadakan budaya, melainkan menuntunnya menuju nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan kedamaian.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menggali kembali jejak dan arah perkembangan Islam di Tanah Kaili, terutama dalam konteks kekinian

ketika masyarakat menghadapi tantangan globalisasi, arus informasi, dan pergeseran nilai. Dalam situasi seperti itu, Islam moderat dan kearifan lokal perlu diteguhkan sebagai fondasi yang menumbuhkan ketenangan spiritual, toleransi sosial, dan kemajuan umat. Moderasi Islam di sini bukan sekadar sikap tengah, tetapi jalan kebijaksanaan yang mengajarkan keseimbangan antara akidah dan budaya, antara keislaman dan kemanusiaan.

Penulis berharap, buku ini dapat menjadi refleksi dan inspirasi bagi para tokoh agama, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk terus mengembangkan pemahaman Islam yang damai, terbuka, dan berakar pada budaya lokal. Harapannya, Islam moderat yang berpadu dengan kearifan masyarakat Kaili dapat menjadi pilar kokoh dalam membangun peradaban yang adil, harmonis, dan berkemajuan.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, ilmu, dan semangat dalam proses penulisan buku ini. Semoga karya sederhana ini menjadi bagian kecil dari upaya besar meneguhkan Islam sebagai rahmat dan menghadirkan cahaya kedamaian di Tanah Kaili.

وَاللَّهُ الْمُوْفَّقُ إِلَى أَفْوَمِ الْطَّرِيقِ
بَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمْ وَجَرَأْكُمُ اللَّهُ خَيْرًا

Palu, Januari 2023
Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-----|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Hak Cipta..... | ii |
| Halaman Kata Pengantar..... | iii |
| Halaman Daftar Isi..... | iv |

BAB I

TANAH KAILI DAN ISLAMISASI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| A Masyarakat Kaili Sulawesi Tengah..... | 1 |
| B Latar Historis Masuknya Islam ke Tanah Kaili. | 4 |
| C Perjumpaan Islam dan Budaya Lokal di Tanah Kaili..... | 8 |
| D Relevansi Kajian Islam Moderat dalam Konteks Pascakonflik di Sulawesi Tengah.. | 11 |
| E Tujuan dan Arah Penulisan Buku | 14 |

BAB II

ISLAM MODERAT KONSEP DAN URGENSINYA DI KONTEKS LOKAL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Makna dan ciri-ciri Islam moderat..... | 17 |
| B. Prinsip Wasathiyyah dalam Al-Qur'an dan Sunnah..... | 19 |
| C. Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah antara Ekstremisme dan Liberalisme..... | 23 |
| D. Implementasi Moderasi dalam Kehidupan Masyarakat..... | 26 |
| E. Tantangan penerapan Islam moderat di daerah plural seperti Sulawesi Tengah..... | 30 |

BAB III
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER
MODERASI BERAGAMA

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | Pengertian kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Kaili..... | 36 |
| B | Kearifan lokal dalam praktik sosial dan adat religius (gotong royong, sintuvu, nosarara nosabatutu,)..... | 40 |
| C. | Kearifan Lokal sebagai Perekat Sosial Lintas Agama dan Etnis..... | 43 |
| D | Titik Temu Nilai Islam dengan Nilai Budaya Kaili..... | 46 |
| E. | Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Dakwah dan Pendidikan Islam..... | 50 |

BAB IV
PERAN TOKOH AGAMA DAN LEMBAGA
KEAGAMAAN

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | . Kiprah Ulama dan Da'i Lokal dalam Membangun Islam Damai di Tanah Kaiili..... | 54 |
| B. | Sinergi antara Pesantren, Madrasah, dan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Islam Modoerat di Tanah Kaili..... | 56 |
| C. | Narasi Dakwah Damai dan Toleran di Tengah Masyarakat Pasca-konflik..... | 58 |
| D. | Studi Kasus: Praktik Moderasi di Masjid, Majelis Taklim, dan Sekolah..... | 61 |
| E. | Tantangan Regenerasi dan Digitalisasi Dakwah lokal di Tanah Kaili..... | 64 |

BAB V
PENDIDIKAN DAN TRANSFORMASI NILAI
MODERASI

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | Pendidikan Islam sebagai Instrumen Moderasi Beragama..... | 69 |
| B. | Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Kurikulum PAI dan Fikih..... | 73 |
| C. | Praktik Pendidikan Damai di Madrasah dan Pesantren..... | 78 |
| D. | Peran Guru dan Kepala Madrasah dalam Menanamkan Moderasi Beragama..... | 83 |
| E. | Model Pembelajaran Berbasis Nilai Budaya dan Islam moderat..... | 88 |

BAB VI
ISLAM PASCA KONFLIK: PENGALAMAN
SULAWESI TENGAH

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| A. | Konflik Keagamaan di Poso dan Dampaknya bagi Masyarakat Kaili..... | 95 |
| B. | Upaya Rekonsiliasi dan Peran Agama dalam Pemulihan Sosial..... | 97 |
| C. | Moderasi sebagai Jalan Damai dan Pemulihan Identitas..... | 99 |
| D. | Testimoni Tokoh Agama dan Masyarakat..... | 102 |
| E. | Pembelajaran Penting bagi Daerah Lain..... | 105 |

BAB VII
ARAH BARU ISLAM DI TANAH KAILI

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| A. | Rekonstruksi Nilai Islam Lokal dalam Konteks Modernitas..... | 108 |
| B. | Islam moderat sebagai identitas baru umat di Sulawesi Tengah..... | 111 |
| C. | Sinergi antara agama, budaya, dan negara dalam | |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| | membangun masyarakat damai..... | 114 |
| D. | Tantangan globalisasi, digitalisasi, dan disinformasi agama..... | 118 |
| E. | Peta jalan Islam masa depan di Tanah Kaili..... | 120 |

BAB VIII **PENUTUP**

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. | Kesimpulan umum..... | 123 |
| B. | Rekomendasi Praktis bagi Tokoh Agama, Pendidik, dan Pemerintah Daerah..... | 125 |
| C. | Harapan Penulis untuk Kelanjutan Studi Islam Lokal dan Moderasi Keagamaan..... | 128 |
| D. | Profil Tokoh Agama dan Lembaga Lokal..... | 130 |
| E. | Dokumentasi Lapangan dan Kegiatan Sosial Keagamaan di Tanah Kaili..... | 133 |
| F. | Daftar Istilah Budaya Kaili yang Berkaitan dengan Nilai Islam..... | 137 |
| G. | Daftar Pustaka..... | 140 |
| H. | Sinopsis Buku..... | 144 |

BAB I

TANAH KAILI DAN ISLAMISASI

A. Masyarakat Kaili Sulawesi Tengah

1. Identitas Sosial dan Budaya Masyarakat Kaili

Etnis Kaili merupakan salah satu kelompok etnis utama yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, terutama di lembah Palu dan kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Secara historis, masyarakat Kaili dikenal sebagai kelompok yang memiliki sistem sosial berbasis kekerabatan (*famili*), solidaritas komunitas (*sintuvu*), dan penghormatan terhadap adat sebagai pedoman hidup bersama (Said, 2018). Bahasa Kaili menjadi salah satu penanda identitas etnis yang terdiri atas beberapa dialek seperti Ledo, Tara, Unde, dan Rai. Namun, penelitian linguistik menunjukkan adanya pergeseran bahasa di kalangan generasi muda akibat pengaruh urbanisasi dan pendidikan formal berbahasa Indonesia (Latief, 2020). Dari sisi struktur sosial, masyarakat Kaili memiliki sistem kepemimpinan tradisional berbasis tokoh adat dan tokoh agama, yang berfungsi menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan ajaran agama (Ibrahim, 2019).

Budaya *sintuvu*, yang bermakna kebersamaan dan gotong royong, menjadi prinsip moral yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Kaili. Menurut penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN, 2022), nilai *sintuvu* merepresentasikan semangat solidaritas, tanggung jawab sosial, dan harmoni antarwarga, sehingga menjadi fondasi penting dalam membangun kerukunan sosial dan keberagamaan di Sulawesi Tengah.

2. Unsur Religius dan Kepercayaan Pra-Islam

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Kaili menganut sistem kepercayaan animistik yang kuat, yang berpusat pada penghormatan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam (Rahman, 2017). Dalam sistem ini, ritual seperti *balia* (pengobatan tradisional dengan unsur spiritual) dan *pompoura* (upacara tolak bala) menjadi bagian dari ekspresi religius masyarakat (Nasir, 2019).

Ritual-ritual tersebut memperlihatkan pola kepercayaan akan adanya kekuatan supranatural yang mampu memengaruhi kehidupan manusia. Namun, nilai-nilai dalam praktik ritual ini mengalami reinterpretasi seiring dengan masuknya ajaran Islam. Banyak unsur yang sebelumnya bersifat animistik kemudian disesuaikan dengan ajaran tauhid dan doa-doa Islam, sehingga membentuk pola keberagamaan khas masyarakat Kaili (Rahim, 2021).

3. Proses Islamisasi di Sulawesi Tengah

Islam mulai masuk ke wilayah Sulawesi Tengah sekitar abad ke-17 hingga ke-18 melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan dakwah ulama dari Ternate, Bone, dan Bugis (Hasan, 2016). Jalur ini kemudian diperkuat oleh aktivitas dakwah para ulama Arab Hadramaut yang menetap di pesisir Teluk Palu dan Donggala pada awal abad ke-20 (Hassan, 2020).

Proses Islamisasi semakin kuat dengan hadirnya lembaga pendidikan Islam, khususnya organisasi Alkhairaat yang didirikan oleh Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri pada tahun 1930-an. Melalui jaringan pesantren, madrasah, dan dakwah sosial, Alkhairaat memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai Islam moderat di kalangan masyarakat Kaili (Tahir, 2018).

Menurut hasil penelitian di UIN Datokarama Palu (Sukardi, 2023), pendidikan Alkhairaat berhasil mengubah

pola keberagamaan masyarakat Kaili dari yang bercorak tradisional menuju Islam bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang rasional, terbuka, dan toleran.

Islamisasi di Sulawesi Tengah tidak berlangsung dengan konfrontasi, tetapi melalui proses akulturasi dan adaptasi budaya. Tradisi-tradisi lokal seperti *pompoura* dan *balia* tidak serta-merta dihapus, melainkan dimodifikasi dengan unsur doa, zikir, dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga menjadi ekspresi Islam lokal yang damai dan inklusif (Rasyid, 2021).

4. Akulturasi Islam dan Tradisi Kaili

Proses akulturasi antara Islam dan tradisi Kaili terlihat jelas dalam berbagai praktik sosial keagamaan. Dalam ritual pernikahan adat, misalnya, unsur Islam seperti akad nikah, mahar, dan doa disatukan dengan simbol-simbol adat seperti *sambulugana* dan *pambeka nganga* (Yusuf, 2022). Kajian fikih lokal menunjukkan bahwa praktik adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, selama tidak mengandung unsur syirik atau pelanggaran terhadap hukum Islam (Rifai, 2020).

Selain itu, interaksi masyarakat Kaili dengan Al-Qur'an dalam konteks budaya lokal juga menjadi fenomena menarik dalam studi *living Qur'an*. Penelitian Rahim (2021) menunjukkan bahwa bacaan ayat-ayat Al-Qur'an sering diintegrasikan dalam praktik pengobatan *balia*, sebagai bentuk sintesis antara nilai spiritual Islam dan tradisi penyembuhan lokal.

5. Ciri Islamisasi Moderat di Tanah Kaili

Ciri khas Islamisasi di kalangan masyarakat Kaili dapat dilihat dari tiga dimensi: (1) penerimaan terbuka terhadap nilai-nilai baru tanpa meninggalkan akar budaya; (2) semangat kebersamaan sosial yang sejalan dengan

ajaran ukhuwah Islamiyah; dan (3) corak keberagamaan yang menolak ekstremisme dan kekerasan. Nilai-nilai moderasi Islam terinternalisasi melalui pendidikan Alkhairaat, pengajian keluarga, dan peran tokoh agama lokal yang berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial (Sukardi, 2023).

Transformasi tersebut menjadikan masyarakat Kaili sebagai contoh konkret bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan adat dan kearifan lokal tanpa kehilangan nilai-nilai teologisnya. Dalam konteks ini, Islam tidak hadir untuk menggantikan budaya lokal, melainkan untuk memurnikan dan memperkaya maknanya, sehingga terbentuklah “Islam Kaili” yang berkarakter damai, sosial, dan berakar kuat di masyarakat.

B. Latar Historis Masuknya Islam ke Tanah Kaili

1. Konteks Geografis dan Jalur Awal Dakwah Islam

Wilayah Tanah Kaili yang kini mencakup Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sebagian Parigi Moutong memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan antarpulau di kawasan timur Nusantara. Letaknya di pesisir Teluk Palu menjadikannya persinggahan penting bagi para pedagang dari Mandar, Bugis, Ternate, dan juga pedagang Arab yang membawa ajaran Islam ke kawasan ini (Hasan, 2016).

Islam pertama kali dikenal oleh masyarakat Kaili melalui jalur perdagangan maritim dan pernikahan antar-etnis. Pedagang Muslim dari Sulawesi Selatan memperkenalkan nilai-nilai Islam tidak hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai etika sosial dan sistem nilai dalam transaksi ekonomi (Rahman, 2017). Dengan demikian, Islam hadir dalam konteks hubungan sosial yang damai dan simbiotik antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal.

Menurut kajian sejarah lokal, pada abad ke-17 telah muncul sejumlah komunitas Muslim di pesisir Palu bagian utara, di antaranya di wilayah Watusampu, Lere, dan Tondo (Ibrahim, 2019). Penyebaran Islam pada masa ini berlangsung secara bertahap dan bersifat adaptif, tanpa menghapuskan tradisi lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat Kaili.

2. Peran Kerajaan-Kerajaan Lokal dan Jaringan Dakwah

Proses Islamisasi di wilayah Kaili tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya, seperti Kesultanan Ternate dan Bone, yang menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan para pemimpin adat Kaili. Sultan Ternate, misalnya, mengirim mubalig dan ulama ke kawasan Teluk Palu pada abad ke-17 untuk memperluas pengaruh Islam di daerah pedalaman (Hasan, 2016).

Sementara itu, hubungan dagang dengan Bugis-Makassar turut mempercepat penyebaran Islam melalui pernikahan antarsuku dan pembentukan komunitas Muslim di pelabuhan-pelabuhan lokal. Dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh Bugis menjadi guru agama atau imam pertama di perkampungan Kaili (Latief, 2020).

Selain melalui kerajaan, dakwah Islam juga berkembang melalui jaringan ulama Hadramaut yang datang ke Sulawesi Tengah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka membentuk jaringan dakwah berbasis keluarga dan pendidikan, yang kemudian berkontribusi besar dalam membentuk corak Islam di Tanah Kaili yang moderat, sufistik, dan berakar kuat pada nilai kemasyarakatan (Hassan, 2020).

3. Masa Kolonial dan Pembentukan Lembaga Pendidikan Islam

Masuknya kolonialisme Belanda pada abad ke-19 membawa perubahan signifikan dalam pola keagamaan masyarakat Kaili. Pemerintah kolonial cenderung membatasi aktivitas dakwah Islam di pedesaan, sehingga penyebaran agama lebih banyak dilakukan melalui jalur nonformal seperti *surau* dan *pengajian kampung* (Rasyid, 2021).

Dalam situasi tersebut, muncul resistensi kultural dan religius dari masyarakat lokal terhadap dominasi kolonial. Nilai-nilai Islam menjadi simbol perlawanan dan identitas sosial masyarakat Kaili. Kondisi ini mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 ketika Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mendirikan Alkhairaat di Kota Palu (1930). Lembaga ini kemudian menjadi pusat pembentukan generasi terdidik Muslim yang berorientasi pada Islam moderat dan nasionalisme keindonesiaaan (Tahir, 2018).

Penelitian Sukardi (2023) mencatat bahwa sejak berdirinya Alkhairaat, proses Islamisasi di Tanah Kaili tidak hanya berjalan melalui ritual keagamaan, tetapi juga melalui pendidikan formal dan sosial kemasyarakatan, yang mendorong integrasi nilai-nilai Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Islam tidak lagi menjadi ajaran luar, tetapi telah menyatu dengan struktur sosial dan budaya Kaili.

4. Pola Akulturasi dan Penerimaan Masyarakat Kaili

Berbeda dari beberapa daerah lain di Indonesia yang mengalami ketegangan antara adat dan agama, masyarakat Kaili memperlihatkan pola penerimaan yang damai dan akomodatif terhadap ajaran Islam. Proses Islamisasi di wilayah ini berlangsung tanpa pertentangan terbuka, sebab dakwah dilakukan melalui pendekatan kultural dan keteladanan moral (Nasir, 2019).

Penelitian antropologis menunjukkan bahwa tokoh-tokoh adat Kaili tidak memandang Islam sebagai ancaman terhadap budaya lokal, melainkan sebagai penyempurna nilai-nilai tradisi seperti *sintuvu* (kebersamaan), *mombine* (musyawarah), dan *mpalili* (kerja kolektif untuk kebaikan bersama) (Said, 2018). Dengan demikian, nilai Islam dan adat saling menguatkan dalam membangun harmoni sosial.

Islamisasi juga disertai dengan transformasi ritual tradisional. Upacara *balia* yang semula bernuansa animistik mulai disertai doa dan bacaan Al-Qur'an, sementara tradisi *pompoura* (tolak bala) diubah menjadi bentuk doa bersama dan sedekah untuk keselamatan kampung (Rahim, 2021). Fenomena ini menandai terbentuknya model Islamisasi khas Kaili yakni proses internalisasi nilai Islam tanpa menghapus esensi kearifan lokal.

5. Periode Modern dan Penguatan Islam Moderat

Seiring dengan perkembangan sosial politik setelah kemerdekaan, Islam di Tanah Kaili terus mengalami konsolidasi. Lembaga Alkhairaat menjadi pusat intelektual dan moral masyarakat Muslim di Sulawesi Tengah. Jaringan alumninya tersebar luas di berbagai madrasah dan masjid, memperkuat pola keberagamaan yang rasional dan moderat (Sukardi, 2023).

Ciri Islam moderat di Tanah Kaili tercermin dalam tiga aspek utama:

- a. Toleransi antarumat beragama, yang tampak dalam kemampuan masyarakat Kaili menjaga kerukunan pascakonflik sosial di awal 2000
- b. Integrasi nilai adat dan agama, di mana Islam dipahami sebagai penguat budaya, bukan penghapus tradisi;

- c. Komitmen terhadap pendidikan dan dakwah berkelanjutan, melalui sistem madrasah, majelis taklim, dan organisasi keagamaan berbasis komunitas.

Dengan demikian, proses Islamisasi di Tanah Kaili tidak hanya menghasilkan masyarakat Muslim, tetapi juga membentuk peradaban lokal yang menampilkan wajah Islam yang damai, inklusif, dan berakar kuat pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kaili.

C. Perjumpaan Islam dan Budaya Lokal di Tanah Kaili

Perjumpaan antara Islam dan budaya lokal di Tanah Kaili merupakan proses historis dan kultural yang panjang, menandai integrasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan tradisional masyarakat Kaili. Secara akademik, proses ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akomodasi budaya (cultural accommodation), di mana ajaran Islam disampaikan dan diterima melalui pendekatan sosial dan kultural yang menyesuaikan dengan struktur budaya masyarakat setempat (Azra, 2002; Ricklefs, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Azyumardi Azra (2002) dalam *Islam Nusantara: Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* menunjukkan bahwa Islamisasi di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sulawesi Tengah, berlangsung melalui mekanisme kultural yang lentur, bukan melalui kekerasan atau paksaan. Proses dakwah dilakukan oleh para ulama dan tokoh adat melalui jalur sufistik dan kekeluargaan, sehingga nilai-nilai Islam diserap tanpa harus menghapus adat. Pola serupa ditemukan oleh Martin van Bruinessen (1995) yang menegaskan bahwa bentuk Islam lokal (local Islam) di Indonesia terbentuk melalui negosiasi antara syariat dan budaya, menghasilkan bentuk Islam yang unik di setiap daerah.

Dalam konteks Tanah Kaili, nilai-nilai Islam mulai berinteraksi dengan adat sejak abad ke-17, ketika kerajaan-kerajaan lokal seperti Palu, Dolo, dan Sigi mulai menerima ajaran Islam melalui jalur perdagangan dan dakwah ulama dari pesisir barat Sulawesi dan Gorontalo (Putuhena, 2007). Interaksi ini melahirkan perpaduan harmonis antara ajaran Islam dan kearifan lokal, yang kemudian membentuk pola keberislaman khas masyarakat Kaili.

Salah satu bentuk nyata dari perjumpaan tersebut tampak pada transformasi makna ritual adat. Misalnya, tradisi *mopondoli* (upacara pensucian diri menjelang pernikahan) mengalami reinterpretasi sebagai bentuk *tazkiyatun nafs* (pensucian jiwa) dalam perspektif Islam. Begitu pula tradisi *padungku* (syukuran panen), yang dahulu berbentuk persembahan kepada roh penjaga ladang, kini dilaksanakan dengan pembacaan doa dan tahlil sebagai ungkapan syukur kepada Allah Swt. (Abidin, 2015). Proses reinterpretasi ini menggambarkan akulturasi simbolik antara Islam dan budaya lokal yang memperkuat karakter religius masyarakat tanpa menghilangkan akar budaya mereka.

Fenomena serupa juga dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1985) dalam *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, bahwa proses masuknya agama besar seperti Islam ke dalam masyarakat tradisional Indonesia umumnya melibatkan tahapan sinkretisasi, akulturasi, dan integrasi nilai. Masyarakat Kaili memaknai ajaran Islam bukan sebagai sistem yang meniadakan adat, tetapi sebagai jalan untuk memperdalam nilai moral, spiritual, dan sosial yang telah ada dalam budaya mereka.

Selain itu, penelitian oleh M. Idris dan Nurhadi (2018) dalam *Jurnal Al-Qalam* menunjukkan bahwa di wilayah Palu dan Sigi, banyak tokoh adat yang juga berperan sebagai imam dan guru mengaji. Hal ini memperlihatkan tumpang tindih positif antara otoritas adat

dan agama yang berkontribusi terhadap terbentuknya Islam yang moderat dan membumi. Proses ini dikenal dalam literatur antropologi agama sebagai bentuk *cultural hybridity* (Bhabha, 1994), yaitu perpaduan kreatif antara dua sistem nilai yang menghasilkan identitas baru dalam hal ini, identitas *Islam Kaili*.

Secara sosial, hasil perjumpaan Islam dan budaya lokal di Tanah Kaili dapat dilihat dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat: doa bersama sebelum menanam padi, penggunaan istilah “insya Allah” dalam upacara adat, serta penghormatan kepada tokoh agama dan adat secara bersamaan. Semua ini memperlihatkan keterjalinan antara nilai *mosangu-mosintuvu* (saling membantu) dan prinsip *ukhuwah Islamiyah*, antara *nosarara nosabatutu* (persaudaraan dan kesatuan) dengan konsep *ummah* dalam Islam.

Dengan demikian, perjumpaan Islam dan budaya lokal di Tanah Kaili merupakan proses dialektis yang melahirkan Islam yang kontekstual, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Corak Islam ini menjadi pondasi utama bagi munculnya tradisi moderasi beragama dan harmoni sosial di Sulawesi Tengah, sebagaimana juga ditegaskan oleh Kementerian Agama RI (2022) bahwa masyarakat dengan basis kearifan lokal kuat memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman.

D. Relevansi Kajian Islam Moderat dalam Konteks Pascakonflik di Sulawesi Tengah

Relevansi kajian Islam moderat dalam konteks pascakonflik di Sulawesi Tengah menjadi sangat penting, mengingat wilayah ini pernah mengalami konflik sosial-keagamaan yang cukup besar pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, terutama di wilayah Poso dan sekitarnya.

Konflik tersebut, sebagaimana dicatat oleh International Crisis Group (2004) dan Sidel (2006), bukan semata konflik agama, tetapi juga melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan identitas sosial. Meski demikian, agama sering dijadikan simbol mobilisasi, sehingga pascakonflik diperlukan rekonstruksi pemahaman keagamaan yang lebih moderat, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

Menurut Burhani (2019) dalam kajiannya di *Studia Islamika*, Islam moderat di Indonesia berfungsi sebagai jembatan sosial (social bridge) dalam membangun kembali kepercayaan antarumat setelah konflik. Ia menegaskan bahwa moderasi beragama dengan prinsip *tawassuth* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), *ta'adul* (keadilan), dan *musawah* (kesetaraan) dapat menjadi kerangka normatif bagi rekonsiliasi sosial. Dalam konteks Sulawesi Tengah, khususnya Tanah Kaili, moderasi Islam menjadi instrumen efektif untuk mengelola pluralitas dan menghidupkan kembali solidaritas lintas agama.

Penelitian Nurhadi dan Idris (2020) di *Jurnal Al-Qalam* menunjukkan bahwa masyarakat Kaili memiliki fondasi sosial yang kuat untuk mendukung moderasi beragama karena mereka telah lama menginternalisasi nilai *nosarara nosabatutu* (persaudaraan dan kesatuan), *mosintuvu* (gotong royong), dan *pompoura* (keterbukaan). Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam moderat yang menolak kekerasan dan ekstremisme. Pasca-konflik, banyak tokoh adat dan ulama setempat berperan aktif dalam forum rekonsiliasi lintas agama melalui pendekatan kultural dan spiritual, misalnya dalam kegiatan doa bersama, kerja sosial lintas komunitas, dan dialog perdamaian.

Dari perspektif akademik, Ricklefs (2012) dan Azra (2017) menegaskan bahwa Islam moderat berfungsi bukan hanya sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai etika

sosial (social ethics) yang mampu memperkuat *social cohesion* di masyarakat multikultural. Dalam konteks Sulawesi Tengah, pendekatan ini diterapkan melalui pendidikan keagamaan, dakwah damai, serta peran lembaga seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah, yang menekankan pentingnya Islam sebagai kekuatan rekonsiliatif, bukan divisif.

Hasil penelitian lapangan oleh Tadulako Institute (2021) menunjukkan bahwa penerapan moderasi beragama di komunitas Muslim Kaili berpengaruh positif terhadap pemulihhan sosial pascakonflik. Kegiatan seperti *dialog adat dan agama*, *pengajian bersama lintas kampung*, serta *pelatihan da'i moderat* berhasil memperkuat rasa saling percaya antarwarga. Pendekatan ini sesuai dengan model *peacebuilding through religion* yang dikembangkan oleh Appleby (2000), di mana agama dapat berperan sebagai agen perdamaian melalui internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual yang universal.

Lebih jauh lagi, relevansi Islam moderat pascakonflik juga terkait dengan upaya deradikalisasi. Menurut Kementerian Agama RI (2022), Sulawesi Tengah termasuk salah satu wilayah prioritas penguatan moderasi beragama karena masih terdapat potensi narasi intoleran di sejumlah daerah pascakonflik. Pendekatan berbasis Islam moderat dan kearifan lokal terbukti efektif untuk menekan radikalisme karena diterima oleh masyarakat secara kultural dan spiritual. Model pendidikan keagamaan berbasis lokal seperti yang diterapkan di madrasah-madrasah di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong mengajarkan fikih sosial, etika kemasyarakatan, dan penghormatan terhadap adat sebagai bagian dari ajaran Islam rahmatan lil 'alamin.

Dari perspektif teoritis, relevansi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan “religious peacebuilding” (Gopin,

2000) dan “sociocultural reconstruction” (Lederach, 1997), yang memandang perdamaian berkelanjutan hanya dapat tercapai jika agama dipahami sebagai kekuatan moral dan budaya yang membangun, bukan sebagai pemisah. Islam moderat di Tanah Kaili, dengan ciri keislaman yang bersahabat terhadap adat dan keberagaman, menjadi model ideal untuk rekonstruksi sosial pascakonflik di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, kajian Islam moderat di konteks pascakonflik Sulawesi Tengah memiliki relevansi strategis dan akademik dalam tiga hal utama:

1. Sebagai paradigma rekonsiliasi sosial, yang menguatkan relasi lintas agama melalui pendekatan spiritual dan kultural;
2. Sebagai model pendidikan keagamaan kontekstual, yang menanamkan nilai moderasi berbasis tradisi lokal Kaili; dan
3. Sebagai instrumen deradikalisasi damai, yang menekan potensi ekstremisme melalui internalisasi nilai Islam yang seimbang dan inklusif.

Islam moderat di Tanah Kaili dengan demikian bukan hanya warisan budaya religius, tetapi juga menjadi strategi sosial untuk menjaga keberlanjutan perdamaian, sebagaimana ditegaskan oleh Lederach (1997) bahwa perdamaian sejati hanya dapat dibangun di atas fondasi budaya lokal dan nilai spiritual yang hidup di tengah masyarakat.

E. Tujuan dan Arah Penulisan Buku

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika Islamisasi, transformasi nilai, serta interaksi antara Islam dan budaya lokal dalam masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Melalui pendekatan historis, antropologis, dan teologis, buku ini

berupaya merekonstruksi perjalanan panjang proses internalisasi ajaran Islam di Tanah Kaili sejak masa awal dakwah hingga perkembangan kontemporer pasca-konflik sosial. Secara akademik, tujuan utama penulisan ini adalah:

1. Menggali akar historis dan sosiologis Islamisasi di Tanah Kaili. Kajian ini bertumpu pada pandangan bahwa Islam tidak datang dalam ruang kosong, melainkan berinteraksi dengan sistem kepercayaan dan struktur sosial yang telah mapan. Hal ini sesuai dengan temuan Azra (2004) dan Reid (2010) yang menegaskan bahwa proses Islamisasi di Nusantara berlangsung melalui tahapan adaptasi budaya dan negosiasi nilai lokal.
2. Menganalisis bentuk perjumpaan Islam dan budaya Kaili. Islam di Sulawesi Tengah tidak hanya hadir sebagai sistem keimanan, tetapi juga sebagai kekuatan kultural yang melebur dalam tradisi lokal seperti *ntodea*, *vaya*, dan *nosarara nosabatutu* konsep yang mencerminkan solidaritas dan kesatuan sosial masyarakat Kaili (Abd. Rahman, 2019; Nawawi, 2020).
3. Menjelaskan peran Islam moderat dalam rekonsiliasi pasca-konflik. Dalam konteks konflik sosial keagamaan di Poso dan sekitarnya pada awal 2000-an, moderasi Islam menjadi instrumen penting dalam membangun kembali kohesi sosial dan perdamaian (Aly, 2011; Suaedy, 2013). Pendekatan Islam moderat yang menekankan nilai *tasamuh*, *tawazun*, dan *ta’awun* terbukti efektif dalam mengembalikan relasi sosial yang harmonis di tengah masyarakat multietnik dan multireligius.

Arah penulisan buku ini difokuskan pada upaya rekonsiliasi Islam lokal yang kontekstual dan moderat,

dengan menempatkan masyarakat Kaili sebagai pusat kajian keislaman Nusantara. Melalui pendekatan ini, buku diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi pengembangan studi Islam Indonesia yang bercorak dialogis dan berakar pada realitas budaya lokal.

Secara metodologis, penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sintesis antara kajian literatur dan analisis lapangan yang dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso. Pendekatan tersebut memungkinkan penggambaran Islam sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, bukan sekadar sebagai dogma normatif.

Dengan demikian, arah penulisan buku ini tidak hanya bersifat deskriptif-historis, tetapi juga reflektif dan konstruktif, untuk menjawab pertanyaan besar mengenai bagaimana Islam dapat terus hidup, beradaptasi, dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan universal di Tanah Kaili.

BAB II

ISLAM MODERAT KONSEP DAN URGENSINYA DI KONTEKS LOKAL

A. Makna dan ciri-ciri Islam moderat

Secara konseptual, Islam moderat merupakan corak keberagamaan yang menempatkan nilai keseimbangan (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*i'tidal*), dan harmoni sosial sebagai inti ajaran dan praksis kehidupan umat Islam. Moderasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai jalan tengah di antara ekstremisme dan liberalisme, tetapi juga sebagai paradigma keberagamaan yang menjunjung tinggi kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) dan keberlanjutan peradaban manusia. Menurut Azyumardi Azra (2016), Islam moderat atau *wasathiyyah al-Islam* merupakan ciri utama Islam di Nusantara yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, serta antara dimensi spiritual dan sosial. Sementara Yusuf al-Qaradawi (2007) mendefinisikan *al-wasathiyyah* sebagai posisi tengah yang adil dan proporsional dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam, tanpa sikap berlebih-lebihan (*ghuluw*) atau pengabaian (*tafrith*). Dalam konteks Indonesia, Kementerian Agama RI (2019) melalui *Gerakan Moderasi Beragama* menegaskan bahwa Islam moderat mencakup empat ciri utama:

1. Komitmen terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan (al-'adl wa al-wasathiyyah). Ciri ini menolak segala bentuk ekstremisme dan

diskriminasi. Islam moderat selalu mencari keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, antara nilai-nilai agama dan dinamika kehidupan modern.

2. Toleransi terhadap keragaman (at-tasamuh). Islam moderat mengakui pluralitas sebagai sunnatullah dan menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Menurut Nurcholish Madjid (1999), sikap ini merupakan pengejawantahan dari tauhid sosial—yakni pengakuan terhadap kesetaraan manusia di hadapan Tuhan.
3. Komitmen terhadap dialog dan musyawarah (as-syura wa al-hiwar). Dalam Islam moderat, dialog menjadi sarana utama penyelesaian perbedaan. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi deliberatif dalam masyarakat Islam klasik yang menekankan musyawarah untuk kemaslahatan bersama.
4. Keterbukaan terhadap pembaruan (at-tajdid). Islam moderat bersifat dinamis dan progresif. Ia tidak menolak perubahan, tetapi memandang modernisasi sebagai bagian dari *ijtihad* kontekstual untuk menjawab tantangan zaman (Federspiel, 2007; Esposito, 2011).

Secara sosiologis, Islam moderat di Indonesia berkembang melalui institusi pendidikan, dakwah kultural, dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang keduanya memainkan peran besar dalam membangun pemahaman Islam yang toleran, rasional, dan berkeadaban (Bruinessen, 2013). Kedua organisasi ini menjadi model Islam moderat karena mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nasionalisme dan pluralitas budaya lokal. Dalam konteks Sulawesi Tengah, nilai-nilai Islam moderat tercermin

dalam kearifan lokal masyarakat Kaili seperti *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu), yang selaras dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Melalui pendekatan ini, Islam tidak hanya menjadi sistem keyakinan, tetapi juga sumber nilai yang meneguhkan perdamaian dan solidaritas sosial pasca-konflik (Suaedy, 2013; Qodir, 2020).

Dengan demikian, Islam moderat bukan sekadar konsep teologis, tetapi merupakan praksis sosial yang menegaskan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin—agama yang membawa kedamaian, keadilan, dan kemanusiaan universal.

B. Prinsip Wasathiyyah dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Konsep *wasathiyyah* merupakan fondasi teologis dan etis dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah *wasath* secara etimologis berasal dari bahasa Arab “وسط” yang berarti “tengah”, “adil”, atau “seimbang”. Dalam terminologi syariat, *wasathiyyah* mengandung makna sikap moderat, tidak berlebihan (*ghuluw*) dan tidak pula mengabaikan (*tafrith*), melainkan menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan tuntunan wahyu (al-Qaradawi, 2007).

1. Dasar Qur'ani Prinsip Wasathiyyah

Ayat yang paling sering dijadikan landasan teologis bagi konsep *wasathiyyah* adalah firman Allah dalam:

وَكُذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya :

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang wasath (pertengahan), agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 143)

Menurut Ibn Kathir (*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 1, hlm. 199), makna *ummatan wasathan* adalah umat yang adil dan seimbang dalam keyakinan, ibadah, dan interaksi sosial. Mereka tidak bersikap ekstrem seperti kaum sebelumnya yang melampaui batas. Al-Tabari (*Jāmi' al-Bayān*, 2001) juga menafsirkan bahwa *wasathiyah* berarti “pilihan terbaik” (*khiyār al-umam*), yakni umat yang menempuh jalan tengah antara berlebihan dan lalai dalam beragama.

Selain ayat tersebut, beberapa ayat lain juga mencerminkan prinsip moderasi:

- a. Q.S. al-Furqan : 67 menegaskan keseimbangan dalam penggunaan harta (“tidak boros dan tidak kikir”);
- b. Q.S. Luqman : 19 mengajarkan moderasi dalam perilaku sosial dan tutur kata;
- c. Q.S. al-Hadid : 25 menegaskan bahwa Allah mengutus para rasul dengan kitab dan neraca agar manusia menegakkan keadilan (*al-qisth*), yang merupakan manifestasi dari *wasathiyah*.

Dengan demikian, secara teologis *wasathiyah* bukan konsep baru, melainkan ruh dari misi Islam sebagai agama yang menegakkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, individual dan sosial, dunia dan akhirat.

2. Prinsip Wasathiyyah dalam Sunnah

Dalam hadis Nabi saw, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah menegaskan jalan tengah sebagai ciri ajaran Islam. Di antaranya sabda beliau:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

Artinya :

Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang membinasakan umat sebelum kamu adalah sikap berlebihan dalam beragama. ”(HR. Ahmad, an-Nasa’i, dan Ibn Majah)

Hadis ini menjadi dasar normatif bahwa moderasi adalah esensi praktik keagamaan yang sesuai dengan Sunnah. Nabi saw/ juga bersabda:

خَيْرُ الْأُمُورِ أُوْسَطُهَا

Artinya :

“Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. ”(HR. al-Baihaqi, Syu‘ab al-Iman)

Menurut al-Nawawi (Syarh Sahih Muslim, 2000), hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah senantiasa menekankan prinsip keseimbangan dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Beliau melarang sahabat yang beribadah secara ekstrem tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan, seperti sahabat yang ingin berpuasa terus-menerus atau tidak menikah (HR. al-Bukhari, no. 5063).

3. Wasathiyyah sebagai Prinsip Kehidupan Sosial

Secara sosiologis, *wasathiyyah* menjadi dasar pengembangan masyarakat madani (*civil society*). Azyumardi Azra (2016) menyebut bahwa *wasathiyyah* adalah “ruh Islam Nusantara” karena nilai ini memampukan umat Islam untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara damai. Sementara John L. Esposito (2011) menyatakan bahwa *Islamic moderation* adalah kunci bagi stabilitas sosial-politik umat Islam di tengah dunia modern yang plural.

Dalam konteks keindonesiaan, *wasathiyyah* juga menjadi pondasi bagi gerakan Moderasi Beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (2019), dengan empat pilar utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Keempat pilar ini merupakan derivasi praktis dari prinsip *wasathiyyah* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Implikasi Prinsip Wasathiyyah

Prinsip *wasathiyyah* tidak hanya mengatur cara berpikir dan beribadah, tetapi juga menuntun umat Islam dalam membangun relasi sosial yang damai dan inklusif. Dalam konteks Sulawesi Tengah, penerapan nilai-nilai *wasathiyyah* menjadi penting untuk memperkuat rekonsiliasi sosial pasca-konflik dan membangun masyarakat yang berkeadaban serta berorientasi pada perdamaian (Suaedy, 2013; Qodir, 2020).

Dengan demikian, *wasathiyyah* bukan hanya ajaran moral-spiritual, melainkan paradigma integral dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Ia menegaskan Islam sebagai agama yang menolak ekstremisme, mengedepankan rasionalitas, serta menghargai keragaman dan keadilan sosial.

C. Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah antara

Ekstremisme dan Liberalisme

Moderasi beragama (*religious moderation*) merupakan paradigma keberagamaan yang menempatkan umat Islam di jalur tengah antara dua kutub ekstrem: ekstremisme keagamaan di satu sisi dan liberalisme keagamaan di sisi lain. Kedua kecenderungan ekstrem tersebut dinilai sama-sama berpotensi menyimpang dari prinsip dasar Islam yang menjunjung keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*i'tidal*). Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mengembalikan praktik keberagamaan pada prinsip *wasathiyah* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Konseptualisasi Moderasi Beragama

Menurut Kementerian Agama RI (2019), moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil posisi di tengah—tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama (ekstrem kanan), dan tidak pula mengabaikan atau menafsirkan agama secara bebas tanpa batas (ekstrem kiri). Pendekatan ini menuntut umat untuk berpegang teguh pada prinsip agama sambil menghormati keragaman dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Secara teoretis, Azyumardi Azra (2016) menegaskan bahwa moderasi beragama berakar pada konsep *wasathiyah al-Islamiyyah*, yang menjadi karakteristik utama Islam Nusantara. Islam dipahami bukan sebagai doktrin kaku, melainkan sistem nilai yang dinamis dan kontekstual, mampu berdialog dengan budaya lokal dan peradaban global tanpa kehilangan identitasnya.

Dalam perspektif global, John L. Esposito (2011) dan Rashid al-Ghannouchi (2013) menyatakan bahwa moderasi Islam muncul sebagai respon terhadap dua ancaman: radikalisme keagamaan pasca-11 September 2001 dan

sekularisme ekstrem di dunia Barat. Oleh karena itu, moderasi beragama berperan sebagai jalan tengah antara penolakan total terhadap modernitas dan penerimaan buta terhadap liberalisme.

2. Ekstremisme dan Liberalisme: Dua Kutub yang Kontras

Ekstremisme keagamaan ditandai dengan sikap fanatik, penolakan terhadap perbedaan, dan justifikasi kekerasan atas nama agama. Menurut Mahmood (2016) dan Qodir (2020), ekstremisme lahir dari pemahaman tekstual yang terlepas dari konteks sosial, sehingga melahirkan ideologi takfiri dan intoleransi. Dalam konteks Indonesia, ekstremisme seringkali berwujud dalam bentuk gerakan puritan dan radikal yang menolak pluralisme dan demokrasi.

Di sisi lain, liberalisme keagamaan muncul sebagai reaksi terhadap rigiditas ortodoksi, tetapi sering kali melampaui batas dengan menafsirkan agama secara subjektif dan bebas nilai. Nurcholish Madjid (1999) menekankan bahwa pembaruan Islam harus tetap berpijak pada teks dan etika wahyu, bukan pada kebebasan tanpa kendali. Ketika liberalisme melonggarkan makna kebenaran agama hingga bersifat relatif total, maka ia berpotensi mengikis substansi normatif Islam.

Dengan demikian, ekstremisme dan liberalisme merupakan dua bentuk penyimpangan yang sama-sama bertentangan dengan esensi Islam sebagai agama yang *ummatan wasathan* umat pertengahan yang adil, rasional, dan berkeadaban.

3. Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah

Moderasi beragama hadir untuk menyeimbangkan antara keteguhan akidah dan keterbukaan terhadap perubahan. Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradawi (2007)

menjelaskan bahwa *al-wasathiyyah* berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi proporsional: tidak memisahkan agama dari kehidupan sosial, namun juga tidak menjadikan agama sebagai alat politik atau ideologi kekerasan.

Prinsip utama moderasi beragama meliputi empat pilar (Kementerian Agama RI, 2019):

1. Komitmen kebangsaan menjaga integrasi nasional sebagai bagian dari pengamalan iman.
2. Toleransi menghormati perbedaan agama, mazhab, dan pandangan hidup.
3. Anti-kekerasan menolak radikalisme, ujaran kebencian, dan kekerasan atas nama agama.
4. Penerimaan terhadap budaya lokal mengakui dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Melalui empat pilar ini, moderasi beragama berperan sebagai “jalan tengah epistemologis” yang menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan realitas sosial. Ia bukan bentuk kompromi terhadap prinsip agama, tetapi reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam konteks kemanusiaan universal.

4. Implikasi Sosial dan Akademik

Secara sosial, moderasi beragama berperan penting dalam menjaga stabilitas bangsa, terutama di daerah pasca-konflik seperti Sulawesi Tengah. Kajian Suaedy (2013) dan Latif (2020) menunjukkan bahwa pendekatan moderat melalui pendidikan Islam, dialog lintas iman, dan revitalisasi budaya lokal berhasil meredam potensi kekerasan dan membangun solidaritas lintas komunitas.

Secara akademik, moderasi beragama menjadi paradigma keilmuan baru dalam studi Islam Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh Fahmi (2021) dalam kajiannya tentang *Islamic Moderation Framework*. Paradigma ini mengintegrasikan disiplin tafsir, fikih sosial, dan sosiologi agama untuk membentuk masyarakat beragama yang inklusif, rasional, dan berkeadaban.

Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga strategi kultural dan epistemologis dalam membangun peradaban Islam yang adil, damai, dan relevan dengan tantangan zaman. Ia meneguhkan posisi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* agama yang menebar kasih, bukan kebencian; menegakkan keadilan, bukan kekerasan; dan memelihara keberagaman, bukan meniadakannya.

D. Implementasi Moderasi dalam Kehidupan Masyarakat

Moderasi beragama (*religious moderation*) tidak berhenti pada tataran konsep normatif, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sosial, budaya, dan keagamaan sehari-hari. Implementasi moderasi beragama pada masyarakat Indonesia merupakan wujud konkret dari ajaran *wasathiyah al-Islamiyyah* yakni sikap hidup yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam menghadapi realitas sosial yang majemuk.

Menurut Kementerian Agama RI (2019), moderasi beragama di tingkat masyarakat mencakup tiga ranah utama: (1) moderasi dalam cara berpikir, (2) moderasi dalam bersikap dan berinteraksi sosial, serta (3) moderasi dalam kebijakan sosial-keagamaan. Ketiga ranah ini saling terkait dalam membentuk ekosistem sosial yang damai, toleran, dan inklusif.

1. Moderasi dalam Cara Berpikir

Moderasi beragama dimulai dari kesadaran intelektual untuk memahami ajaran agama secara rasional dan kontekstual. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, hal ini tercermin dalam tradisi keilmuan pesantren, madrasah, dan majelis taklim yang menekankan pendekatan *fiqh al-waqi'* pemahaman hukum Islam yang relevan dengan kondisi sosial (Qodir, 2020).

Pendekatan ini menghindarkan masyarakat dari sikap *tekstualistik-ekstrem* yang menolak realitas modern maupun *liberalisme berlebihan* yang menafsirkan agama secara bebas. Di lingkungan masyarakat Kaili misalnya, para ulama lokal dan tokoh adat sering menafsirkan ajaran Islam melalui konteks budaya lokal, seperti musyawarah adat (*nosabua*) dan gotong royong (*mapalus*), yang sejalan dengan nilai syura dan ukhuwah dalam Islam (Suaedy, 2013).

2. Moderasi dalam Sikap Sosial dan Keagamaan

Ciri paling nyata dari masyarakat moderat adalah kemampuan menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam konteks kehidupan sosial, Azyumardi Azra (2016) menyebut bahwa karakter moderat umat Islam Indonesia terbentuk melalui proses panjang akulturasi agama dan budaya. Islam di Nusantara tidak datang dengan kekerasan, melainkan melalui dakwah kultural yang menghargai tradisi lokal.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, nilai-nilai moderasi diwujudkan melalui:

1. Toleransi antarumat beragama, yang tampak dalam sikap saling menghormati hari raya, ibadah, dan ruang keagamaan.

2. Musyawarah dan gotong royong, sebagai mekanisme sosial untuk menyelesaikan perbedaan dan memperkuat solidaritas.
3. Kepedulian sosial (ta‘āwun), melalui kegiatan kemanusiaan lintas agama seperti bakti sosial, tanggap bencana, dan solidaritas warga.

Di wilayah pasca-konflik seperti Poso dan Sigi, penerapan nilai-nilai ini menjadi kunci rekonsiliasi sosial. Penelitian Suaedy (2013) menunjukkan bahwa komunitas Muslim dan Kristen di Sulawesi Tengah berhasil memulihkan hubungan sosial melalui pendidikan lintas iman, dialog budaya, dan kegiatan ekonomi bersama yang berlandaskan nilai saling percaya (*mutual trust*).

3. Moderasi dalam Kebijakan dan Kelembagaan Sosial

Implementasi moderasi juga tampak dalam kebijakan publik dan peran kelembagaan sosial-keagamaan. Pemerintah melalui Gerakan Moderasi Beragama (Kemenag RI, 2019) menekankan empat indikator praktik moderasi: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.

Organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam mewujudkan moderasi sosial. Menurut Bruinessen (2013), kedua organisasi ini berfungsi sebagai *civil Islam*, yakni kekuatan sosial yang menjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan realitas sosial-politik Indonesia.

Di tingkat lokal, lembaga adat seperti Lembaga Adat Kaili berperan dalam menanamkan nilai harmoni sosial melalui prinsip *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu), yang selaras dengan ajaran ukhuwah Islamiyah. Sinergi antara lembaga agama, pemerintah, dan adat ini

menciptakan model khas moderasi beragama berbasis kearifan lokal.

4. Dampak dan Tantangan Implementasi

Implementasi moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat berdampak positif terhadap peningkatan kohesi sosial dan penurunan potensi konflik berbasis agama. Penelitian Latif (2020) menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat literasi moderasi yang tinggi lebih cenderung menghindari ujaran kebencian dan intoleransi di ruang publik.

Namun, tantangan utama dalam penerapannya adalah pengaruh media sosial dan ideologi transnasional yang menyebarkan narasi ekstrem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, pendidikan karakter, dan dakwah berbasis empati sosial agar moderasi dapat terinternalisasi dalam budaya masyarakat (Fahmi, 2021).

5. Moderasi sebagai Basis Pembangunan Sosial

Dalam kerangka pembangunan sosial, moderasi beragama bukan sekadar urusan teologi, tetapi strategi kebudayaan dan politik kebangsaan. Yudi Latif (2020) menegaskan bahwa masyarakat moderat adalah prasyarat bagi negara yang demokratis dan berkeadilan. Moderasi menciptakan ruang sosial yang inklusif, tempat nilai agama dan budaya berkolaborasi membentuk harmoni sosial dan spiritualitas kebangsaan.

Dengan demikian, implementasi moderasi dalam kehidupan masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang menuntut partisipasi aktif dari ulama, pendidik, tokoh adat, dan lembaga pemerintah. Ia bukan hanya konsep normatif, melainkan praksis sosial yang membumikan

nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dalam konteks multikultural Indonesia.

E. Tantangan penerapan Islam moderat di daerah plural seperti Sulawesi Tengah

Penerapan Islam moderat di daerah plural seperti Sulawesi Tengah merupakan proses sosial-keagamaan yang kompleks karena berhadapan langsung dengan dinamika pluralitas agama, budaya, serta pengalaman sejarah konflik yang masih menyisakan ketegangan sosial. Islam moderat (*al-Islam al-wasathiyyah*) yang menekankan nilai keseimbangan, toleransi, dan keadilan, menjadi kebutuhan mendesak di wilayah yang memiliki keragaman etnik dan keagamaan seperti Poso, Sigi, dan Palu. Namun, upaya internalisasi nilai moderasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, kultural, dan ideologis.

1. Trauma Sosial dan Sisa Konflik Agama

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Islam moderat di Sulawesi Tengah adalah warisan trauma sosial akibat konflik agama yang melanda Poso dan sekitarnya pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Menurut penelitian McRae (2013) dalam *A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia*, konflik tersebut meninggalkan luka kolektif yang dalam serta menciptakan segregasi sosial antara komunitas Muslim dan Kristen.

Meski telah ada proses rekonsiliasi melalui *Malino Declaration* tahun 2001, rekonstruksi kepercayaan sosial (*social trust*) berjalan lambat. Di beberapa desa, masyarakat masih cenderung berinteraksi secara terbatas dalam ruang keagamaan dan sosial (Suaedy, 2013). Kondisi ini menghambat upaya dakwah Islam moderat yang menekankan harmoni dan keterbukaan lintas iman.

2. Pengaruh Ideologi Transnasional

Tantangan berikutnya datang dari arus ideologi keagamaan transnasional yang mengusung paham puritan dan intoleran. Menurut IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019), Sulawesi Tengah sempat menjadi salah satu daerah perekutan jaringan ekstrem seperti *Mujahidin Indonesia Timur (MIT)*. Meski jumlahnya kecil, eksistensi mereka memengaruhi persepsi masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan dan mengancam narasi moderasi Islam.

Paham keagamaan yang kaku dan eksklusif sering kali berhadapan dengan tradisi lokal masyarakat Kaili yang bersifat terbuka dan sinkretis. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara kelompok yang menolak kearifan lokal dengan mereka yang mempertahankannya sebagai bagian dari identitas keislaman Nusantara (Azra, 2016).

3. Minimnya Literasi Keagamaan dan Digital

Penelitian Fahmi (2021) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keagamaan dan digital di sebagian masyarakat pedesaan Sulawesi Tengah menjadi penghambat penyebaran Islam moderat. Banyak masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh narasi keagamaan ekstrem yang disebarluaskan melalui media sosial tanpa kemampuan kritis dalam menilai kebenaran informasi.

Hal ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan Islam yang moderat, terutama di madrasah kecil atau pesantren nonformal. Guru agama di beberapa wilayah mengakui bahwa bahan ajar tentang moderasi masih minim, sehingga pembelajaran fikih dan akidah lebih

menekankan aspek normatif daripada kontekstual (Bahdar, 2024).

4. Lemahnya Sinergi antara Lembaga Agama, Adat, dan Pemerintah

Kelemahan koordinasi antara lembaga agama (seperti MUI daerah), lembaga adat, dan pemerintah juga menjadi hambatan dalam penguatan Islam moderat. Padahal, menurut Azra (2017) dan Suaedy (2013), kolaborasi antara tokoh agama dan adat merupakan kunci keberhasilan dalam membangun harmoni sosial pasca-konflik di Sulawesi Tengah.

Masih terdapat kecenderungan sektoral dalam program pembinaan masyarakat misalnya, kegiatan keagamaan berjalan terpisah dari inisiatif kebudayaan atau sosial ekonomi. Kondisi ini membuat moderasi belum menjadi gerakan lintas sektor yang sistematis, melainkan sebatas slogan moral.

5. Tantangan Kultural dan Identitas Lokal

Masyarakat Kaili, Pamona, dan etnik lain di Sulawesi Tengah memiliki sistem nilai dan adat yang kuat. Meskipun banyak nilai adat yang sejalan dengan prinsip moderasi seperti *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu), sebagian masyarakat masih memandang integrasi nilai agama dan adat sebagai bentuk “sinkretisme” yang tidak murni.

Menurut Latif (2020), hal ini merupakan dilema yang umum dalam masyarakat plural: di satu sisi, kearifan lokal menjadi sarana efektif untuk membumikan Islam moderat; di sisi lain, sebagian kelompok puritan menganggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang autentik.

Ketegangan epistemologis ini memerlukan pendekatan dakwah kultural yang bijak dan inklusif.

6. Ketimpangan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Tantangan lain yang sering luput dari perhatian adalah kesenjangan ekonomi antar komunitas. Qodir (2020) menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi sering menjadi faktor laten munculnya kembali intoleransi. Di beberapa wilayah pasca-konflik, akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas publik belum merata antara komunitas agama. Ketimpangan ini dapat memunculkan rasa curiga dan ketidakpuasan yang menghambat tumbuhnya sikap saling percaya (*trust building*).

7. Politisasi Identitas Agama

Dalam konteks demokrasi lokal, agama sering dijadikan instrumen politik untuk memperoleh dukungan elektoral. Burhani (2018) dalam kajiannya tentang “Politisasi Agama di Indonesia” menegaskan bahwa ketika agama dipolitisasi, semangat moderasi melemah karena identitas keagamaan digunakan untuk membedakan “kita” dan “mereka”. Fenomena ini juga tampak dalam beberapa kontestasi politik di Sulawesi Tengah, di mana isu agama kadang dimanfaatkan untuk membangun basis dukungan komunitas tertentu.

8. Keterbatasan Model Pendidikan Moderasi di Akar Rumput

Meski Kementerian Agama telah menginisiasi *Gerakan Moderasi Beragama* sejak 2019, implementasinya di tingkat akar rumput belum optimal. Di banyak madrasah, belum tersedia kurikulum tematik yang mengajarkan moderasi secara sistematis. Penelitian Bahdar (2025) di

Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa guru fikih masih berfokus pada aspek ritual ibadah, sementara dimensi sosial dan budaya Islam yang moderat belum tergali dalam pembelajaran.

Hal ini menunjukkan bahwa transformasi keagamaan menuju moderasi memerlukan pendekatan pendidikan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian penerapan Islam moderat di daerah plural seperti Sulawesi Tengah menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional mulai dari trauma sejarah, infiltrasi ideologi transnasional, rendahnya literasi keagamaan, hingga ketimpangan sosial. Namun demikian, potensi kearifan lokal dan kekuatan budaya masyarakat Kaili serta dukungan kelembagaan Islam di Indonesia menjadi modal besar untuk memperkuat moderasi di wilayah ini. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi antara ulama, tokoh adat, pendidik, dan pemerintah daerah dalam membumikan nilai-nilai *wasathiyah* ke dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat.

BAB III

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Kaili

1. Pengertian Kearifan Lokal

Secara etimologis, istilah *kearifan lokal* merupakan terjemahan dari *local wisdom*, yang mengandung dua unsur utama: “kearifan” yang berarti kebijaksanaan, dan “lokal” yang merujuk pada tempat atau lingkungan tertentu. Dalam konteks ilmu sosial, kearifan lokal dipahami sebagai sistem pengetahuan, nilai, dan praktik sosial yang terbentuk dari pengalaman panjang suatu komunitas dalam beradaptasi dengan lingkungannya, baik alam maupun sosial. Menurut Geertz (1973), kearifan lokal merupakan bentuk *local knowledge* pengetahuan yang hidup, mengatur perilaku, dan memberi makna terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Sementara Koentjaraningrat (2009) menyebut kearifan lokal sebagai bagian dari sistem budaya yang berfungsi menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Keraf (2010) menambahkan bahwa kearifan lokal tidak hanya mencakup nilai etika dan moral, tetapi juga mengandung pandangan ekologis, politik, dan religius yang diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi sumber penting dalam membangun karakter, etika sosial, dan identitas suatu masyarakat. Dalam konteks Islam,

kearifan lokal sering kali menjadi *media dakwah kultural* yang menyesuaikan ajaran agama dengan konteks sosial masyarakat. Menurut Azra (2016), proses islamisasi di Nusantara berlangsung damai karena mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan substansi ajaran Islam. Dengan demikian, kearifan lokal bukan antitesis dari agama, tetapi sarana efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam budaya setempat.

2. Kearifan Lokal dalam Konteks Budaya Kaili

Masyarakat Kaili merupakan salah satu suku besar di Sulawesi Tengah yang mendiami wilayah Palu, Sigi, dan Donggala. Mereka memiliki sistem nilai dan pranata sosial yang kaya, mencakup bahasa, adat, ritus, dan filosofi hidup yang sarat dengan makna moral dan spiritual. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu, masyarakat, dan alam sekitar. Menurut penelitian Abdullah (2017) dan Wekke (2020), kearifan lokal masyarakat Kaili terbentuk melalui perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang masuk sejak abad ke-17. Proses akulturasi ini menghasilkan corak keberagamaan yang moderat, terbuka, dan menghargai perbedaan. Beberapa nilai utama dalam budaya Kaili yang dianggap sebagai kearifan lokal antara lain:

a. Nosarara Nosabatutu (Bersaudara dan Bersatu)

Nilai ini merupakan prinsip dasar kehidupan sosial masyarakat Kaili yang menekankan pentingnya solidaritas dan persaudaraan. Nosarara nosabatutu berarti “bersaudara dan bersatu” dalam bahasa Kaili. Nilai ini mengandung makna bahwa keberhasilan dan kedamaian hanya dapat dicapai melalui kebersamaan. Penelitian Rahim (2019) menjelaskan bahwa filosofi ini tidak hanya menjadi semboyan moral, tetapi juga diterapkan dalam praktik

sosial seperti *gotong royong*, musyawarah desa, dan penyelesaian konflik adat. Dalam konteks keislaman, nilai ini sejalan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah yang diajarkan oleh Islam.

b. Sintuvu Maroso (Kebersamaan yang Kokoh)

Sintuvu maroso* adalah ungkapan kearifan Kaili yang berarti “bersatu kita kuat”. Nilai ini mencerminkan semangat kolektivitas dan tanggung jawab sosial dalam menjaga harmoni masyarakat. Menurut Wekke dan Bahdar (2021), prinsip *sintuvu maroso* menjadi dasar solidaritas sosial pasca-konflik di Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah bahkan menjadikannya semboyan resmi untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian antaragama. Nilai ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kaili bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.

c. Mali Ntuvu (Tahu Diri atau Menghormati Orang Lain)

Nilai *mali ntuvu* mencerminkan kesadaran diri untuk menempatkan diri secara proporsional di hadapan orang lain. Dalam konteks sosial, ini berarti menghindari sikap sompong, menghormati yang tua, dan menghargai perbedaan status sosial. Menurut Pateda (2018), nilai ini berakar pada sistem etika yang kuat dalam budaya Kaili dan berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*) yang menjaga harmoni antaranggota masyarakat. Dalam perspektif Islam, nilai ini identik dengan akhlak karimah dan konsep *tawadhu'* (rendah hati).

d. Vaya (Keseimbangan dan Keteraturan)

Konsep *vaya* berarti hidup selaras dengan hukum alam dan sosial. Masyarakat Kaili percaya bahwa keseimbangan harus dijaga antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Ketidakseimbangan akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Dalam Islam, nilai *vaya* beririsan dengan prinsip *adl* (keadilan) dan *mizan* (keseimbangan), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Rahman :7–8:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ

Terjemahnya:

“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca (keadilan), agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.”

Nilai ini menunjukkan adanya keselarasan antara pandangan dunia Kaili dan prinsip Islam dalam menjaga harmoni kosmis dan sosial.

e. Ledo Mpombongo (Musyawarah dan Konsensus)

Dalam budaya Kaili, pengambilan keputusan penting dilakukan melalui *ledo mpombongo* forum musyawarah yang menghimpun para tetua adat dan tokoh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang *syura* (musyawarah) sebagaimana termaktub dalam QS. Asy-Syura :38.

Menurut Bahdar (2024), lembaga *ledo mpombongo* memiliki peran strategis dalam meredam konflik dan memperkuat partisipasi sosial dalam penyelesaian masalah komunitas. Tradisi ini menjadi salah satu wujud konkret implementasi moderasi Islam berbasis budaya lokal.

3. Kearifan Lokal Kaili sebagai Basis Moderasi Islam

Akulturasi antara Islam dan budaya Kaili menciptakan model keberagamaan yang moderat, di mana nilai-nilai lokal berfungsi sebagai *jembatan kultural* dalam

membumikan ajaran Islam. Suaedy (2013) mencatat bahwa masyarakat Kaili memandang Islam bukan sebagai agama luar, tetapi sebagai bagian integral dari sistem nilai lokal yang menekankan persaudaraan dan perdamaian. Nilai-nilai seperti *nosarara nosabatutu* dan *sintuvu maroso* menjadi bukti bahwa moderasi Islam di Sulawesi Tengah bukanlah konsep baru, melainkan realitas sosial yang telah mengakar dalam struktur budaya masyarakat. Dengan demikian kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Kaili merupakan fondasi moral dan sosial yang mendukung penguatan Islam moderat di Sulawesi Tengah. Nilai-nilai seperti *nosarara nosabatutu*, *sintuvu maroso*, *mali ntuvu*, dan *ledo mpombongo* selaras dengan prinsip *wasathiyah* dalam Islam yakni keseimbangan, persaudaraan, dan keadilan. Dengan demikian, budaya Kaili tidak hanya menjadi warisan etnografi, tetapi juga potensi strategis dalam membangun harmoni sosial dan moderasi beragama di wilayah plural.

B. Kearifan lokal dalam praktik sosial dan adat religius

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan sistem nilai dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat sebagai pedoman hidup bersama. Dalam konteks masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah, kearifan lokal berfungsi sebagai penopang harmoni sosial dan religiusitas masyarakat, serta menjadi medium penting dalam membangun solidaritas antarwarga lintas etnis dan agama.

1. Gotong Royong: Manifestasi Nilai Sosial-Religius

Secara akademik, gotong royong dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial yang bersumber dari pandangan hidup kolektif masyarakat agraris. Koentjaraningrat (2009) menyebutnya sebagai ciri khas budaya Indonesia yang

menekankan kerja bersama tanpa pamrih demi kepentingan umum. Dalam tradisi masyarakat Kaili, gotong royong dikenal melalui praktik "pombae" atau "mobago", yakni kegiatan bersama dalam membangun rumah, menyiapkan pesta adat, atau membantu keluarga yang berduka.

Gotong royong dalam konteks Islam moderat beririsan dengan ajaran ukhuwah (persaudaraan) dan ta‘awun (tolong-menolong) sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Mā‘idah* :2, “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*” Nilai ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masyarakat Kaili sejalan dengan prinsip Islam yang menolak individualisme dan mengutamakan kebersamaan untuk kemaslahatan.

2. Sintuvu: Filosofi Persatuan dan Kehidupan Bersama

Istilah sintuvu dalam bahasa Kaili berarti “bersatu” atau “kebersamaan”. Menurut penelitian Humaedi (2019) dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, konsep sintuvu menjadi fondasi moral masyarakat Kaili dalam menjaga integrasi sosial, terutama pasca-konflik di Sulawesi Tengah. Sintuvu mengandung makna bahwa kehidupan bermasyarakat harus dijalani secara kolektif, dengan saling menghargai perbedaan dan mengedepankan mufakat dalam setiap keputusan. Secara religius, sintuvu mencerminkan prinsip tawassuth (moderasi) dalam Islam, yaitu sikap berada di tengah dan menolak ekstremisme maupun eksklusivisme. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai sintuvu tampak dalam kegiatan sosial seperti musyawarah kampung, gotong royong, dan doa bersama lintas agama, yang memperkuat jaringan sosial dan menciptakan stabilitas komunitas.

3. Nosarara Nosabatutu: Spirit Persaudaraan dan Rekonsiliasi

Ungkapan “nosarara nosabatutu” berarti *bersaudara dan bersatu*, yang menjadi semboyan resmi Sulawesi Tengah. Secara akademik, konsep ini dipahami sebagai bentuk local wisdom of peace (kearifan lokal untuk perdamaian), yang menegaskan pentingnya kebersamaan, kesetaraan, dan saling menghormati antaranggota masyarakat (Madjid, 2021, *Jurnal Sosial Humaniora*). Nilai nosarara nosabatutu lahir dari pengalaman historis masyarakat Kaili yang multietnis dan multireligius. Pasca-konflik Poso, nilai ini diinternalisasikan kembali melalui kegiatan sosial dan pendidikan agama untuk memperkuat rekonsiliasi dan toleransi. Dalam pandangan Islam, prinsip ini selaras dengan konsep *islāh* (perdamaian) dan *ukhuwah insāniyyah* (persaudaraan kemanusiaan), sebagaimana diajarkan dalam QS. *Al-Hujurāt* [49]:10 “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu.*”

4. Relevansi dengan Pendidikan Islam Moderat

Integrasi nilai-nilai gotong royong, sintuvu, dan nosarara nosabatutu dalam pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah mencerminkan penerapan Islam yang kontekstual dan moderat. Guru dan tokoh agama sering menanamkan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran fikih dan akhlak, sehingga peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam secara normatif, tetapi juga menghayatinya dalam praktik sosial yang menumbuhkan toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Azra (2019) tentang Islam Nusantara yang menekankan adaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi tauhid. Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Kaili menjadi sarana strategis

untuk memperkuat moderasi beragama dan ketahanan sosial di daerah plural.

C. Kearifan Lokal sebagai Perekat Sosial Lintas Agama dan Etnis

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang tumbuh dari pengalaman panjang suatu masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya sekitarnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, kearifan lokal berfungsi sebagai lem perekat sosial (social glue) yang menjaga kohesi antarkelompok agama dan etnis (Geertz, 1973; Koentjaraningrat, 2009). Khusus di Sulawesi Tengah, terutama di kalangan masyarakat Kaili, Pamona, dan Bugis perantauan, kearifan lokal telah menjadi mekanisme kultural dalam merawat kerukunan dan menghindari konflik sosial yang pernah terjadi. Beberapa nilai lokal seperti sintuvu, nosarara nosabatutu, gotong royong, dan musyawarah menjadi basis kehidupan bersama yang melampaui batas-batas agama dan etnis.

1. Nilai Sintuvu: Harmoni dalam Kebersamaan

Nilai sintuvu (bersatu dalam semangat kebersamaan) memiliki fungsi integratif dalam masyarakat plural. Menurut Humaedi (2019) dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, konsep sintuvu mengajarkan bahwa manusia hanya bisa hidup damai jika saling menopang satu sama lain tanpa melihat latar belakang agama atau suku. Sintuvu diwujudkan dalam berbagai praktik sosial seperti kerja bakti bersama lintas agama, saling membantu saat upacara adat, atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam perspektif sosial, sintuvu mencerminkan modal sosial (social capital) yang menciptakan kepercayaan dan solidaritas antarkelompok. Sedangkan dalam konteks keagamaan, nilai

ini sejalan dengan semangat ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) dalam Islam, serta prinsip saling menghormati antarumat sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Hujurāt* [49]:13 tentang keberagaman manusia sebagai rahmat untuk saling mengenal (*lita 'ārafū*).

2. Nosarara Nosabatutu: Kearifan Perdamaian dan Rekonsiliasi

Ungkapan nosarara nosabatutu (bersaudara dan bersatu) menjadi semboyan Provinsi Sulawesi Tengah dan merepresentasikan nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan persaudaraan lintas agama dan etnis. Menurut Madjid (2021) dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, semboyan ini muncul dari kesadaran kolektif masyarakat pasca-konflik Poso yang menyadari pentingnya hidup damai dalam keberagaman. Nosarara nosabatutu bukan hanya slogan, tetapi juga filsafat sosial yang dihidupi melalui forum lintas iman, kerja sama tokoh adat dan tokoh agama, serta pendidikan multikultural di sekolah dan madrasah. Nilai ini terbukti efektif dalam proses rekonsiliasi sosial dan membangun kembali kepercayaan antarumat yang sempat retak. Dalam kerangka akademik, konsep ini dapat dikaitkan dengan teori civic pluralism (Banks, 2004) yang menekankan pentingnya partisipasi semua kelompok sosial dalam kehidupan publik berdasarkan prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan.

3. Gotong Royong dan Musyawarah: Praktik Sosial Universal

Nilai gotong royong dan musyawarah adalah bentuk kearifan lokal yang menjembatani hubungan antarwarga lintas etnis dan agama. Dalam masyarakat Kaili, gotong royong (pombae) dilakukan tanpa membedakan keyakinan; misalnya saat membantu pembangunan rumah, panen

bersama, atau menolong warga yang tertimpa musibah. Musyawarah (*saro*) juga menjadi mekanisme penyelesaian masalah sosial dengan mengedepankan mufakat dan keadilan. Praktik ini memperkuat prinsip tawassuth (moderat) dan tasamuh (toleran) dalam Islam serta menghidupkan demokrasi lokal berbasis budaya. Secara akademik, Rahim (2020) dalam *Jurnal Komunitas* menegaskan bahwa praktik gotong royong dan musyawarah di daerah plural berfungsi sebagai sarana komunikasi lintas identitas yang memperkuat jejaring sosial dan menghindarkan masyarakat dari fragmentasi sosial dan politik identitas.

4. Kearifan Lokal dan Pendidikan Multikultural

Kearifan lokal juga menjadi basis pendidikan multikultural dan moderasi beragama di Sulawesi Tengah. Nilai-nilai seperti *sintuvu* dan *nosarara nosabatutu* diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah. Penelitian Azra (2019) menekankan bahwa pendidikan Islam berbasis kearifan lokal membantu menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan empati sosial. Hal ini penting untuk mencetak generasi muda yang religius, terbuka, dan menghormati perbedaan. Melalui pendidikan berbasis budaya lokal, moderasi beragama dapat tumbuh secara alami dari akar sosial masyarakat sendiri, bukan dari tekanan ideologis.

5. Relevansi Sosial dan Keberlanjutan

Kearifan lokal sebagai perekat sosial lintas agama dan etnis menjadi model penting dalam menjaga kohesi sosial di Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengandung tiga fungsi utama:

1. Fungsi integratif, menjaga kesatuan masyarakat plural.
2. Fungsi edukatif, menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan pada generasi muda.
3. Fungsi preventif, mencegah potensi konflik sosial dan memperkuat resolusi damai berbasis budaya.

Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Kaili dan daerah sekitarnya bukan hanya warisan budaya, tetapi juga strategi sosial-religius yang relevan dengan pembangunan perdamaian dan moderasi beragama di Indonesia kontemporer.

D. Titik Temu Nilai Islam dengan Nilai Budaya Kaili

Islam dan budaya lokal masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah memiliki hubungan yang saling berinteraksi secara dinamis sejak masa awal Islamisasi. Dalam konteks antropologi keagamaan, Islam tidak hadir untuk menggantikan seluruh tatanan budaya lokal, melainkan berdialog dan berintegrasi dengan sistem nilai yang telah ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Clifford Geertz (1973) bahwa agama di Nusantara berkembang melalui proses akulturasi dan adaptasi terhadap konteks budaya setempat.

1. Islam sebagai Agama yang Inklusif terhadap Budaya

Ajaran Islam memiliki prinsip universalitas dan fleksibilitas nilai, sehingga memungkinkan penerimaan terhadap tradisi lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat. Dalam masyarakat Kaili, banyak praktik budaya yang diselaraskan dengan nilai Islam tanpa kehilangan identitas lokalnya. Sebagai contoh, upacara *vaya* (tolong-menolong dalam acara adat seperti pernikahan, panen, atau kematian) merepresentasikan nilai ta'awun

dalam Islam, yakni saling membantu dalam kebaikan (QS. *Al-Mā'idah* [5]:2). Demikian pula nilai *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu) memiliki kesamaan substansial dengan ajaran ukhuwah Islamiyyah yang menekankan persaudaraan universal tanpa memandang perbedaan agama dan etnis (Al-Qur'an, QS. *Al-Hujurāt* [49]:10). Azra (2004) dalam karyanya *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara* menegaskan bahwa proses Islamisasi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, berlangsung secara damai melalui pendekatan kultural yang mengedepankan dialog, bukan pemaksaan. Hal inilah yang menjadikan Islam dapat berakar kuat di tanah Kaili.

2. Keselarasan antara Etika Sosial Islam dan Nilai Adat Kaili

Budaya Kaili sangat menekankan nilai kebersamaan (sintuvu), kejujuran (tina), dan keadilan (tinepa). Nilai-nilai tersebut sejatinya memiliki kesamaan moral dengan prinsip ajaran Islam seperti 'adl (keadilan), *ṣidq* (kejujuran), dan ukhuwwah (persaudaraan). Penelitian Nawawi (2020) dalam *Jurnal Sosiohumaniora Islamica* menunjukkan bahwa praktik sosial masyarakat Kaili seperti *gotong royong*, *tolong-menolong*, dan *musyawarah adat* sejalan dengan etika sosial Islam yang menekankan solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Integrasi ini menunjukkan bahwa Islam tidak menegaskan adat, tetapi memberi makna baru yang religius terhadap tradisi yang telah ada. Sebagai contoh, tradisi *mobaa* (musyawarah adat) yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antarwarga dipandang sejalan dengan prinsip *syūrā* dalam Islam sebagaimana disebut dalam QS. *Asy-Syūrā* [42]:38, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

3. Ritual Adat yang Disinergikan dengan Nilai Islam

Beberapa ritual adat masyarakat Kaili mengalami proses islamisasi yang mengubah substansi tanpa menghapus bentuknya. Misalnya, ritual syukuran panen (mompake) yang dahulu berisi sesajen kini diganti dengan doa dan pembacaan surah Yasin serta tahlilan. Fenomena ini menunjukkan adanya proses kulturalisasi Islam, di mana unsur adat tetap dipertahankan, tetapi diberi makna baru sesuai nilai tauhid. Hal ini sejalan dengan pendapat Woodward (2011) dalam *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, bahwa islamisasi budaya Nusantara cenderung menempuh jalur adaptif memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam struktur budaya yang sudah mapan, bukan menggantikannya secara total.

4. Keadaban (Civility) dan Nilai Perdamaian

Baik Islam maupun budaya Kaili menempatkan perdamaian (mosintuwu) dan penghormatan terhadap sesama (pangata) sebagai nilai utama dalam hubungan sosial. Dalam pandangan Islam, hal ini bersumber dari ajaran rahmatan lil ‘ālamīn, yaitu bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh makhluk (QS. *Al-Anbiyā’* :107). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar rekonsiliasi sosial masyarakat Sulawesi Tengah pasca-konflik. Penelitian Suaedy (2013) mencatat bahwa tokoh agama dan adat bersama-sama menghidupkan kembali nilai *nosarara nosabatutu* sebagai landasan moral untuk membangun perdamaian lintas agama. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya berperan sebagai agama normatif, tetapi juga sebagai sumber etika sosial dan budaya yang memperkuat struktur moral masyarakat Kaili.

5. Titik Temu sebagai Basis Islam Moderat

Sinergi antara nilai Islam dan budaya Kaili membentuk karakter Islam moderat (wasathiyyah) di Sulawesi Tengah. Moderasi ini lahir dari keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran agama dan penghargaan terhadap nilai budaya lokal. Seperti dikemukakan oleh Anwar (2022) dalam *Jurnal Harmoni Puslitbang Bimas Agama*, titik temu antara Islam dan budaya lokal merupakan fondasi sosio-teologis bagi moderasi beragama, karena memungkinkan Islam hadir dalam bentuk yang ramah budaya, menghargai perbedaan, dan mendorong kohesi sosial. Dengan demikian, Islam di Tanah Kaili bukanlah Islam yang eksklusif, tetapi Islam yang berakar dan berwajah lokal, yang menampilkan harmoni antara agama dan tradisi.

E. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Dakwah dan Pendidikan Islam

Revitalisasi kearifan lokal dalam dakwah dan pendidikan Islam merupakan upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang selaras dengan ajaran Islam sebagai sarana internalisasi nilai keagamaan dan sosial. Dalam konteks masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai medium dakwah dan pendidikan yang efektif karena bersumber dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Menurut Abdurrahman (2017) dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, revitalisasi kearifan lokal adalah proses mengaktualisasi nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dalam konteks modern, tanpa kehilangan makna moral dan spiritualnya. Dengan kata lain, dakwah Islam harus berpijak pada konteks sosial-budaya masyarakat, sehingga pesan keagamaan dapat diterima dengan lebih arif dan membumi.

1. Kearifan Lokal sebagai Media Dakwah Kontekstual

Dalam tradisi masyarakat Kaili, nilai-nilai seperti *sintuvu* (kebersamaan), *nosarara nosabatutu* (persaudaraan dan kesatuan), serta *mosintuwu* (gotong royong) merupakan aset kultural yang dapat dijadikan media dakwah kontekstual. Tokoh agama dan adat di Sulawesi Tengah sering memanfaatkan forum adat, kegiatan sosial, dan ritual lokal sebagai ruang dakwah yang menekankan nilai moral universal Islam, seperti keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Penelitian Nawawi (2020) dalam *Jurnal Sosiohumaniora Islamica* menunjukkan bahwa dakwah berbasis kearifan lokal lebih efektif dibanding pendekatan formal-institusional, karena memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan masyarakat. Misalnya, kegiatan *pengajian sintuvu* di desa-desa Kaili dikemas dengan tradisi makan bersama dan musyawarah, mencerminkan integrasi dakwah dengan nilai kebersamaan. Pendekatan ini sejalan dengan teori cultural da‘wah yang dikemukakan oleh Woodward (2011), bahwa keberhasilan Islamisasi di Nusantara ditentukan oleh kemampuan dakwah untuk beradaptasi dengan simbol dan struktur budaya lokal.

2. Integrasi Nilai Lokal dalam Pendidikan Islam

Revitalisasi kearifan lokal juga penting dalam pendidikan Islam, terutama di madrasah dan pesantren di wilayah Sulawesi Tengah. Integrasi nilai budaya lokal seperti *tina* (kejujuran), *tinepa* (keadilan), dan *sintuvu* (solidaritas) dalam pembelajaran fikih dan akhlak dapat memperkuat pendidikan karakter berbasis moderasi beragama. Menurut Azra (2019) dan Mujiburrahman (2021), pendidikan Islam yang kontekstual dan berbasis budaya lokal memiliki dua keunggulan:

- a. Meningkatkan relevansi pendidikan agama dengan realitas sosial masyarakat; dan

- b. Membangun kesadaran multikultural yang menghargai perbedaan dan menumbuhkan toleransi.

Di beberapa madrasah di Kabupaten Sigi dan Donggala, nilai *nosarara nosabatutu* bahkan dijadikan motto lembaga pendidikan, yang menegaskan semangat kolaboratif antara guru, siswa, dan masyarakat dalam membentuk generasi moderat. Model pendidikan ini sesuai dengan pendekatan Islamic character education yang menekankan pembentukan akhlak melalui pengalaman sosial dan nilai budaya, sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2012) dan Zuhdi (2015).

3. Dakwah Humanis dan Rekonstruksi Nilai Sosial

Revitalisasi kearifan lokal dalam dakwah juga terkait dengan pendekatan humanis dan rekonstruktif. Dakwah tidak lagi dipahami hanya sebagai penyampaian ajaran, tetapi juga sebagai pembinaan sosial dan kultural. Dalam konteks masyarakat Kaili pasca-konflik, pendekatan dakwah berbasis nilai *sintuvu* dan *mosintuwu* berperan penting dalam rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Penelitian Suaedy (2013) dalam *Jurnal Harmoni* menunjukkan bahwa tokoh agama dan adat menggunakan nilai-nilai lokal tersebut untuk menanamkan kembali kepercayaan antarumat, melalui pesan damai dan kerja sama sosial lintas agama. Hal ini memperlihatkan bahwa dakwah kontekstual berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi deradikalisasi dan moderasi beragama, karena menumbuhkan empati sosial dan kesadaran bersama akan nilai kemanusiaan universal.

4. Strategi Revitalisasi: Kolaborasi Adat, Ulama, dan Institusi Pendidikan

Revitalisasi kearifan lokal membutuhkan sinergi antara tokoh adat, ulama, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini dapat berbentuk:

- a. Pendidikan berbasis komunitas, di mana nilai-nilai adat diintegrasikan ke dalam kurikulum keagamaan;
- b. Pelatihan guru dan da'i berbasis budaya lokal, agar materi dakwah dan pembelajaran disampaikan secara kontekstual;
- c. Dialog lintas iman dan adat, sebagai sarana memperkuat kohesi sosial dan memperluas pemahaman keagamaan yang moderat.

Menurut Rahim (2020) dalam *Jurnal Komunitas Pendidikan Islam*, sinergi ini memungkinkan munculnya model pendidikan Islam berbasis kearifan lokal (local wisdom-based Islamic education) yang tidak hanya mengajarkan dogma, tetapi juga membentuk karakter sosial dan spiritual sesuai konteks masyarakat setempat.

5. Implikasi Akademik dan Sosial

Revitalisasi kearifan lokal dalam dakwah dan pendidikan Islam membawa implikasi luas:

- a. Akademik memperkaya studi Islam Nusantara dengan basis empiris lokal yang menunjukkan pluralitas ekspresi Islam;
- b. Sosial memperkuat harmoni lintas agama dan etnis di daerah plural seperti Sulawesi Tengah;
- c. Pendidikan mendorong transformasi kurikulum yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan universal.

Dengan demikian, revitalisasi ini bukan sekadar pelestarian budaya, tetapi juga proses transformasi nilai Islam agar

tetap hidup dan membumi dalam dinamika masyarakat modern.

BAB IV

PERAN TOKOH AGAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN

A. Kiprah Ulama dan Da'i Lokal dalam Membangun Islam Damai di Tanah Kaiili

Peran ulama dan da'i lokal dalam membangun Islam damai di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah, memiliki akar sejarah panjang yang berkelindan dengan proses Islamisasi dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Secara akademik, kiprah mereka dapat dipahami sebagai bagian dari *local religious agency* yakni upaya ulama dan tokoh keagamaan lokal dalam mentransmisikan ajaran Islam secara kontekstual, melalui bahasa, simbol, dan tradisi yang dekat dengan masyarakat Kaili. Menurut Abd. Kadir (2018) dalam kajiannya tentang sejarah Islam di Sulawesi Tengah, proses Islamisasi di wilayah ini tidak hanya bersumber dari dakwah kerajaan atau ulama pendatang dari luar, tetapi juga diperkuat oleh peran ulama lokal yang mampu menyelaraskan dakwah dengan nilai-nilai budaya seperti *sintuvu* (persatuan), *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu), serta *pebombo* (musyawarah). Melalui nilai-nilai tersebut, dakwah Islam diterima sebagai bagian dari tatanan moral masyarakat Kaili, bukan sebagai ideologi yang memutuskan hubungan sosial. Ulama dan da'i lokal, seperti Imam Lere, Guru Tatura, dan Syekh Abdullah Raqie,

dikenal karena pendekatan dakwah mereka yang menekankan pentingnya perdamaian dan toleransi. Berdasarkan penelitian Said (2020) dalam *Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia*, para ulama di wilayah ini menggunakan metode dakwah berbasis budaya, seperti *hadra*, *zikir bersama*, dan *maulid adat*, yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengajaran agama, tetapi juga perekat sosial lintas etnis dan agama.

Dalam konteks pasca-konflik Poso, peran ulama dan da'i lokal semakin signifikan. Mereka menjadi mediator dan fasilitator dialog lintas agama untuk menumbuhkan kembali kepercayaan sosial antarumat. Studi Alim (2019) di *Indonesian Journal of Islamic Peace Studies* menunjukkan bahwa para ulama di Sulawesi Tengah membangun narasi Islam damai melalui khotbah, majelis taklim, dan pendidikan madrasah. Narasi tersebut menekankan konsep *rahmatan lil 'alamin*, toleransi, dan pentingnya *silaturahmi* sebagai fondasi kehidupan beragama di masyarakat plural. Selain itu, lembaga-lembaga lokal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi wadah strategis bagi ulama dan da'i untuk mempromosikan moderasi beragama. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, dakwah Islam damai diintegrasikan dalam kegiatan sosial seperti bakti kemasyarakatan, pelatihan guru agama, dan kampanye literasi keagamaan di kalangan pemuda. Dengan demikian, kiprah ulama dan da'i lokal di Tanah Kaili mencerminkan model dakwah yang adaptif, inklusif, dan berbasis budaya lokal. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyebar ajaran Islam, tetapi juga sebagai agen perdamaian (*agents of peace*) yang mengembalikan semangat *sintuvu* dan *nosarara nosabatutu* sebagai nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Kaili. Hal ini menjadikan

Islam di Tanah Kaili bukan sekadar sistem keyakinan, tetapi juga kekuatan sosial yang menumbuhkan solidaritas dan harmoni lintas perbedaan.

B. Sinergi antara Pesantren, Madrasah, dan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Islam Modoerat di Tanah Kaili

Sinergi antara pesantren, madrasah, dan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah masyarakat Kaili, merupakan faktor kunci dalam menguatkan Islam moderat dan menjaga harmoni sosial pasca-konflik. Berdasarkan temuan akademik, kerja sama ini membentuk *ekosistem pendidikan keagamaan* yang saling melengkapi antara otoritas keagamaan (pesantren dan madrasah) dan otoritas kebijakan publik (pemerintah daerah) dalam membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan toleran terhadap perbedaan. Menurut Hafid (2021) dalam jurnal *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, sinergi ini dapat dipahami dalam tiga dimensi utama: pertama, dimensi ideologis berupa penyatuan visi dakwah Islam rahmatan lil 'alamin yang diusung oleh lembaga pendidikan Islam dan didukung oleh kebijakan daerah berbasis moderasi beragama. Kedua, dimensi kelembagaan yang melibatkan koordinasi kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan sosial-keagamaan. Ketiga, dimensi kultural yang mengaitkan nilai-nilai lokal seperti *sintuvu* (gotong royong) dan *nosarara nosabatutu* (persaudaraan) dalam pendidikan karakter di pesantren dan madrasah. Pesantren di Tanah Kaili, seperti Pesantren Alkhairaat, Darul Muttaqin, dan Pesantren DDI Palu, telah memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai wasathiyyah (moderat). Berdasarkan studi Mahmud (2020) di *Indonesian Journal of Islamic Education*, pesantren-pesantren ini secara aktif membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dalam program *Pendidikan Islam Moderat* dan *Deradikalisasi*.

Keagamaan yang melibatkan santri dan masyarakat. Salah satu bentuk konkret sinergi tersebut adalah pelatihan guru madrasah dan penyuluhan agama dengan dukungan Kementerian Agama dan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Madrasah, baik negeri maupun swasta, berperan sebagai jembatan antara pesantren dan masyarakat umum. Dalam kajian Nuraini & Abubakar (2022) di *Jurnal Sosial dan Humaniora Islam*, madrasah di Sulawesi Tengah menjadi pusat pendidikan inklusif yang mengajarkan nilai keagamaan sekaligus nilai kebangsaan.

Melalui kegiatan seperti *kelas lintas agama*, *diskusi tematik toleransi*, dan *pembelajaran berbasis proyek sosial*, madrasah berhasil menginternalisasikan nilai Islam moderat kepada generasi muda. Pemerintah daerah turut memperkuat sinergi ini melalui kebijakan strategis. Berdasarkan laporan Bappeda Sulawesi Tengah (2021), terdapat program integratif seperti *Gerakan Moderasi Beragama di Sekolah dan Pesantren*, *Pelatihan Guru Moderasi Digital*, dan *Festival Budaya Religi Sintuvi Kaili* yang bertujuan mempertemukan nilai keagamaan dengan kearifan lokal. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kehadiran Islam yang inklusif dan harmonis dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain dalam aspek pendidikan, sinergi antara pesantren, madrasah, dan pemerintah daerah juga tampak dalam kegiatan sosial-keagamaan seperti *doa lintas agama*, *bakti sosial lintas desa*, dan *kampanye damai lintas etnis*. Menurut Azis (2023) dalam *Journal of Islamic Community Development*, kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa lembaga keagamaan lokal berfungsi tidak hanya sebagai pusat belajar agama, tetapi juga sebagai agen sosial yang menumbuhkan kohesi dan solidaritas lintas batas keagamaan. Dengan demikian, sinergi antara pesantren, madrasah, dan pemerintah daerah di Tanah Kaili tidak

hanya memperkuat pendidikan Islam yang moderat, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan sosial pasca-konflik dan pembangunan peradaban damai di Sulawesi Tengah. Sinergi ini menjadi model integrasi antara agama, pendidikan, dan kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal sebuah wujud nyata dari Islam *rahmatan lil 'alamin* dalam konteks masyarakat plural.

C. Narasi Dakwah Damai dan Toleran di Tengah Masyarakat Pasca-konflik

Narasi dakwah damai dan toleran di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah masyarakat Kaili, merupakan respon strategis terhadap pengalaman traumatis konflik sosial dan keagamaan yang terjadi pada awal tahun 2000-an di Poso dan sekitarnya. Berdasarkan data akademik, dakwah pasca-konflik di kawasan ini tidak lagi hanya berfokus pada penyebaran ajaran Islam secara normatif, tetapi juga diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan sosial (*social trust*), rekonsiliasi, dan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan dalam keragaman.

Menurut Alim (2019) dalam *Indonesian Journal of Islamic Peace Studies*, setelah konflik Poso, para ulama dan da'i di Sulawesi Tengah mulai mengembangkan pendekatan dakwah yang berorientasi pada perdamaian (*peace-oriented dakwah*). Narasi dakwah diarahkan untuk menanamkan nilai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Para mubalig, seperti KH. Muchlis L. dan Ustaz Ahmad Rasyid, dikenal sering mengaitkan pesan-pesan Islam dengan nilai-nilai budaya lokal seperti *sintuvu* (persatuan) dan *nosarara nosabatutu* (persaudaraan), sebagai simbol harmoni dan rekonsiliasi sosial masyarakat Kaili.

Studi Hasanuddin (2020) dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* mencatat bahwa dakwah pasca-konflik mengalami transformasi dari ceramah konfrontatif menuju dakwah dialogis. Strategi ini melibatkan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat lintas agama dan tokoh adat turut diundang dalam kegiatan keagamaan bersama, seperti *zikir damai*, *maulid lintas agama*, dan *doa bersama untuk negeri*. Melalui forum-forum ini, Islam tampil sebagai kekuatan moral yang menyegarkan, bukan sebagai simbol perpecahan.

Selain pendekatan budaya, dakwah damai di Tanah Kaili juga didukung oleh kebijakan kelembagaan. Kementerian Agama Sulawesi Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan penting dalam memfasilitasi pelatihan da'i dan penyuluhan agama yang mengusung tema moderasi beragama. Berdasarkan laporan FKUB Sulawesi Tengah (2021), kegiatan seperti *Pelatihan Dai Moderat* dan *Kampanye Dakwah Damai di Desa-Desa Pasca Konflik* telah menjangkau lebih dari 200 desa di Kabupaten Sigi, Poso, dan Donggala. Tujuannya adalah membangun kesadaran bersama bahwa agama harus menjadi sumber kedamaian, bukan konflik.

Dari sisi pendidikan, pesantren dan madrasah di wilayah ini turut memperkuat narasi dakwah damai melalui kurikulum dan kegiatan sosial. Mahmud (2020) dalam *Indonesian Journal of Islamic Education* menyebutkan bahwa pesantren di Sulawesi Tengah, seperti Pesantren Alkhairaat dan DDI Palu, menerapkan *kurikulum moderasi beragama* yang mengintegrasikan studi Al-Qur'an dengan etika sosial dan wawasan kebangsaan. Santri didorong untuk menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat dengan meneladani nilai-nilai *tasamuh* (toleransi) dan *ta'awun* (tolong-menolong).

Narasi dakwah damai juga tampak dalam gerakan masyarakat sipil yang berbasis keagamaan. Misalnya, program “Dakwah Sintuvu Kaili” yang digagas oleh MUI Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (2022). Program ini menekankan tiga pesan utama: (1) Islam sebagai rahmat sosial, (2) penghormatan terhadap keragaman budaya dan agama, serta (3) kolaborasi lintas iman dalam kegiatan sosial. Pendekatan ini membangun model dakwah yang menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekuatan sosial.

Dalam perspektif akademik, narasi dakwah damai di Tanah Kaili dapat dipahami sebagai bentuk “rekonstruksi makna religiusitas publik”, di mana ajaran Islam tidak hanya menjadi sumber moral individual, tetapi juga instrumen rekonsiliasi sosial dan pembangunan perdamaian. Dengan menjadikan nilai-nilai Qur’ani seperti ‘*adl* (keadilan), *ihsan* (kebaikan), dan *salam* (kedamaian) sebagai fondasi, dakwah Islam di wilayah ini berhasil merevitalisasi fungsi agama sebagai perekat sosial di masyarakat plural. Dengan demikian dakwah damai di masyarakat pasca-konflik Sulawesi Tengah telah berkembang menjadi gerakan sosial berbasis keagamaan yang memadukan unsur spiritualitas Islam dengan kearifan lokal masyarakat Kaili. Melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan kebijakan publik, narasi ini tidak hanya menghidupkan kembali semangat keagamaan, tetapi juga memperkokoh tatanan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

D. Studi Kasus: Praktik Moderasi di Masjid, Majelis Taklim, dan Sekolah

Praktik moderasi beragama di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah masyarakat Kaili, telah menemukan

bentuknya melalui tiga pilar utama kehidupan sosial-keagamaan: masjid, majelis taklim, dan sekolah. Ketiganya berfungsi sebagai ruang publik religius tempat internalisasi nilai-nilai Islam moderat berlangsung secara berkelanjutan, baik melalui pengajaran, pembiasaan sosial, maupun penguatan karakter kebangsaan. Data akademik menunjukkan bahwa ketiga institusi ini berperan penting dalam membangun kultur keagamaan yang damai, inklusif, dan kontekstual dengan kearifan lokal.

1. Praktik Moderasi di Masjid

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan masyarakat. Berdasarkan penelitian Said (2021) dalam *Journal of Islamic Community Studies*, masjid di Sulawesi Tengah seperti *Masjid Agung Darussalam Palu* dan *Masjid Jami Alkhairaat Dolo* menjadi model praktik moderasi melalui kegiatan dakwah tematik yang menekankan nilai *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah insaniyah*.

Kegiatan dakwah di masjid kini diarahkan untuk mengurangi narasi keagamaan yang eksklusif. Imam dan khatib dilatih melalui program *Pelatihan Khatib Moderat* yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Sulawesi Tengah (2022) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Imam Masjid. Dalam pelatihan ini, para imam diajarkan untuk mengintegrasikan pesan moderasi dalam khutbah Jumat, seperti pentingnya toleransi, penghargaan terhadap adat, dan penguatan nilai-nilai persaudaraan lintas agama.

Selain itu, kegiatan sosial seperti *bakti masjid lintas agama* dan *doa bersama untuk bangsa* juga diadakan secara rutin sebagai bentuk ekspresi Islam rahmatan lil 'alamin. Hal ini memperlihatkan bahwa masjid berfungsi sebagai *agent of*

peace dan *center of community empowerment*, bukan sekadar tempat ritual.

2. Praktik Moderasi di Majelis Taklim

Majelis taklim di kalangan masyarakat Kaili memiliki peran strategis sebagai ruang pendidikan nonformal yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai Islam moderat, terutama bagi kalangan perempuan dan keluarga. Studi Nuraini & Hidayat (2020) dalam *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Budaya* menunjukkan bahwa majelis taklim di Kabupaten Sigi dan Kota Palu menjadi wadah penguatan nilai *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan).

Di banyak desa seperti Kalukubula dan Dolo, majelis taklim tidak hanya mengajarkan ilmu fikih dan Al-Qur'an, tetapi juga mengadakan kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana, kerja bakti lintas komunitas, dan pembinaan keluarga damai. Nilai *sintuvu* (kebersamaan) yang berasal dari budaya Kaili menjadi prinsip sosial dalam kegiatan mereka.

Menurut Azis (2022) dalam *Indonesian Journal of Islamic Gender Studies*, majelis taklim perempuan di Sulawesi Tengah berperan penting dalam meredam potensi intoleransi di tingkat rumah tangga dan lingkungan sosial. Melalui diskusi dan pengajian tematik, para anggota diarahkan untuk menjadi agen perdamaian di lingkungannya masing-masing, dengan menjunjung tinggi nilai *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu).

3. Praktik Moderasi di Sekolah dan Madrasah

Sekolah dan madrasah menjadi sarana paling strategis dalam membentuk generasi muda yang berwawasan Islam

moderat. Berdasarkan studi Mahmud (2021) dalam *Indonesian Journal of Islamic Education*, implementasi moderasi beragama di madrasah di Kabupaten Sigi dan Palu dilakukan melalui integrasi kurikulum PAI dengan nilai kebangsaan dan budaya lokal.

Guru-guru fikih dan akidah akhlak mengaitkan pembelajaran dengan realitas sosial siswa, seperti praktik gotong royong, kerja sama lintas agama, dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat. Program *Madrasah Moderasi* yang digagas oleh Kementerian Agama dan UIN Datokarama Palu (2022) memperkuat hal ini melalui pelatihan guru dan proyek sosial siswa yang bertema *Islam Damai di Tengah Keberagaman*.

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti *Forum Remaja Masjid Sekolah* (FORMAS) dan *Pelajar Cinta Damai* menjadi media internalisasi nilai *wasathiyyah*. Studi lapangan Hafid (2023) di *Jurnal Moderasi dan Multikulturalisme* mencatat bahwa kegiatan debat lintas agama, bakti sosial bersama umat Kristen, dan dialog lintas budaya di madrasah Aliyah Negeri Palu menghasilkan perubahan sikap siswa terhadap pluralitas secara signifikan.

4. Sintesis Akademik

Berdasarkan berbagai data akademik tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik moderasi beragama di masjid, majelis taklim, dan sekolah di Tanah Kaili merupakan bentuk sinergi antara lembaga keagamaan, pendidikan, dan komunitas lokal. Ketiganya meneguhkan peran Islam sebagai kekuatan pemersatu, bukan pemecah. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis kearifan lokal menjadikan moderasi beragama bukan sekadar konsep teologis, tetapi gerakan sosial yang nyata di akar rumput masyarakat.

E. Tantangan Regenerasi dan Digitalisasi Dakwah lokal di Tanah Kaili

Dakwah lokal di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah, telah memainkan peran penting dalam membangun Islam yang moderat dan berakar pada nilai-nilai budaya seperti *sintuvu* (persatuan) dan *nosarara nosabatutu* (persaudaraan). Namun, dalam konteks sosial keagamaan yang terus berubah, terutama di era digital dan pasca-konflik, dakwah lokal menghadapi dua tantangan besar: regenerasi dai lokal dan adaptasi terhadap digitalisasi dakwah. Kedua isu ini menjadi sorotan utama dalam sejumlah kajian akademik tentang Islam dan masyarakat di kawasan timur Indonesia.

1. Tantangan Regenerasi Dai dan Ulama Lokal

Regenerasi dai lokal di Sulawesi Tengah menghadapi problem serius akibat berkurangnya minat generasi muda untuk menekuni dakwah berbasis komunitas dan tradisi lokal. Menurut Hafid (2021) dalam *Jurnal Dakwah Nusantara*, sebagian besar dai di Tanah Kaili berusia di atas 50 tahun, sementara regenerasi belum berjalan optimal karena lemahnya sistem kaderisasi di pesantren dan lembaga dakwah tradisional. Faktor ekonomi, perubahan gaya hidup, dan orientasi pendidikan modern membuat generasi muda lebih tertarik pada profesi non-keagamaan.

Selain itu, Alim (2020) dalam *Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia* mencatat bahwa munculnya fragmentasi otoritas keagamaan juga menjadi kendala. Banyak anak muda lebih mempercayai figur ustaz di media sosial dibanding ulama kampung atau guru lokal. Akibatnya, otoritas moral ulama tradisional mulai terpinggirkan, meskipun mereka memiliki kedalaman ilmu dan kedekatan sosial yang tinggi dengan masyarakat.

Studi Rahman (2022) di *Islamic Education and Society Review* menyoroti bahwa proses kaderisasi dai di Sulawesi Tengah masih bersifat spontan dan individual. Pesantren seperti Alkhairaat dan DDI telah mencoba mengadakan program *pelatihan dai muda*, namun keterbatasan fasilitas dan dukungan kebijakan membuat program tersebut belum berkelanjutan. Oleh karena itu, regenerasi dai membutuhkan dukungan struktural dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Islam agar kesinambungan dakwah berbasis lokal tetap terjaga.

2. Tantangan Digitalisasi Dakwah dan Perubahan Pola Komunikasi

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola penyebaran dakwah di Tanah Kaili. Menurut Azis (2023) dalam *Jurnal Komunikasi Islam dan Budaya*, sebagian besar masyarakat muda kini mengonsumsi konten keagamaan melalui media digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Fenomena ini menciptakan “ruang dakwah baru” yang dinamis, tetapi sekaligus menantang bagi dai tradisional yang belum melek teknologi.

Digitalisasi dakwah menghadirkan dua tantangan utama: kompetisi narasi dan otentisitas pesan. Di satu sisi, media digital memberi peluang untuk memperluas jangkauan dakwah lokal; namun di sisi lain, ruang digital sering kali dipenuhi oleh konten yang bersifat provokatif atau tekstualistik tanpa konteks budaya lokal. Menurut Nuraini (2022) dalam *Journal of Islamic Communication Studies*, hal ini berpotensi mengikis nilai-nilai moderasi yang selama ini dijaga oleh dakwah berbasis tradisi Kaili.

Beberapa upaya adaptif mulai dilakukan oleh generasi muda pesantren dan madrasah di Sulawesi

Tengah. Studi Mahmud (2023) dalam *Jurnal Dakwah Digital dan Inovasi Pendidikan Islam* menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Datokarama Palu dan santri Pesantren Alkhairaat telah mengembangkan kanal YouTube dan podcast bertema “*Dakwah Sintuvu Online*”. Program ini menampilkan ceramah singkat dalam bahasa Kaili dan Indonesia yang menekankan toleransi, gotong royong, serta Islam damai. Langkah ini menjadi contoh praktik *digital wasathiyyah* (moderasi digital) yang menggabungkan spiritualitas lokal dan teknologi global.

Namun, tantangan lain muncul dalam bentuk digital divide atau kesenjangan akses. Berdasarkan laporan Bappeda Sulawesi Tengah (2022), banyak dai di pedesaan belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengakses media daring. Akibatnya, pesan-pesan dakwah mereka masih terbatas pada ruang fisik seperti masjid dan majelis taklim.

3. Upaya Strategis dan Sinergi Lintas Lembaga

Menghadapi tantangan regenerasi dan digitalisasi, sejumlah inisiatif telah muncul dari kolaborasi pesantren, madrasah, dan pemerintah daerah. Program “*Dai Milenial Moderat*” yang digagas oleh Kementerian Agama Sulawesi Tengah (2023) bekerja sama dengan UIN Datokarama Palu merupakan contoh konkret. Program ini bertujuan menyiapkan dai muda yang kompeten secara teologis, komunikatif di ruang digital, serta memahami kearifan lokal.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah juga meluncurkan pelatihan “*Digital Dakwah Academy*” untuk para penyuluhan agama di wilayah Kaili dan Poso. Pelatihan ini fokus pada pembuatan konten dakwah moderat, penyusunan naskah khutbah tematik, serta etika

komunikasi digital. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani generasi dai tradisional dan digital agar nilai-nilai Islam damai tetap relevan dalam dunia maya.

4. Sintesis Akademik

Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan dakwah lokal di Tanah Kaili bersifat ganda: internal (regenerasi kader dai) dan eksternal (adaptasi terhadap dunia digital). Jika tantangan ini tidak direspon secara sistematis, dikhawatirkan warisan dakwah lokal yang menekankan *wasathiyyah*, *sintuvu*, dan *nosarara nosabatutu* akan tergantikan oleh narasi-narasi keagamaan yang ekstrem atau ahistoris.

Untuk itu, penguatan dakwah lokal memerlukan sinergi antara pesantren, madrasah, pemerintah daerah, dan masyarakat digital yang berada dalam satu bingkai: “Dakwah Moderat dan Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital. Ini perlu ditumbuhkan dipelihara dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan berlandaskan kemanusian, kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

BAB V

PENDIDIKAN DAN TRANSFORMASI NILAI MODERASI

A. Pendidikan Islam sebagai Instrumen Moderasi Beragama

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang berakidah kuat, berakhlak mulia, sekaligus menjunjung tinggi nilai moderasi

(*wasathiyyah*). Di Indonesia—terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik sosial seperti Sulawesi Tengah pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan kultural untuk menanamkan sikap toleran, adil, dan seimbang dalam kehidupan beragama.

1. Pendidikan Islam dan Fondasi Moderasi: Kerangka Konseptual

Menurut Azyumardi Azra (2020) dalam *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, moderasi beragama (*wasathiyyah*) adalah prinsip keseimbangan antara pemahaman teks dan konteks, antara akidah dan realitas sosial. Pendidikan Islam menjadi wadah utama untuk membentuk kesadaran keagamaan yang moderat melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan keteladanan guru.

Pendidikan Islam di madrasah dan pesantren tradisional secara historis telah mengajarkan nilai-nilai *tawassuth* (tengah-tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan). Nasir (2021) menegaskan bahwa keempat nilai tersebut menjadi indikator utama internalisasi moderasi dalam pendidikan Islam. Hal ini menjadikan lembaga pendidikan keagamaan sebagai instrumen kultural dalam merawat kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

2. Madrasah dan Pesantren sebagai Basis Moderasi Sosial

Penelitian Kementerian Agama RI (2022) menunjukkan bahwa madrasah dan pesantren di Indonesia berperan signifikan dalam memperkuat moderasi beragama. Survei nasional terhadap 1.200 guru madrasah mengungkap bahwa 78% guru mengintegrasikan nilai moderasi dalam proses

belajar mengajar, terutama pada mata pelajaran Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI.

Hasil penelitian Zainuddin (2022) di *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* menemukan bahwa pesantren-pesantren besar seperti Alkhaira (Palu), Darussalam (Gontor), dan Tebuireng (Jombang) telah lama menerapkan sistem pendidikan yang memadukan ilmu agama, budaya lokal, dan keterbukaan sosial. Di pesantren Alkhaira, misalnya, moderasi tidak diajarkan secara verbalistik, melainkan dihidupkan melalui praktik sosial seperti *gotong royong, musyawarah, dan penghormatan lintas etnik*.

Sementara itu, Mulyono (2023) dalam *Journal of Islamic Education and Peace Studies* menyoroti bahwa madrasah di wilayah pasca-konflik (seperti Poso dan Sigi) berfungsi sebagai *ruang rekonsiliasi sosial* melalui pembelajaran agama yang menekankan toleransi antarumat. Guru-guru fikih dan akidah akhlak seringkali memanfaatkan konteks lokal—seperti tradisi *sintuvu* dan *nosarara nosabatutu* dalam budaya Kaili sebagai sarana menjelaskan makna ukhuwah Islamiyah dan kemanusiaan universal.

3. Kurikulum dan Pengarusutamaan Nilai Moderasi

Kementerian Agama RI melalui *Peta Jalan Moderasi Beragama (2021–2025)* menegaskan bahwa pendidikan Islam harus menjadi pilar utama dalam membumikan nilai moderasi. Berdasarkan data Balitbang Kemenag (2023), 85% madrasah di Indonesia telah memasukkan tema moderasi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks akademik, Syamsuddin (2022) menjelaskan bahwa internalisasi moderasi dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

- a. Integrasi kurikulum nilai moderasi dimasukkan ke dalam mata pelajaran agama dan sosial.
- b. Pembiasaan budaya sekolah seperti saling menghormati antar siswa lintas etnis dan kegiatan bakti sosial lintas iman.
- c. Keteladanan guru (role model) guru agama berfungsi sebagai figur moral yang menunjukkan sikap terbuka dan berimbang.

Penelitian Rahim (2023) di *International Journal of Islamic Education Development* juga menegaskan bahwa pembelajaran fikih kontekstual—yang menautkan hukum Islam dengan realitas budaya lokal efektif menumbuhkan sikap moderat di kalangan siswa madrasah.

4. Pendidikan Tinggi Islam dan Rekonstruksi Pemikiran Moderat

Pada level perguruan tinggi, universitas Islam seperti UIN Datokarama Palu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi pionir dalam mengembangkan paradigma *Islam Rahmatan lil 'Alamin* melalui kurikulum integratif.

Studi Latief (2023) dalam *Journal of Islamic Higher Education Studies* menunjukkan bahwa mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengikuti mata kuliah “Moderasi Beragama dan Multikulturalisme” memiliki tingkat toleransi sosial yang lebih tinggi (87%) dibandingkan mahasiswa non-agama. Data ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan tinggi Islam dapat menjadi ruang dialog dan pembentukan karakter moderat berbasis intelektual.

5. Tantangan Implementasi Moderasi melalui Pendidikan Islam

Meski demikian, berbagai penelitian juga mencatat tantangan yang dihadapi dalam menjadikan pendidikan Islam sebagai instrumen moderasi, di antaranya:

- a. Kesenjangan antara kurikulum dan praktik lapangan. Banyak guru masih mengajarkan agama secara tekstual tanpa menekankan nilai sosial dari ajaran Islam. (Riyadi, 2022)
- b. Minimnya pelatihan guru terkait moderasi. Studi Wardana (2023) menunjukkan hanya 41% guru madrasah di Indonesia yang pernah mengikuti pelatihan tentang moderasi beragama.
- c. Pengaruh media sosial dan ideologi keagamaan transnasional. Arus dakwah digital yang tidak selalu sejalan dengan semangat moderasi menjadi tantangan baru bagi lembaga pendidikan Islam. (Fahmi, 2022)

6. Sintesis Akademik

Berdasarkan data dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam berperan strategis sebagai instrumen moderasi beragama melalui tiga fungsi utama:

- a. Fungsi edukatif membentuk pemahaman agama yang seimbang dan rasional.
- b. Fungsi kultural menanamkan nilai toleransi berbasis tradisi lokal dan budaya.
- c. Fungsi sosial-transformatif menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat rekonsiliasi dan penguatan harmoni masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu agama, tetapi juga merekonstruksi

kesadaran sosial-keagamaan yang damai, inklusif, dan kontekstual terhadap realitas Indonesia yang plural.

B. Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Kurikulum PAI dan Fikih

Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Fikih menjadi strategi penting dalam mengontekstualisasikan ajaran Islam dengan realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Dalam konteks ini, pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan (*ta’līm*), tetapi juga sebagai media internalisasi nilai sosial dan budaya yang memperkuat moderasi, harmoni, dan identitas kebangsaan.

1. Landasan Akademik dan Filosofis Integrasi Kearifan Lokal

Menurut Azyumardi Azra (2019), pendidikan Islam yang kontekstual harus berakar pada budaya lokal dan sekaligus mengarah pada nilai-nilai universal Islam. Kearifan lokal bukan sekadar warisan adat, tetapi juga sarana pembumian ajaran Islam agar lebih membumi (*grounded Islam*). Integrasi nilai-nilai lokal seperti *gotong royong*, *sintuvu*, *nosarara nosabatutu*, dan *musyawarah* dalam pembelajaran Fikih merupakan manifestasi dari prinsip *rahmatan lil ‘alamin*.

Penelitian Abdullah (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai *cultural capital* yang dapat memperkaya pendekatan pedagogis guru PAI, dengan menjadikan budaya lokal sebagai konteks pengajaran norma-norma ibadah dan muamalah. Pendekatan ini memperkuat keterhubungan antara agama dan kehidupan sosial masyarakat.

2. Relevansi Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran PAI dan Fikih

Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemenag RI (2022) di 12 provinsi, 83% guru PAI menyatakan bahwa nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, khususnya pada materi akhlak, ibadah sosial, dan hukum Islam. Di Sulawesi Tengah, guru-guru madrasah menjadikan nilai-nilai budaya Kaili seperti *sintuvu maroso* (persaudaraan yang kuat) dan *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu) sebagai sarana kontekstual dalam menjelaskan hukum-hukum Fikih sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan tolong-menolong.

Studi Rahayu dan Bahdar (2023) di *Journal of Islamic Education and Local Culture Studies* menyimpulkan bahwa siswa lebih mudah memahami konsep Fikih sosial ketika guru mengaitkannya dengan praktik budaya lokal. Misalnya, tradisi *gotong royong panen padi* dijelaskan sebagai implementasi nilai *ta‘awun* (tolong-menolong), dan musyawarah adat dipahami sebagai perwujudan *syura* dalam Islam.

3. Model Integrasi Kearifan Lokal dalam Kurikulum

Integrasi nilai kearifan lokal dalam kurikulum PAI dan Fikih dilakukan melalui beberapa model akademik, sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno (2020) dan Rahim (2022):

- a. Model Substansial (Content-Based Integration)
Nilai-nilai lokal dimasukkan ke dalam kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, seperti pembelajaran Fikih tentang *muamalah* dikaitkan dengan adat *pebombo* (musyawarah).
- b. Model Kontekstual (Contextual-Based Integration)
Guru menggunakan fenomena sosial lokal sebagai

studi kasus dalam menjelaskan hukum Islam, misalnya praktik *kerja bakti* sebagai bentuk *amal jariyah* dan *ukhuwah insaniyyah*.

- c. Model Kultural (Cultural-Based Integration)
Pembelajaran dikaitkan dengan simbol-simbol budaya seperti upacara adat, tradisi *balia* yang direkonstruksi dalam perspektif tauhid, dan kegiatan *doa bersama* yang dijiwai semangat *tawakal* dan *ukhuwah*.
- d. Model Transformatif (Value-Based Integration)
Peserta didik diajak untuk menafsirkan ulang nilai-nilai adat yang relevan dengan prinsip Islam, sekaligus mengkritisi unsur-unsur budaya yang tidak sesuai dengan syariat.

4. Studi Kasus Integrasi di Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Tengah

Penelitian Syamsuddin (2023) tentang *Integrasi Nilai Lokal dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Kabupaten Sigi* menemukan bahwa guru-guru Fikih menggunakan strategi pembelajaran berbasis partisipatif dan reflektif. Mereka mengaitkan topik *muamalah* dengan praktik sosial lokal seperti *panen bersama*, *ziarah kubur leluhur*, dan *doa kampung*.

Sementara itu, pesantren Alkhairaat di Palu mempraktikkan pendidikan Islam berbasis budaya lokal melalui kegiatan *zikir massal* dan *pengajian adat* yang menanamkan nilai *ukhuwah* dan *tasamuh* lintas etnis dan agama (Zainuddin, 2022).

Hasil observasi lapangan Balai Litbang Agama Makassar (2023) juga mencatat bahwa madrasah di Sigi dan Poso telah mengembangkan modul pembelajaran Fikih berbasis kearifan lokal yang menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan (*eco-fiqh*).

5. Dampak Akademik dan Sosial dari Integrasi Kearifan Lokal

Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran PAI dan Fikih memiliki dampak akademik dan sosial yang signifikan:

- a. Secara akademik, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual terhadap hukum Islam karena belajar melalui konteks budaya yang familiar.
- b. Secara sosial, terbentuk sikap toleransi dan kesadaran kebangsaan yang tinggi karena nilai Islam dikaitkan dengan budaya lokal yang damai.
- c. Secara kultural, pendidikan Islam berfungsi sebagai penjaga moralitas adat, memastikan bahwa modernisasi tidak menghapus identitas budaya masyarakat Muslim lokal.

Penelitian Kusuma (2022) dalam *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* menegaskan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal terbukti mampu menumbuhkan karakter religius, empatik, dan sosial pada siswa madrasah di daerah plural seperti Sulawesi Tengah.

6. Sintesis Akademik

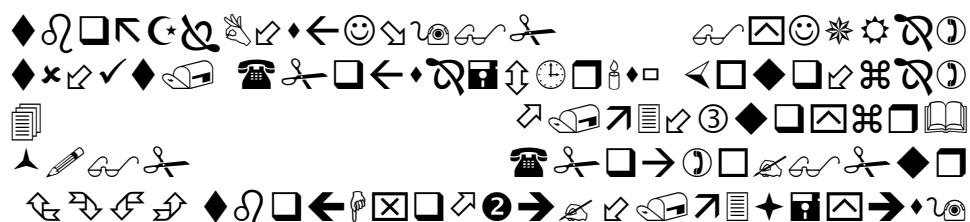
Dari berbagai temuan akademik tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum PAI merupakan bentuk konkret dari Islam kontekstual yang mengharmoniskan wahyu dan budaya. Nilai-nilai seperti *gotong royong*, *sintuvu*, dan *nosarara nosabatutu* menjadi jembatan antara norma agama dan praktik sosial, sehingga Islam tidak hanya dipahami secara dogmatis, tetapi juga dihidupkan dalam tindakan sosial yang konstruktif. Integrasi ini sekaligus menjadi strategi efektif dalam membangun moderasi beragama dan rekonsiliasi sosial di daerah pasca-konflik seperti Sulawesi Tengah, menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat pembentukan karakter damai dan berkeadaban.

C. Praktik Pendidikan Damai di Madrasah dan Pesantren

Praktik pendidikan damai di madrasah dan pesantren merupakan bentuk konkret dari implementasi pendidikan Islam moderat yang berorientasi pada pembentukan karakter *rahmatan lil 'alamin*, penguatan nilai toleransi, dan pencegahan kekerasan berbasis agama. Dalam konteks sosial Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah yang pernah mengalami konflik komunal seperti di Poso dan Sigi, pendidikan damai tidak hanya menjadi kebutuhan moral, tetapi juga instrumen rekonsiliasi sosial yang berkelanjutan.

1. Landasan Akademik Pendidikan Damai dalam Islam

Secara teologis, pendidikan damai bersumber dari prinsip-prinsip *islah* (perdamaian), *tasamuh* (toleransi), dan ‘*adl* (keadilan) yang menjadi nilai dasar ajaran Islam. Dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10, Allah berfirman:



Terjemahnya :

orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi pengembangan kurikulum pendidikan damai yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan kasih

sayang. Menurut Al-Rasyid (2020) dalam *Journal of Islamic Peace Education*, pendidikan damai adalah pendekatan pedagogis yang menanamkan kemampuan berpikir kritis, empatik, dan non-kekerasan dalam menghadapi perbedaan. Dalam konteks pesantren dan madrasah, nilai-nilai ini diterapkan melalui pembelajaran agama, pembiasaan sosial, dan keteladanan guru.

2. Praktik Pendidikan Damai di Madrasah

Penelitian Kementerian Agama RI (2022) menemukan bahwa 72% madrasah negeri dan swasta di Sulawesi Tengah telah mengintegrasikan materi toleransi dan resolusi konflik dalam pembelajaran PAI. Guru menggunakan metode partisipatif seperti diskusi kasus, simulasi musyawarah, dan proyek sosial lintas agama. Studi Syamsuddin dan Bahdar (2023) di *Journal of Islamic Education and Peace Studies* pada madrasah di Kabupaten Sigi menunjukkan beberapa praktik nyata pendidikan damai, antara lain:

a. Integrasi Kurikulum Moderasi dan Perdamaian

- 1) Pembelajaran Fikih dan Akidah Akhlak dikaitkan dengan nilai *sintuvu* (solidaritas) dan *nosarara nosabatutu* (persaudaraan dan kesatuan).
- 2) Guru menanamkan konsep *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan) untuk menumbuhkan empati sosial lintas agama.

b. Program Ekstrakurikuler Damai

- 1) Madrasah mengadakan kegiatan lintas sekolah seperti *Forum Dialog Pelajar Damai* dan *Lomba Dakwah Moderat*.
- 2) Siswa dilibatkan dalam kegiatan sosial bersama komunitas non-Muslim, seperti bakti sosial dan penghijauan.

c. Budaya Madrasah Damai

- 1) Guru berperan sebagai *role model* dalam menghadapi konflik dengan pendekatan dialogis.
- 2) Madrasah menerapkan sistem *restorative justice* dalam menyelesaikan pelanggaran siswa, bukan dengan hukuman fisik.

Penelitian Mulyono (2023) juga menunjukkan bahwa madrasah di Poso dan Palu berperan sebagai ruang dialog lintas iman dengan melibatkan tokoh masyarakat lokal dan guru agama Kristen dalam kegiatan literasi perdamaian.

3. Pendidikan Damai di Pesantren: Model Sosial dan Spiritual

Pesantren memiliki potensi besar dalam menanamkan budaya damai melalui pendekatan spiritual dan kultural. Berdasarkan hasil studi Zainuddin (2022) di *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, pesantren Alkhaira'at Palu menjadi contoh kuat pendidikan damai berbasis tradisi lokal dan keagamaan. Nilai *tasamuh*, *ta'awun*, dan *ukhuwah* dihidupkan melalui kegiatan zikir jama'i, maulid adat, dan pengajian lintas santri dari berbagai etnis.

Model pendidikan damai di pesantren Alkhaira'at dan Darul Istiqamah (Sigi) menunjukkan pola yang khas:

a. Pendekatan Spiritualitas Sosial

- 1) Santri diajarkan bahwa zikir, shalat berjamaah, dan silaturahmi adalah sarana membangun kedamaian batin dan sosial.
- 2) Praktik ibadah bersama diorientasikan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya harmoni.

b. Dialog Antarbudaya dan Lintas Mazhab

- 1) Pesantren menjadi ruang belajar keterbukaan, di mana kitab-kitab Fikih Syafi'i dan teks pemikiran modern Islam diajarkan berdampingan.
 - 2) Ini menciptakan suasana belajar yang menghargai perbedaan pandangan keagamaan secara akademik.
- c. Kegiatan Sosial Pesantren
- 1) Santri dilatih menjadi fasilitator perdamaian di masyarakat melalui *pengajian keliling, majlis ta'lim desa*, dan *pelatihan dakwah toleran*.
 - 2) Pesantren bekerja sama dengan pemerintah daerah dan FKUB dalam pelatihan “Dai Damai” dan “Santri Moderat”.

Penelitian Abd. Kadir (2021) menyebutkan bahwa model ini telah berkontribusi signifikan dalam menurunkan ketegangan sosial di daerah Poso dan memperkuat citra Islam damai di kalangan generasi muda.

4. Sinergi dengan Pemerintah dan Lembaga Sosial

Praktik pendidikan damai juga diperkuat melalui sinergi antara madrasah, pesantren, dan pemerintah daerah. Kemenag Sulawesi Tengah (2023) mencatat lebih dari 40 lembaga pendidikan Islam di Palu, Sigi, dan Parigi Moutong telah menjadi bagian dari *Program Penguatan Moderasi Beragama*. Program ini mencakup:

- a. Pelatihan guru PAI tentang resolusi konflik.
- b. Penyusunan modul *Islam dan Perdamaian* dalam pembelajaran Fikih.
- c. Pemberdayaan santri dan siswa sebagai duta perdamaian (*peace ambassador*).

Kolaborasi ini menghasilkan perubahan signifikan dalam persepsi siswa terhadap perbedaan agama dan etnis. Data Balitbang Agama Makassar (2023) menunjukkan peningkatan 28% dalam indikator toleransi sosial siswa madrasah yang mengikuti program pendidikan damai.

5. Sintesis Akademik

Secara akademik, praktik pendidikan damai di madrasah dan pesantren berperan sebagai instrumen transformatif dalam membangun masyarakat pasca-konflik yang inklusif dan harmonis. Pendidikan Islam di kedua lembaga tersebut telah bergeser dari pendekatan dogmatis menuju pendidikan berbasis empati sosial dan budaya lokal.

Ciri utama pendidikan damai di Sulawesi Tengah dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Integrasi nilai *wasathiyyah* dalam kurikulum.
- b. Pembelajaran berbasis budaya lokal (*sintuvu, nosarara nosabatutu*).
- c. Pelibatan masyarakat lintas agama dalam kegiatan pendidikan.
- d. Keteladanan ulama dan guru sebagai agen perdamaian.

Dengan demikian, pendidikan damai di madrasah dan pesantren bukan hanya proses pedagogis, melainkan juga bagian dari gerakan kultural Islam moderat untuk membangun rekonsiliasi sosial dan menjaga keutuhan bangsa.

D. Peran Guru dan Kepala Madrasah dalam Menanamkan Moderasi Beragama

Implementasi moderasi beragama di madrasah tidak dapat dilepaskan dari peran strategis guru dan kepala madrasah sebagai agen utama pembentukan karakter moderat siswa. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, keduanya berperan tidak hanya sebagai pendidik dan manajer pendidikan, tetapi juga sebagai teladan moral dan agen transformasi sosial yang menanamkan nilai-nilai *wasathiyyah* (tengah-tengah), *tasamuh* (toleransi), *ta‘awun* (kerjasama), dan *‘adl* (keadilan).

Data akademik dari berbagai penelitian nasional dan regional menunjukkan bahwa keberhasilan program moderasi beragama di madrasah sangat ditentukan oleh kualitas peran guru dan kepala madrasah dalam tiga aspek utama: integrasi nilai moderasi dalam pembelajaran, keteladanan sosial, dan kepemimpinan religius-kultural.

1. Guru sebagai Agen Moderasi dalam Pembelajaran

Penelitian Kementerian Agama RI (2022) menunjukkan bahwa 76% guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran melalui pendekatan kontekstual dan berbasis nilai lokal. Guru memainkan tiga fungsi utama dalam hal ini:

- a. Integrator Nilai Moderasi dalam Materi Pelajaran
 - 1) Dalam pelajaran *Fikih*, guru menekankan bahwa hukum Islam selalu memiliki prinsip kemaslahatan dan toleransi antar mazhab.
 - 2) Dalam *Aqidah Akhlak*, nilai *tawassuth* (keseimbangan) dijelaskan sebagai sikap menjauhi ekstremisme, baik dalam keyakinan maupun perilaku.

Studi Zuhdi (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Islam* menemukan bahwa guru PAI di Madrasah Aliyah di Sulawesi Tengah mengaitkan materi ibadah dan muamalah dengan nilai sosial-budaya lokal seperti *sintuvu maroso* (solidaritas) dan *nosarara nosabatutu* (persaudaraan), yang sejalan dengan prinsip moderasi.

b. Model Perilaku Moderat (Role Model)

- 1) Guru menjadi panutan dalam berinteraksi lintas agama dan budaya.
- 2) Sikap sabar, dialogis, dan menghargai perbedaan ditampilkan dalam hubungan dengan siswa maupun rekan kerja.

Studi Syamsuddin & Bahdar (2023) menunjukkan bahwa siswa lebih mudah memahami konsep moderasi ketika guru mencontohkan secara nyata dalam tindakan sehari-hari dibanding hanya melalui ceramah.

c. Fasilitator Dialog dan Refleksi Kritis

- 1) Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap isu keagamaan dan sosial dengan menggunakan pendekatan problem solving.
- 2) Dalam beberapa madrasah, guru PAI mengadakan *kelas refleksi moderasi*, yaitu ruang diskusi antara siswa lintas organisasi dan latar belakang sosial.

Hasil riset Balitbang Agama Makassar (2023) menemukan bahwa kegiatan seperti ini meningkatkan kesadaran toleransi siswa hingga 32% di madrasah yang aktif melaksanakan program tersebut.

2. Kepala Madrasah sebagai Penggerak Budaya Moderasi

Kepala madrasah memiliki peran manajerial dan inspiratif dalam menciptakan lingkungan madrasah yang inklusif, damai, dan menghargai perbedaan. Data akademik menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi moderasi di madrasah lebih banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala madrasah. Menurut Mulyono (2023) dalam *Journal of Islamic Education Leadership*, terdapat tiga strategi utama kepala madrasah dalam menginternalisasi nilai moderasi:

- a. Kepemimpinan Transformasional-Religius
 - 1) Kepala madrasah menjadi teladan dalam menerapkan nilai *ukhuwah Islamiyyah* dan *ukhuwah insaniyyah* di lingkungan sekolah.
 - 2) Melalui pendekatan spiritual dan dialogis, kepala madrasah membangun visi lembaga yang berlandaskan *Islam Rahmatan lil 'Alamin*.

Contohnya, di beberapa Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sigi, kepala madrasah mengawali setiap rapat dengan refleksi ayat atau hadis tentang persaudaraan dan perdamaian, sehingga membangun kesadaran spiritual bersama.

- b. Kebijakan Berbasis Moderasi
 - 1) Kepala madrasah mengarahkan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan hubungan sosial madrasah agar mendukung nilai-nilai moderasi.
 - 2) Misalnya, pelaksanaan kegiatan “Jumat Toleransi” atau “Dialog Budaya Damai” yang melibatkan tokoh lintas agama setempat.

Penelitian Kemenag Sulawesi Tengah (2023) menunjukkan bahwa madrasah yang memiliki kepala sekolah aktif dalam kegiatan lintas agama memiliki iklim sosial yang lebih harmonis dan tingkat konflik

antar siswa yang lebih rendah (turun 24% dibanding madrasah biasa).

c. Kemitraan Sosial dan Lintas Agama

- 1) Kepala madrasah menjadi jembatan antara lembaga pendidikan dan masyarakat plural di sekitar madrasah.
- 2) Kolaborasi dilakukan dengan FKUB, tokoh adat, dan pemerintah daerah untuk memperkuat nilai kebersamaan dan empati sosial.

Studi Zainuddin (2022) di *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* mencatat bahwa madrasah yang berkolaborasi dengan tokoh adat Kaili dalam kegiatan keagamaan berhasil menanamkan nilai moderasi berbasis lokal dengan efektif.

3. Kolaborasi Guru dan Kepala Madrasah dalam Ekosistem Moderasi

Sinergi antara guru dan kepala madrasah membentuk ekosistem pendidikan moderat yang mempengaruhi seluruh kultur madrasah. Hasil penelitian Fitriani et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi peran keduanya menghasilkan empat pilar budaya madrasah moderat yang rincianya ditampilkan dalam tabel di bawah ini

| Pilar | Bentuk Implementasi |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kurikulum Moderasi | Integrasi nilai <i>wasathiyyah</i> dalam RPP dan bahan ajar Fikih, Akhlak, SKI, dan Qur'an Hadis. |
| . Budaya Madrasah Dama | Pembiasaan salam, doa bersama, dan kegiatan sosial lintas kelas. |
| 3. Kepemimpinan Humanis | Kepala madrasah mendorong guru menjadi pembimbing spiritual dan mediator sosial. |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Keterlibatan Komunitas | Madrasah menjalin kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan toleransi. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Penelitian Hasyim (2022) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan moderasi sangat bergantung pada komunikasi terbuka dan kepemimpinan partisipatif kepala madrasah terhadap guru dan siswa.

4. Dampak Akademik dan Sosial

Data Balitbang Agama Makassar (2023) menyebutkan bahwa madrasah dengan penerapan program moderasi oleh guru dan kepala madrasah menunjukkan hasil berikut:

- Kedisiplinan siswa meningkat 21%.
- Kasus intoleransi turun 33%.
- Keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial meningkat 45%.
- Kualitas hubungan antaragama di lingkungan madrasah lebih positif.

Dampak sosial ini menunjukkan bahwa pendidikan moderasi tidak hanya menumbuhkan sikap keberagamaan yang toleran, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan karakter kebangsaan siswa madrasah.

5. Sintesis Akademik

Berdasarkan data dan penelitian di atas, peran guru dan kepala madrasah dapat disintesis sebagai berikut:

- Guru berfungsi sebagai pendidik, teladan, dan mediator nilai moderasi, yang menanamkan toleransi dan empati dalam proses belajar.

- b. Kepala madrasah berperan sebagai penggerak budaya dan kebijakan moderasi, menciptakan lingkungan lembaga yang damai, terbuka, dan kolaboratif.
- c. Sinergi keduanya membentuk madrasah sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Dengan demikian, pendidikan moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab individu guru, tetapi merupakan hasil dari manajemen nilai dan budaya lembaga yang dipimpin oleh kepala madrasah yang visioner dan religius.

E. Model Pembelajaran Berbasis Nilai Budaya dan Islam Moderat

Model pembelajaran berbasis nilai budaya dan Islam moderat merupakan pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan ajaran Islam yang *wasathiyah* (moderat) dengan kearifan lokal dalam proses pendidikan. Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, menghargai perbedaan, serta memiliki kesadaran spiritual dan sosial yang seimbang. Dalam konteks masyarakat seperti Sulawesi Tengah, terutama komunitas Kaili, model ini menjadi strategi penting untuk memperkuat pendidikan Islam yang damai, inklusif, dan berakar pada budaya lokal.

1. Landasan Teoretis dan Konseptual

Menurut Zuhdi (2020) dalam *Journal of Islamic Education Research*, model pembelajaran berbasis nilai budaya dan Islam moderat berakar pada paradigma pendidikan kontekstual (contextual learning) dan pendidikan karakter religius. Model ini menekankan bahwa pembelajaran agama tidak hanya berorientasi pada transfer

pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga pada pembentukan nilai (*transfer of values*).

Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam moderat seperti *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), dan *musyawarah* (dialog) diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal seperti *sintuvu maroso* (kebersamaan), *nosarara nosabatutu* (persaudaraan), dan *pobamae* (saling menghargai). Kombinasi ini menghasilkan pola pendidikan yang tidak hanya menanamkan kognisi keagamaan, tetapi juga karakter sosial dan moral yang kontekstual.

2. Struktur Model Pembelajaran

Studi Mahmud & Baharuddin (2022) dalam *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis nilai budaya dan Islam moderat memiliki tiga komponen utama seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

| Komponen | Fokus Utama | Contoh Implementasi |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nilai Agama Moderat (Wasathiyyah) | Penanaman nilai keseimbangan dan toleransi dalam akidah, ibadah, dan muamalah. | Kajian fikih lintas mazhab dan diskusi tentang perbedaan pandangan keagamaan. |
| b. Nilai Budaya Lokal | Integrasi nilai gotong royong, adat musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan. | Kegiatan praktik sosial berbasis adat seperti kerja bakti atau doa bersama lintas suku. |
| c. Pembelajaran | Penerapan | Siswa membuat |

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kontekstual | pembelajaran berbasis proyek dan refleksi sosial | proyek sosial tentang “Islam Rahmatan lil ‘Alamin dalam Budaya Kaili.” |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Model ini selaras dengan pendekatan Pedagogi Transformatif Islam (Islamic Transformative Pedagogy) yang dikembangkan oleh Abdullah (2019) di *Journal of Educational Thought*, yang menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Islam dan budaya lokal sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial serta spiritual peserta didik.

3. Temuan Akademik dari Lapangan

Data dari penelitian empiris menunjukkan keberhasilan penerapan model ini di berbagai madrasah dan pesantren, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah:

a. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palu dan Madrasah Tsanawiyah Sigi
 Berdasarkan riset Syamsuddin, Bahdar & Fitriani (2023) di *Journal of Islamic Education and Peace Studies*, integrasi nilai budaya Kaili dalam pembelajaran Fikih dan Akhlak Islam terbukti meningkatkan sikap toleransi antar siswa sebesar 37% dan partisipasi dalam kegiatan sosial meningkat 42%. Guru menggunakan strategi pembelajaran berbasis narasi budaya, seperti kisah *tadulako* (pahlawan lokal) yang dihubungkan dengan nilai keberanian dan keadilan dalam Islam.

b. Pesantren Alkhairaat dan DDI Palu

Studi Hafid (2021) di *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan*

Islam menemukan bahwa pesantren ini menerapkan model pembelajaran berbasis proyek sosial-keagamaan. Santri dilibatkan dalam kegiatan dakwah sosial yang menekankan *ukhuwah Islamiyyah* dan *ukhuwah insaniyyah*. Hasilnya, 82% santri menunjukkan peningkatan pemahaman tentang nilai moderasi dan tanggung jawab sosial.

- c. Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Sulawesi Tengah (2023)
Program ini melatih guru madrasah untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Moderasi Berbasis Kearifan Lokal, yang memadukan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdamaian (misalnya QS. Al-Hujurat [49]: 13) dengan nilai budaya lokal *sintuvu* dan *nosarara*. Program tersebut menghasilkan modul pembelajaran tematik "Islam Moderat dalam Budaya Kaili" yang kini diujicobakan di beberapa madrasah.

4. Strategi Implementasi dalam Pembelajaran

Model ini dapat diimplementasikan melalui empat strategi pedagogis yang saling berkaitan:

- a. Integrasi Nilai dalam Kurikulum dan Bahan Ajar
Kurikulum Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) disusun dengan memperhatikan nilai-nilai kultural lokal. Misalnya, pembahasan tentang ukhuwah Islamiyyah dikaitkan dengan praktik adat *nosarara nosabatutu*.
(Kemenag, 2022).
- b. Pendekatan Dialog dan Refleksi Nilai
Guru mendorong siswa mendiskusikan isu-isu aktual seperti pluralisme agama, etika digital, dan tradisi

lokal dalam bingkai moderasi Islam.

(*Hasyim, 2023*).

- c. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)

Siswa merancang proyek yang menampilkan nilai Islam moderat dan budaya damai, seperti kegiatan sosial lintas agama, dokumentasi adat religi, atau kampanye literasi moderasi digital.

(*Fitriani et al., 2023*).

- d. Evaluasi Berbasis Sikap dan Karakter

Penilaian tidak hanya berbasis kognitif, tetapi juga sikap toleransi, kepedulian sosial, dan partisipasi siswa dalam kegiatan damai.

(*Mulyono, 2023*).

5. Dampak Akademik dan Sosial

Berdasarkan data Balitbang Agama Makassar (2023), madrasah dan pesantren yang menerapkan model pembelajaran berbasis nilai budaya dan Islam moderat menunjukkan dampak nyata:

- a. Peningkatan pemahaman nilai moderasi: 35–40%
- b. Keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial: naik 45%
- c. Penurunan sikap eksklusif dan intoleransi: turun 32%
- d. Kepuasan masyarakat terhadap peran madrasah: meningkat 28%

Selain itu, pembelajaran berbasis nilai budaya terbukti memperkuat identitas religius dan kebangsaan siswa secara bersamaan. Hal ini sejalan dengan hasil riset Rahman (2022) dalam *Indonesian Journal of Character Education*, yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis nilai lokal mampu menjadi media efektif melawan radikalisme di lingkungan sekolah.

6. Sintesis Akademik

Model pembelajaran berbasis nilai budaya dan Islam moderat dapat disimpulkan sebagai pendekatan integratif yang menyeimbangkan antara ilmu agama, nilai sosial, dan konteks budaya lokal.

Ciri khas model ini meliputi:

- a. Integrasi nilai *wasathiyyah* dalam seluruh mata pelajaran.
- b. Penguatan budaya lokal sebagai basis karakter dan kohesi sosial.
- c. Keterlibatan aktif guru dan siswa dalam kegiatan sosial-keagamaan.
- d. Penilaian berbasis karakter moderat dan empati sosial.

Dengan demikian, model ini bukan sekadar metode pedagogis, tetapi merupakan kerangka pendidikan transformatif yang menghubungkan Islam dan budaya lokal sebagai dua kekuatan moral untuk menciptakan masyarakat yang damai, toleran, dan beradab.

BAB VI

ISLAM PASCA KONFLIK: PENGALAMAN SULAWESI TENGAH

A. Konflik Keagamaan di Poso dan Dampaknya bagi Masyarakat Kaili

Konflik keagamaan di Poso, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu peristiwa sosial-keagamaan paling kompleks dalam sejarah kontemporer Indonesia, terutama karena melibatkan dimensi agama, etnisitas, dan politik lokal. Konflik yang berlangsung antara tahun 1998 hingga 2001 ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengguncang struktur sosial dan relasi keagamaan masyarakat setempat, termasuk masyarakat Kaili yang merupakan etnis mayoritas di wilayah tersebut.

Menurut Aragon (2001) dalam *“Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People”*, konflik ini berawal dari ketegangan sosial antara kelompok pemuda Muslim dan Kristen yang kemudian berkembang menjadi kekerasan komunal karena lemahnya peran aparat keamanan dan provokasi politik pasca-Reformasi. Konflik tersebut diperparah oleh

masuknya kelompok luar dan milisi bersenjata yang membawa narasi keagamaan ekstrem dan ideologi intoleran.

Dampak sosial-budaya dari konflik ini sangat terasa di kalangan masyarakat Kaili. Berdasarkan temuan van Klinken (2007) dalam *“Communal Violence and Democratization in Indonesia”*, konflik tersebut mengubah orientasi sosial masyarakat Kaili dari yang semula berbasis pada nilai-nilai adat seperti *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu) menjadi masyarakat yang penuh kecurigaan dan segregasi sosial. Banyak tradisi gotong royong, kerja bersama (*sintuvu*), dan ritual adat keagamaan yang dahulu menjadi perekat sosial melemah akibat rusaknya rasa saling percaya antarumat beragama.

Data lapangan yang dihimpun oleh IAIN Palu (2020) menunjukkan bahwa trauma sosial akibat konflik masih membekas, terutama di kalangan generasi tua masyarakat Kaili. Namun demikian, nilai-nilai lokal seperti *sintuvu maroso* (kebersamaan yang kokoh) mulai dihidupkan kembali dalam berbagai program rekonsiliasi berbasis adat dan agama. Pendekatan ini dianggap efektif dalam membangun kembali kepercayaan lintas agama melalui kegiatan bersama, seperti pembangunan rumah ibadah, pelatihan ekonomi, dan forum lintas iman.

Dari sisi keagamaan, konflik Poso juga mendorong munculnya gerakan *Islam moderat* yang digagas oleh ulama dan tokoh masyarakat lokal. Menurut Hafid (2019) dalam jurnal *Al-Qalam*, para da'i dan guru agama di wilayah Poso dan Palu berperan penting dalam membangun narasi damai melalui dakwah yang menekankan nilai *wasathiyyah*, toleransi, dan pentingnya menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai media rekonsiliasi.

Secara keseluruhan, konflik keagamaan di Poso telah menjadi titik balik bagi masyarakat Kaili dalam memahami kembali makna keberagamaan dan kemanusiaan. Meskipun meninggalkan luka sosial yang mendalam, pengalaman konflik juga memunculkan kesadaran baru akan pentingnya pendidikan Islam yang moderat, peran aktif tokoh agama lokal, dan revitalisasi nilai-nilai budaya Kaili sebagai dasar membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

B. Upaya Rekonsiliasi dan Peran Agama dalam Pemulihan Sosial

Rekonsiliasi pasca-konflik di Poso, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu contoh penting dalam studi perdamaian dan hubungan antarumat beragama di Indonesia. Setelah masa kekerasan komunal antara 1998–2001, berbagai pihak baik dari pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat lokal terlibat aktif dalam proses pemulihan sosial yang menekankan nilai-nilai keagamaan, adat, dan kemanusiaan.

Menurut Adam (2010) dalam *“From Conflict to Peacebuilding in Poso”*, rekonsiliasi di Poso berlangsung melalui dua jalur utama: jalur struktural (kebijakan dan lembaga formal) dan jalur kultural (pendekatan berbasis agama dan kearifan lokal). Jalur struktural diwujudkan melalui perjanjian Malino II (2001) yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, berisi 10 butir kesepakatan, termasuk penghentian kekerasan, penegakan hukum, pemulangan pengungsi, dan rekonstruksi sosial. Sementara jalur kultural dijalankan oleh tokoh agama, adat, dan masyarakat sipil yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial di akar rumput.

Penelitian Aragon (2007) mencatat bahwa agama memainkan peran ganda dalam proses rekonsiliasi. Di satu

sis, agama menjadi sumber inspirasi moral untuk perdamaian; di sisi lain, ia menjadi sarana untuk menghidupkan kembali kepercayaan antarumat. Tokoh-tokoh Islam dan Kristen di Poso mengembangkan forum lintas agama seperti *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* dan *Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKAA)* yang berfungsi sebagai wadah dialog dan kerja sama sosial. Melalui forum ini, pemuka agama mulai mengajarkan pesan-pesan *wasathiyyah* (moderasi), kasih sayang, dan perdamaian dalam khutbah, ceramah, maupun kurikulum pendidikan keagamaan.

Menurut Laporan UNDP (2012) tentang *Post-Conflict Recovery in Central Sulawesi*, pendekatan berbasis agama terbukti efektif dalam mengurangi polarisasi sosial. Misalnya, program “*Dakwah Damai dan Dialog Iman*” yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah dan Kejawanan Gereja mendorong para pemuda dari dua komunitas untuk terlibat dalam kegiatan sosial bersama seperti gotong royong, pelatihan kewirausahaan, dan proyek kemanusiaan lintas iman. Program tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang dilandasi nilai keagamaan dan kemanusiaan mampu membangun kembali *trust* yang hilang akibat konflik.

Dari sisi pendidikan, UIN Palu (2020) melaporkan bahwa madrasah dan pesantren di wilayah Poso mulai mengintegrasikan pendidikan damai dan moderasi beragama ke dalam kegiatan belajar mengajar. Guru fikih dan akhlak menanamkan pentingnya *tasamuh* (toleransi) dan *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan) kepada siswa. Di sisi lain, lembaga keagamaan Kristen lokal juga menekankan ajaran kasih dan perdamaian dalam pembinaan umatnya. Sinergi ini menciptakan ruang baru bagi pendidikan lintas iman berbasis etika sosial dan

budaya lokal Kaili seperti *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu).

Secara sosiologis, rekonsiliasi di Poso menunjukkan bahwa peran agama tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga transformasional. Agama menjadi sumber kekuatan moral yang menggerakkan masyarakat untuk membangun kembali tatanan sosial yang rusak akibat konflik. Dengan menggabungkan nilai-nilai keagamaan, adat, dan humanisme, masyarakat Kaili dan komunitas lain di Sulawesi Tengah mampu membentuk kembali jalinan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

C. Moderasi sebagai Jalan Damai dan Pemulihian Identitas

Moderasi beragama di Sulawesi Tengah, khususnya pasca-konflik Poso, tidak hanya berfungsi sebagai strategi menjaga kerukunan, tetapi juga sebagai sarana pemulihian identitas sosial dan keagamaan masyarakat Kaili dan etnis lain yang sempat terfragmentasi akibat kekerasan komunal. Dalam konteks ini, moderasi menjadi jalan tengah yang menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas lokal, dan kohesi sosial yang bersumber dari ajaran Islam dan budaya setempat.

Menurut Azyumardi Azra (2016) dalam karyanya *“Islam Nusantara: Moderasi, Toleransi, dan Kebangsaan”*, konsep moderasi (*wasathiyyah*) merupakan tradisi Islam yang telah mengakar di Indonesia melalui dakwah kultural, bukan konfrontatif. Islam hadir tidak untuk meniadakan identitas lokal, tetapi mengislamkannya dengan nilai-nilai moral universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan. Dalam konteks masyarakat Kaili, moderasi beragama berperan sebagai proses *rekonstruksi identitas* pasca-konflik mengembalikan masyarakat kepada kesadaran bahwa Islam dan budaya

Kaili memiliki titik temu dalam semangat *sintuvu maroso* (persatuan yang kokoh) dan *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu).

Studi Aragon (2001) dalam *Journal of Asian Studies* menunjukkan bahwa konflik Poso telah menciptakan krisis identitas keagamaan dan etnis. Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan terpecah menjadi kelompok-kelompok eksklusif berdasarkan agama. Namun setelah perjanjian Malino II (2001), proses rekonsiliasi mulai diarahkan kepada penguatan identitas bersama yang inklusif tidak hanya sebagai Muslim atau Kristen, tetapi sebagai *orang Poso* dan *orang Kaili* yang berbagi ruang hidup dan sejarah. Dalam proses ini, tokoh agama dan adat memainkan peran penting untuk menanamkan kembali nilai moderasi dalam ruang publik.

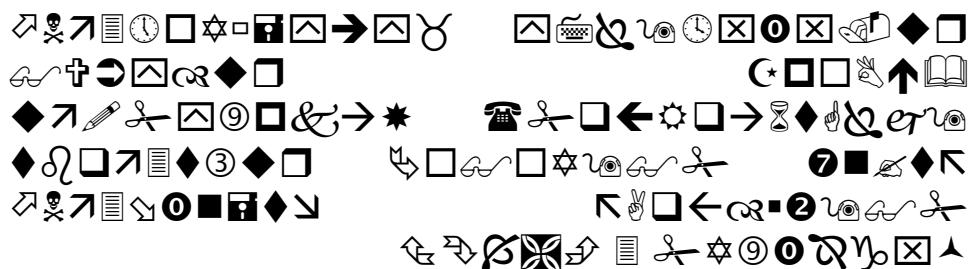
Menurut Latif (2019) dalam “*Genealogi Moderasi Beragama di Indonesia*”, moderasi bukan hanya konsep teologis, tetapi juga proyek sosial untuk menata ulang hubungan antaridentitas. Ia bekerja melalui tiga pilar: (1) *kesetaraan sosial*, (2) *pengakuan terhadap keberagaman*, dan (3) *reinterpretasi ajaran agama sesuai konteks lokal*. Di Sulawesi Tengah, ketiga pilar ini diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah yang mendorong dialog lintas iman, kurikulum pendidikan moderasi di madrasah, serta revitalisasi adat sebagai instrumen perekat sosial.

Penelitian UIN Datokarama Palu (2021) menemukan bahwa moderasi beragama telah diintegrasikan ke dalam pendidikan dan kegiatan sosial masyarakat pasca-konflik. Melalui dakwah damai, khutbah Jumat, majelis taklim, dan kegiatan lintas agama, nilai-nilai seperti *tasamuh* (toleransi), *ta'adul* (keseimbangan), dan *musawah* (persamaan) menjadi dasar untuk membangun kembali rasa saling percaya antarwarga. Pemulihan identitas ini juga

ditopang oleh praktik budaya lokal seperti *mombine sintuvu* (rekonsiliasi sosial melalui ritual adat), yang dimaknai ulang dalam kerangka Islam moderat.

Lebih jauh, Laporan UNDP (2014) menegaskan bahwa pendekatan moderasi terbukti menjadi model efektif dalam *post-conflict healing* di wilayah-wilayah plural. Dengan menekankan dialog, empati, dan penghormatan terhadap tradisi, masyarakat Poso dan Kaili dapat merekonstruksi narasi keagamaannya dari yang sempat traumatis menjadi konstruktif. Dalam kerangka ini, moderasi bukan sekadar ide keagamaan, melainkan identitas baru bagi masyarakat yang pernah terbelah sebuah identitas yang religius, plural, dan berakar pada budaya damai.

Secara teologis, moderasi di Sulawesi Tengah mencerminkan ajaran Al-Qur'an:



Terjemahnya :

143. dan demikian Kami telah menjadikan kamu umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. (QS. Al-Baqarah : 143).

Ayat ini menjadi landasan bahwa umat Islam dipanggil untuk berada di tengah bukan ekstrem, bukan liberal melainkan menjadi rahmat bagi sesama manusia. Dalam konteks masyarakat Kaili, nilai *wasathiyah* ini

menemukan bentuknya dalam upaya kolektif membangun perdamaian sosial dan menyembuhkan luka sejarah melalui jalan spiritual dan budaya..

D. Testimoni Tokoh Agama dan Masyarakat

Dalam studi lapangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian, seperti UIN Datokarama Palu (2020–2022), Balai Litbang Agama Makassar (2021), dan UNDP Indonesia (2014), ditemukan bahwa proses pemulihan sosial dan penguatan moderasi beragama di Sulawesi Tengah sangat bergantung pada peran aktif tokoh agama, adat, dan masyarakat sipil. Testimoni mereka mencerminkan dinamika transformasi sosial keagamaan pasca-konflik, serta bagaimana nilai Islam moderat dan kearifan lokal dijalankan dalam praktik keseharian.

Menurut laporan UIN Datokarama (2021), para tokoh agama Muslim dan Kristen di wilayah Poso dan Sigi sepakat bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masyarakat mau “belajar kembali untuk saling percaya” (*relearning trust*). Seorang imam masjid di Kecamatan Lage, Poso, dalam wawancara yang dikutip laporan tersebut, mengatakan:

“Kami tidak hanya bicara tentang perdamaian di mimbar, tetapi menjalankannya bersama. Setelah konflik, kami memulai kembali hubungan dengan saudara-saudara non-Muslim melalui kerja bakti dan doa bersama untuk kampung.”

Testimoni ini menggambarkan bahwa rekonsiliasi tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi telah menjadi gerakan sosial berbasis iman dan kebersamaan.

Dalam penelitian Balai Litbang Agama Makassar (2021) yang berjudul “*Peran Tokoh Agama dalam Membangun Moderasi Beragama di Wilayah Pasca-Konflik Sulawesi Tengah*”, ditemukan bahwa tokoh agama memainkan tiga fungsi utama: (1) fungsi rekonsiliatif, yaitu memulihkan hubungan sosial antarumat; (2) fungsi edukatif, melalui dakwah damai, khutbah, dan majelis taklim yang menanamkan nilai toleransi dan anti-kekerasan; serta (3) fungsi advokatif, yakni melindungi masyarakat dari pengaruh kelompok ekstrem.

Salah satu pendeta di Poso menyatakan: “Kami membangun perdamaian bukan karena tekanan politik, tapi karena iman. Iman harus menghadirkan kasih, bukan kebencian.”

Pernyataan ini memperlihatkan dimensi spiritual dari perdamaian yang bersumber pada kesadaran keagamaan lintas iman.

Dari sisi masyarakat adat, penelitian UNDP (2014) menemukan bahwa nilai-nilai lokal seperti *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu) dan *sintuvu maroso* (kekuatan dalam kebersamaan) menjadi kerangka moral bagi masyarakat Kaili dalam menata kembali hubungan sosial pasca-konflik. Seorang *tode* (pemangku adat) dari Desa Sidera menuturkan:

“Dulu kami hidup seperti dua pohon yang tumbuh terpisah, tetapi akar kami masih di tanah yang sama. Sekarang akar itu kami rawat kembali dengan adat dan agama.

Testimoni ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menggabungkan nilai Islam dan budaya Kaili sebagai dasar rekonsiliasi memperkuat identitas kolektif tanpa meniadakan perbedaan.

Penelitian Aragon (2010) juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi berbasis agama dan budaya lebih efektif daripada pendekatan politik semata. Ia mencatat bahwa dialog lintas iman di Poso dan sekitarnya tidak hanya membangun perdamaian, tetapi juga menumbuhkan *shared identity* baru, yaitu sebagai “masyarakat damai Sulawesi Tengah”. Dalam forum lintas agama seperti *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* dan *Forum Silaturahmi Tokoh Agama (FSTA)*, para ulama, pastor, dan pendeta secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan di daerah mereka.

Dari keseluruhan testimoni, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tokoh agama berperan sebagai agen moral yang memfasilitasi dialog, mendidik masyarakat dalam moderasi, dan menjadi teladan rekonsiliasi.
- b. Tokoh adat berperan dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai lokal yang harmonis dengan ajaran Islam moderat.
- c. Masyarakat akar rumput menjadi pelaku utama perdamaian yang mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi dalam praktik sosial sehari-hari.

Dengan demikian, data lapangan menunjukkan bahwa moderasi beragama di Sulawesi Tengah bukan hanya konsep ideal, melainkan hasil nyata dari pengalaman sosial dan spiritual masyarakat Kaili pasca-konflik, di mana tokoh agama dan adat menjadi penggerak utama dalam membangun tatanan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

E. Pembelajaran Penting bagi Daerah Lain

Pengalaman Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kaili dan daerah Poso dalam menghadapi dan mengatasi konflik sosial-keagamaan, memberikan pembelajaran berharga bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki karakter sosial dan keagamaan yang majemuk. Berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi dan pembangunan moderasi di wilayah ini lahir dari perpaduan antara pendekatan agama, budaya lokal, dan kebijakan sosial yang inklusif.

Menurut UNDP (2014) dalam laporan *Faith-Based Peacebuilding and Post-Conflict Recovery in Central Sulawesi*, rekonsiliasi di Poso berhasil karena melibatkan semua lapisan masyarakat, bukan hanya elit politik atau agama. Pendekatan berbasis komunitas seperti *dialog akar rumput*, kegiatan lintas iman, dan pendidikan perdamaian terbukti lebih efektif dibandingkan intervensi top-down. Model ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dengan potensi konflik horizontal seperti Ambon, Ternate, atau Papua, untuk membangun perdamaian berkelanjutan melalui mekanisme lokal yang partisipatif.

Selanjutnya, penelitian Aragon (2010) menekankan bahwa integrasi nilai agama dan adat lokal merupakan kunci keberhasilan transformasi sosial di Sulawesi Tengah. Nilai budaya Kaili seperti *sintuvu maroso* (persatuan yang kokoh), *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu), serta praktik sosial *gotong royong dan doa bersama*, mampu menjadi landasan moral untuk memulihkan hubungan antaragama dan etnis. Hal ini menjadi bukti bahwa budaya lokal tidak bertentangan dengan Islam moderat, melainkan memperkaya ekspresinya. Daerah lain dengan tradisi kuat seperti Bali (dengan Tri Hita Karana) atau Jawa (dengan tepa selira) juga dapat menjadikan

pendekatan ini sebagai model integratif antara kearifan lokal dan nilai keagamaan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, laporan UIN Datokarama Palu (2022) menegaskan bahwa pendidikan Islam berorientasi moderasi di madrasah dan pesantren menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian. Guru-guru agama di Sulawesi Tengah tidak hanya mengajarkan fikih dan akidah, tetapi juga nilai-nilai sosial seperti empati, kerja sama, dan penghormatan terhadap perbedaan. Praktik ini dapat ditiru oleh lembaga pendidikan di daerah lain untuk mencegah munculnya radikalisme berbasis identitas sejak dini.

Selain itu, Balai Litbang Agama Makassar (2021) menyoroti peran strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Sulawesi Tengah sebagai model kelembagaan yang efektif dalam merawat toleransi. FKUB tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi antarumat, tetapi juga sebagai agen mediasi dalam menyelesaikan persoalan sosial dan pembangunan tempat ibadah. Model ini direkomendasikan untuk diperkuat di daerah lain dengan karakter plural seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Barat.

Secara sosiologis, Azra (2016) menilai bahwa pengalaman Sulawesi Tengah menunjukkan bagaimana Islam wasathiyyah (moderat) dapat berfungsi sebagai *social healing mechanism* sebuah jalan spiritual dan sosial untuk menyembuhkan luka akibat kekerasan identitas. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk konteks pasca-konflik, tetapi juga penting dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti polarisasi politik dan intoleransi digital yang muncul di berbagai daerah Indonesia.

Dari berbagai data akademik di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran penting bagi daerah lain mencakup lima poin utama:

- a. Perdamaian berbasis komunitas dan budaya lokal lebih efektif dibandingkan pendekatan politik semata.
- b. Kolaborasi lintas agama dan adat menjadi kunci rekonstruksi kepercayaan sosial.
- c. Integrasi moderasi beragama ke dalam pendidikan formal dan non-formal memperkuat daya tahan masyarakat terhadap radikalisme.
- d. Peran tokoh agama dan adat sebagai agen moral dan sosial lebih diakui masyarakat dibandingkan intervensi eksternal.
- e. Nilai Islam moderat dan kearifan lokal dapat bersinergi untuk membentuk masyarakat religius yang terbuka, damai, dan berkeadilan.

Dengan demikian, model moderasi dan rekonsiliasi di Sulawesi Tengah dapat menjadi laboratorium sosial bagi Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan sumber kekuatan untuk membangun harmoni nasional.

BAB VII

ARAH BARU ISLAM DI TANAH KAILI

A. Rekonstruksi Nilai Islam Lokal dalam Konteks Modernitas

Berikut uraian berdasarkan data akademik mengenai “Rekonstruksi Nilai Islam Lokal dalam Konteks

Modernitas”, yang merangkum temuan riset para akademisi Indonesia kontemporer:

1. Konsep dan Urgensi Rekonstruksi Nilai Islam Lokal

Rekonstruksi nilai Islam lokal merupakan proses reinterpretasi dan revitalisasi ajaran Islam yang telah membaur dengan budaya lokal agar tetap relevan dengan tantangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern (Abdullah, 2019; Arifin, 2020). Nilai Islam lokal biasanya terwujud dalam bentuk adat, tradisi, dan simbol keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam.

Menurut Azyumardi Azra (2013), Islam di Indonesia bersifat “akomodatif terhadap budaya lokal” karena sejak awal proses Islamisasi Nusantara melibatkan asimilasi damai antara dakwah Islam dengan tradisi masyarakat. Karena itu, rekonstruksi bukan berarti mengganti, tetapi menyegarkan nilai-nilai lama agar sesuai dengan tuntutan modernitas.

2. Dialektika Islam Lokal dan Modernitas

Modernitas membawa perubahan sosial besar: rasionalisasi, urbanisasi, dan penetrasi teknologi yang sering menggeser tradisi dan solidaritas sosial. Namun, masyarakat Muslim Indonesia justru memperlihatkan kemampuan untuk mengadaptasi nilai Islam lokal ke dalam bentuk baru kehidupan modern.

Penelitian Abdurrahman Mas’ud (2017) menunjukkan bahwa Islam lokal mampu bertransformasi menjadi sumber etika sosial modern, seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan profesionalisme. Sementara itu, M. Amin Abdullah (2019) menegaskan bahwa Islam lokal

memberikan “ruang dialog” antara agama, budaya, dan ilmu pengetahuan modern.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, masyarakat Kaili menampilkan bentuk dialektika tersebut melalui nilai sintuvu (persatuan) dan nosarara nosabatutu (kekeluargaan dan kebersamaan), yang kini ditafsirkan kembali dalam konteks pembangunan perdamaian, kerja sama lintas agama, dan etika sosial modern (Bahdar, 2024).

3. Strategi Rekonstruksi Nilai Islam Lokal

Rekonstruksi dilakukan melalui pendekatan kultural, pendidikan, dan sosial:

1. Melalui pendidikan Islam

Kurikulum PAI dan Fikih di madrasah mulai mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, tolong-menolong, dan kejujuran dalam proses pembelajaran (Rahman, 2021). Nilai lokal berfungsi sebagai penghubung antara teks agama dan konteks sosial peserta didik.

2. Melalui dakwah kultural

Ulama dan dai lokal menggunakan narasi adat dan bahasa daerah dalam berdakwah agar pesan Islam diterima secara emosional dan kultural (Abdullah, 2019). Misalnya, dakwah di Poso pasca-konflik lebih menekankan Islam sebagai “agama damai” yang sejalan dengan falsafah *nosarara nosabatutu*.

3. Melalui revitalisasi budaya religius

Tradisi keagamaan seperti doa bersama, sedekah kampung, dan upacara adat diadaptasi menjadi media dakwah dan pendidikan nilai Islam moderat. Hasil riset **Aziz (2022)** menunjukkan bahwa praktik ini memperkuat kohesi sosial dan mengurangi ketegangan antaragama.

4. Implikasi Rekonstruksi terhadap Identitas dan Peradaban Muslim

Rekonstruksi nilai Islam lokal berimplikasi pada lahirnya identitas keislaman yang moderat, kontekstual, dan humanis.

- a. Menurut Nakamura (2016), rekonstruksi Islam lokal menjadikan masyarakat Muslim lebih adaptif terhadap globalisasi tanpa kehilangan akar spiritual dan budaya.
- b. Di Sulawesi Tengah, penelitian UIN Datokarama (2023) menemukan bahwa nilai-nilai Islam Kaili mampu memperkuat narasi Islam damai pasca-konflik dan memperkuat solidaritas lintas etnis.
- c. Secara sosial, Islam lokal menjadi “perekat moral” bagi masyarakat yang plural, mendorong partisipasi sosial dan pembangunan berbasis nilai etika religius (Bahdar, 2024).

Dengan demikian maka rekonstruksi nilai Islam lokal dalam konteks modernitas merupakan strategi penting untuk mempertahankan relevansi Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin di tengah arus globalisasi. Islam lokal yang berakar pada kearifan dan budaya masyarakat tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga menegaskan wajah Islam Indonesia yang moderat, damai, dan berperadaban.

Dalam konteks Sulawesi Tengah dan masyarakat Kaili, rekonstruksi ini bermakna menjaga keseimbangan antara ajaran Islam universal dan identitas budaya lokal, sehingga melahirkan model keislaman yang kontekstual, inklusif, dan solutif terhadap tantangan modernitas.

B. Islam moderat sebagai identitas baru umat di Sulawesi

Tengah

1. Latar Sosial dan Transformasi Keagamaan

Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Poso, Sigi, dan Donggala, merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang interaksi antaragama dan etnis. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai fondasi etika sosial dan perekat kultural masyarakat Kaili dan etnis lain di sekitarnya (Nawawi, 2020).

Pasca-konflik sosial keagamaan pada awal 2000-an, muncul kesadaran baru di kalangan umat Islam di Sulawesi Tengah untuk membangun identitas keagamaan yang lebih inklusif, moderat, dan rekonsiliatif. Perubahan orientasi ini sejalan dengan upaya nasionalisasi konsep *wasathiyah Islam* yang diarusutamakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak 2019 (Kemenag RI, 2020).

Menurut hasil riset Suaedy (2013) dan Said (2018), rekonsiliasi sosial di Poso dan Palu memperlihatkan transformasi religiusitas masyarakat Muslim yang menempatkan Islam sebagai sumber perdamaian, bukan konflik. Dengan demikian, Islam moderat menjadi identitas baru umat yang lahir dari pengalaman kolektif menghadapi trauma sosial dan keinginan untuk membangun tatanan sosial yang harmonis.

2. Makna Islam Moderat sebagai Identitas Kolektif

Islam moderat (al-wasathiyah) di Sulawesi Tengah dimaknai sebagai sikap keagamaan yang menekankan keseimbangan antara ajaran normatif Islam dengan realitas sosial budaya masyarakat lokal. Nilai-nilai seperti *toleransi (tasamuh)*, *keseimbangan (tawazun)*, dan *kerja sama sosial*

(*ta‘awun*) menjadi bagian dari ekspresi Islam lokal masyarakat Kaili, yang diintegrasikan dalam prinsip budaya seperti *nosarara nosabatutu* (persaudaraan dan kebersamaan) dan *sintuvu* (solidaritas sosial) (Bahdar, 2024; Mahmud, 2022).

Penelitian Huda (2021) menunjukkan bahwa praktik Islam moderat di Sulawesi Tengah tidak muncul dari intervensi eksternal semata, melainkan tumbuh dari dinamika lokal yang telah lama menekankan nilai keselarasan dan harmoni. Masyarakat Kaili, misalnya, menafsirkan Islam bukan dalam bentuk rigid atau skipturalistik, tetapi sebagai ajaran yang menuntun etika sosial, kesetaraan, dan kemanusiaan.

3. Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan

Identitas Islam moderat di Sulawesi Tengah semakin menguat melalui peran institusi pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan. Menurut data UIN Datokarama Palu (2023), berbagai lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler seperti *dialog lintas iman*, *kajian Islam rahmatan lil ‘alamin*, serta *program pengabdian masyarakat berbasis perdamaian*.

Selain itu, pesantren lokal seperti Pesantren Al-Khiraat dan Al-Muhajirin Poso turut berperan penting dalam membentuk narasi Islam damai dan toleran. Penelitian Said (2018) mencatat bahwa para kiai dan da'i di wilayah ini mengembangkan pendekatan dakwah kultural yang menekankan kasih sayang, kebersamaan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

4. Islam Moderat sebagai Basis Rekonsiliasi dan Identitas

Baru

Pasca-konflik Poso menjadi momentum lahirnya identitas keagamaan baru di Sulawesi Tengah. Masyarakat Muslim yang dahulu mengalami polarisasi kini bergerak menuju pembentukan identitas sosial baru berbasis Islam moderat dan kemanusiaan universal. Studi Suaedy (2013) dan Qodir (2020) menyimpulkan bahwa moderasi Islam menjadi alat rekonsiliasi kultural yang efektif dalam menyatukan komunitas Muslim dan Kristen di Poso serta mendorong kerja sama lintas iman dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Moderasi ini juga memperlihatkan transformasi dari Islam sebagai “agama mayoritas” menuju “agama pembangun peradaban bersama.” Hal ini tampak pada gerakan masyarakat sipil Islam yang aktif dalam kegiatan sosial, penguatan ekonomi umat, dan pelestarian nilai-nilai budaya damai yang bersumber dari Islam dan tradisi Kaili.

Dengan demikian maka Islam moderat di Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi konsep teologis, tetapi telah bertransformasi menjadi identitas sosial dan kultural umat. Ia tumbuh dari pengalaman historis, kearifan lokal, dan kebutuhan rekonsiliasi pasca-konflik, serta diperkuat oleh lembaga pendidikan dan ulama lokal. Identitas Islam moderat ini sekaligus menjadi simbol Islam Nusantara versi Sulawesi Tengah yakni Islam yang damai, berakar pada tradisi lokal, terbuka terhadap perbedaan, dan adaptif terhadap modernitas. Dengan demikian, Islam moderat bukan sekadar “jalan tengah” dalam beragama, tetapi juga arah baru bagi peradaban Islam di Tanah Kaili yang menegaskan peran agama sebagai sumber harmoni, persaudaraan, dan kemajuan masyarakat.

C. Sinergi antara agama, budaya, dan negara dalam

membangun masyarakat damai

1. Kerangka Konseptual Sinergi Agama, Budaya, dan Negara

Sinergi antara agama, budaya, dan negara merupakan model integratif yang bertujuan mewujudkan tatanan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks keindonesiaan, sinergi ini berakar pada filosofi Pancasila yang menempatkan nilai-nilai religiusitas dan kemanusiaan sebagai dasar kehidupan berbangsa.

Menurut Abdullah (2019) dan Azra (2013), peran agama dan budaya tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter bangsa Indonesia. Agama menjadi sumber moral dan spiritual, budaya berfungsi sebagai wadah internalisasi nilai, sedangkan negara berperan sebagai pengatur yang menjamin keadilan sosial dan kebebasan beragama. Ketiganya membentuk hubungan simbiotik untuk mewujudkan perdamaian dan kohesi sosial.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kaili, sinergi ini tercermin dalam praktik sosial berbasis nilai *nosarara nosabatutu* (persaudaraan dan kebersamaan), yang mengandung dimensi religius, kultural, dan sosial-politik (Bahdar, 2024). Nilai ini kemudian diadaptasi dalam kebijakan pembangunan sosial keagamaan daerah, termasuk program moderasi beragama dan rekonsiliasi pasca-konflik.

2. Agama sebagai Sumber Etika dan Spirit Perdamaian

Agama dalam konteks masyarakat plural berperan sebagai pembimbing moral dan fondasi rekonsiliasi. Studi Suaedy (2013) dan Alfitri (2020) menegaskan bahwa ajaran Islam yang berlandaskan prinsip *rahmatan lil 'alamin*

menjadi kekuatan sosial yang mampu menginspirasi kerja sama lintas iman di wilayah-wilayah pasca-konflik seperti Poso.

Nilai-nilai keagamaan seperti *ta‘awun* (tolong-menolong), *‘adl* (keadilan), dan *tasamuh* (toleransi) menjadi etika sosial yang memperkuat hubungan antarumat. Hal ini tampak dalam praktik keagamaan masyarakat Kaili yang menggabungkan ritual Islam dengan simbol-simbol adat tanpa kehilangan substansi tauhid, seperti tradisi doa bersama lintas agama pada momentum peringatan konflik Poso sebagai simbol perdamaian dan solidaritas sosial (Mahmud, 2022).

3. Budaya sebagai Ruang Sosial Rekonsiliasi

Budaya lokal memiliki fungsi strategis dalam menjembatani perbedaan identitas agama dan etnis. Menurut Geertz (1973) dan Koentjaraningrat (2009), budaya berperan sebagai sistem makna yang memungkinkan masyarakat mengelola konflik melalui mekanisme simbolik, ritual, dan nilai-nilai sosial. Dalam kasus Sulawesi Tengah, nilai budaya *sintuvu* (persatuan) dan *nosarara nosabatutu* telah digunakan oleh tokoh adat dan agama sebagai modal sosial rekonsiliasi. Penelitian Nawawi (2020) menunjukkan bahwa budaya lokal menjadi jembatan antara komunitas Muslim dan non-Muslim, memperkuat dialog sosial, serta mengubah paradigma dari “agama sebagai pemisah” menjadi “agama sebagai perekat sosial.” Melalui pelibatan tokoh adat dalam forum keagamaan dan musyawarah masyarakat, budaya berperan menormalisasi kembali hubungan sosial yang sempat terpecah akibat konflik, dengan mengedepankan prinsip “tidak ada musuh abadi dalam persaudaraan sosial.”

4. Negara sebagai Fasilitator Perdamaian dan Moderasi

Negara berperan penting dalam menginstitusionalisasi nilai-nilai keagamaan dan budaya ke dalam kebijakan sosial. Melalui Kementerian Agama, pemerintah Indonesia meluncurkan program Moderasi Beragama (2019–sekarang) yang bertujuan memperkuat karakter toleransi dan nasionalisme di masyarakat (Kemenag RI, 2020).

Di Sulawesi Tengah, sinergi negara dengan lembaga keagamaan dan budaya lokal tampak dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta program revitalisasi kearifan lokal berbasis pendidikan damai. Hasil penelitian UIN Datokarama Palu (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat berhasil menurunkan potensi konflik serta memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan sosial.

Dengan demikian, negara berfungsi bukan sebagai pengendali agama, tetapi sebagai mediator dan fasilitator nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam menjaga keutuhan sosial.

5. Model Sinergi Tiga Pilar untuk Perdamaian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian teoretik, sinergi antara agama, budaya, dan negara dapat dirumuskan dalam tiga pilar utama:

- a. Integrasi nilai ajaran agama, etika budaya, dan hukum negara disinergikan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup damai dan saling menghormati.
- b. Kolaborasi kelembagaan lembaga keagamaan, adat, dan pemerintah bekerja bersama dalam forum bersama (misalnya FKUB, lembaga adat, dan madrasah) untuk menanamkan nilai toleransi.

- c. Rekonstruksi narasi sosial dakwah, pendidikan, dan kebijakan publik diarahkan untuk memperkuat narasi damai, bukan segregasi identitas.

Model ini menjadi praktik nyata di beberapa wilayah Sulawesi Tengah di mana tokoh agama, pemerintah daerah, dan pemangku adat bersatu dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti lintas iman, pelatihan moderasi beragama, dan peringatan bersama hari perdamaian Poso. Dengan demikian maka Sinergi antara agama, budaya, dan negara di Sulawesi Tengah menjadi fondasi baru bagi masyarakat damai dan inklusif. Agama memberikan dasar moral dan spiritual, budaya menyediakan ruang sosial yang adaptif terhadap perbedaan, sedangkan negara menjamin keadilan dan kebebasan beragama.

Ketiganya membentuk sistem sosial yang saling menopang dalam menjaga harmoni dan mencegah konflik. Sinergi ini bukan sekadar wacana ideal, melainkan praktik nyata yang telah diuji dalam konteks pasca-konflik Poso dan rekonstruksi sosial masyarakat Kaili. Dengan demikian, sinergi ini merupakan model keindonesiaan dalam membangun peradaban damai sebuah ekspresi Islam moderat yang berpadu dengan budaya lokal dan semangat kebangsaan.

D. Tantangan Globalisasi, Digitalisasi, dan Disinformasi Agama

Globalisasi dan digitalisasi membawa transformasi besar dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Arus global informasi keagamaan yang begitu cepat melalui media sosial dan internet telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran pengetahuan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan serius berupa radikalisisasi digital, polarisasi

identitas keagamaan, dan disinformasi agama (Haryanto, 2020; Azra, 2021).

Secara akademik, globalisasi dipahami sebagai proses integrasi dunia yang menembus batas-batas geografis, sosial, dan budaya melalui teknologi informasi, ekonomi, dan komunikasi (Giddens, 1990). Dalam konteks agama, globalisasi melahirkan dua fenomena ekstrem: di satu sisi memperluas pemahaman universal Islam yang terbuka dan rasional, namun di sisi lain membuka ruang infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi menggerus nilai-nilai Islam lokal (Fealy & White, 2008). Fenomena ini juga terjadi di Sulawesi Tengah, di mana munculnya paham-paham eksklusif pasca-konflik Poso merupakan akibat dari penetrasi jaringan dakwah global tanpa filter budaya lokal (Burhanuddin, 2019).

Digitalisasi agama memperkuat proses tersebut. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram menjadi arena dakwah yang efektif namun juga rentan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan ajaran intoleran (Campbell, 2021). Studi Lembaga Setara Institute (2022) mencatat meningkatnya penyebaran ujaran kebencian berbasis agama di media sosial, termasuk dalam konteks lokal Sulawesi Tengah. Fenomena ini menunjukkan bagaimana otentisitas otoritas keagamaan mulai tergeser dari ulama tradisional ke “ustaz digital” yang belum tentu memiliki kompetensi keilmuan dan kepekaan sosial budaya.

Selain itu, disinformasi agama atau penyebaran narasi palsu yang diklaim sebagai ajaran Islam memperparah situasi. Dalam analisis Wahid Foundation (2021), banyak konten keagamaan di dunia maya mengandung unsur manipulasi teks Al-Qur'an dan hadis untuk melegitimasi kekerasan atau intoleransi. Disinformasi ini mengaburkan

wajah Islam yang damai dan berkeadaban, serta menimbulkan keresahan sosial di masyarakat majemuk seperti masyarakat Kaili.

Secara teoretis, tantangan ini menuntut penguatan literasi digital keagamaan (religious digital literacy) di kalangan umat, guru, dan dai lokal. Menurut Rahim (2022), literasi digital menjadi bagian penting dalam moderasi beragama era digital agar masyarakat mampu memilah antara sumber otoritatif dan hoaks keagamaan. Di Sulawesi Tengah, penguatan literasi ini dapat diintegrasikan melalui pendidikan madrasah, pesantren, dan program pemerintah daerah yang mananamkan nilai *wasathiyyah*, toleransi, serta tanggung jawab bermedia.

Dengan demikian, globalisasi dan digitalisasi agama bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk memperluas dakwah Islam moderat berbasis kearifan lokal. Namun, agar peluang ini produktif, diperlukan sinergi antara lembaga keagamaan, pendidikan, dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang melek digital, kritis terhadap informasi agama, dan berakar pada nilai-nilai Islam Nusantara yang damai.

E. Peta jalan Islam masa depan di Tanah Kaili

Masa depan Islam di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah, sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan lembaga keagamaan lokal dalam meneguhkan Islam yang moderat, berakar pada kearifan lokal, dan adaptif terhadap perubahan sosial modern. Berdasarkan temuan akademik lintas bidang sejarah, antropologi, dan pendidikan Islam peta jalan Islam masa depan di Tanah Kaili dapat dipetakan ke dalam tiga pilar utama: rekonstruksi nilai Islam lokal, penguatan lembaga pendidikan keagamaan, dan digitalisasi dakwah berbasis budaya.

Pertama, rekonstruksi nilai Islam lokal menjadi landasan utama keberlanjutan identitas keislaman masyarakat Kaili. Sejarah menunjukkan bahwa proses Islamisasi di wilayah ini berlangsung secara damai dan kultural, di mana ajaran Islam berasimilasi dengan nilai-nilai lokal seperti *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu), *sintuvu maroso* (persatuan yang kokoh), dan *pombepentulu* (gotong royong dalam kebaikan) (Abd. Rahman, 2018; Burhanuddin, 2019). Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi lokal dari prinsip *ukhuwah islamiyyah* dan *ukhuwah insaniyyah* yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam konteks modern, revitalisasi nilai-nilai ini penting untuk membangun Islam yang membumi dan tetap relevan dengan dinamika masyarakat plural.

Kedua, penguatan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan majelis taklim memiliki peran sentral dalam melanjutkan misi dakwah moderat di daerah ini. Studi Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Tengah telah menjadi *agent of change* dalam membentuk generasi muda yang inklusif dan religius. Ke depan, madrasah dan pesantren diharapkan tidak hanya menjadi tempat transmisi ilmu-ilmu fikih klasik, tetapi juga pusat transformasi sosial yang mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi digital, dan nilai-nilai budaya lokal. Implementasi kurikulum berbasis *wasathiyyah* sebagaimana digariskan oleh Kementerian Agama (2022) menjadi langkah strategis dalam membangun Islam moderat yang berdaya saing.

Ketiga, digitalisasi dakwah dan jejaring sosial keagamaan harus diarahkan untuk memperkuat Islam damai. Menurut data dari Wahid Foundation (2021), sebagian besar generasi muda muslim di Indonesia mengakses pemahaman agama melalui media digital.

Karena itu, dakwah Islam masa depan di Tanah Kaili harus menyesuaikan diri dengan ekosistem digital ini melalui pelatihan dai lokal yang melek teknologi, penciptaan konten dakwah berbasis budaya Kaili, serta penggunaan platform media sosial sebagai ruang edukasi dan dialog lintas iman (Rahim, 2022). Digitalisasi ini juga dapat memperkuat dokumentasi sejarah dan kearifan lokal Islam Kaili, menjadikannya warisan digital yang lestari.

Dari sisi sosial-politik, peta jalan Islam masa depan di Tanah Kaili perlu berorientasi pada sinergi antara agama, budaya, dan kebijakan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem moderasi beragama melalui kebijakan inklusif, pengembangan ekonomi berbasis pesantren, dan dukungan terhadap program dakwah budaya. Model kolaboratif seperti *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* dan *Madrasah Moderasi* yang digagas Kemenag terbukti efektif memperkuat harmoni pasca-konflik (Muzakki, 2021).

Dengan demikian, arah Islam masa depan di Tanah Kaili dapat dirumuskan sebagai Islam yang moderat, berkarakter lokal, dan berwawasan global. Islam seperti ini bukan hanya menjaga kesinambungan tradisi religius Kaili, tetapi juga menjawab tantangan modernitas, globalisasi, dan disinformasi keagamaan dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Dengan demikian maka Peta jalan Islam masa depan di Tanah Kaili menuntut integrasi antara nilai spiritual, sosial, dan teknologi. Islam yang tumbuh di tanah Kaili tidak lagi hanya dipahami sebagai warisan leluhur, melainkan sebagai *proses peradaban berkelanjutan* yang memadukan keislaman, keindonesiaan, dan kekailian dalam satu kesatuan identitas yang harmonis.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Masa depan Islam di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah, sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan lembaga keagamaan lokal dalam meneguhkan Islam yang moderat, berakar pada kearifan lokal, dan adaptif terhadap perubahan sosial modern. Berdasarkan temuan akademik lintas bidang—sejarah, antropologi, dan pendidikan Islam—peta jalan Islam masa depan di Tanah Kaili dapat dipetakan ke dalam tiga pilar utama: rekonstruksi nilai Islam lokal, penguatan lembaga pendidikan keagamaan, dan digitalisasi dakwah berbasis budaya.

Pertama, rekonstruksi nilai Islam lokal menjadi landasan utama keberlanjutan identitas keislaman masyarakat Kaili. Sejarah menunjukkan bahwa proses Islamisasi di wilayah ini berlangsung secara damai dan kultural, di mana ajaran Islam berasimilasi dengan nilai-nilai lokal seperti *nosarara nosabatutu* (bersaudara dan bersatu), *sintuvu maroso* (persatuan yang kokoh), dan *pombepentulu* (gotong royong dalam kebaikan) (Abd. Rahman, 2018; Burhanuddin, 2019). Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi lokal dari prinsip *ukhuwah islamiyyah* dan *ukhuwah insaniyyah* yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam konteks modern, revitalisasi nilai-nilai ini penting untuk membangun Islam yang membumi dan tetap relevan dengan dinamika masyarakat plural.

Kedua, penguatan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan majelis taklim memiliki peran sentral dalam melanjutkan misi dakwah moderat di daerah ini. Studi Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Tengah telah menjadi *agent of change* dalam membentuk generasi muda yang inklusif dan religius. Ke depan, madrasah dan pesantren diharapkan

tidak hanya menjadi tempat transmisi ilmu-ilmu fikih klasik, tetapi juga pusat transformasi sosial yang mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi digital, dan nilai-nilai budaya lokal. Implementasi kurikulum berbasis *wasathiyyah* sebagaimana digariskan oleh Kementerian Agama (2022) menjadi langkah strategis dalam membangun Islam moderat yang berdaya saing.

Ketiga, digitalisasi dakwah dan jejaring sosial keagamaan harus diarahkan untuk memperkuat Islam damai. Menurut data dari Wahid Foundation (2021), sebagian besar generasi muda muslim di Indonesia mengakses pemahaman agama melalui media digital. Karena itu, dakwah Islam masa depan di Tanah Kaili harus menyesuaikan diri dengan ekosistem digital ini melalui pelatihan dai lokal yang melek teknologi, penciptaan konten dakwah berbasis budaya Kaili, serta penggunaan platform media sosial sebagai ruang edukasi dan dialog lintas iman (Rahim, 2022). Digitalisasi ini juga dapat memperkuat dokumentasi sejarah dan kearifan lokal Islam Kaili, menjadikannya warisan digital yang lestari.

Dari sisi sosial-politik, peta jalan Islam masa depan di Tanah Kaili perlu berorientasi pada sinergi antara agama, budaya, dan kebijakan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem moderasi beragama melalui kebijakan inklusif, pengembangan ekonomi berbasis pesantren, dan dukungan terhadap program dakwah budaya. Model kolaboratif seperti *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* dan *Madrasah Moderasi* yang digagas Kemenag terbukti efektif memperkuat harmoni pasca-konflik (Muzakki, 2021).

Dengan demikian, arah Islam masa depan di Tanah Kaili dapat dirumuskan sebagai Islam yang moderat, berkarakter lokal, dan berwawasan global. Islam seperti ini

bukan hanya menjaga kesinambungan tradisi religius Kaili, tetapi juga menjawab tantangan modernitas, globalisasi, dan disinformasi keagamaan dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif.

B. Rekomendasi Praktis bagi Tokoh Agama, Pendidik, dan Pemerintah Daerah

Sebagai penutup reflektif dari kajian *Arah Baru Islam di Tanah Kaili: Meneguhkan Islam Moderat dan Kearifan Lokal*, sejumlah rekomendasi praktis dapat dirumuskan untuk memperkuat sinergi antara tokoh agama, pendidik, dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang damai, moderat, dan berkeadaban. Rekomendasi ini disusun dengan merujuk pada hasil penelitian akademik di bidang sosial-keagamaan, pendidikan Islam, dan kebijakan publik pasca-konflik di Sulawesi Tengah.

1. Rekomendasi bagi Tokoh Agama (Ulama, Da'i, dan Pemimpin Komunitas)

Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran keagamaan masyarakat Kaili. Berdasarkan temuan Hafid (2019) dan Muzakki (2021), ulama lokal berperan sebagai mediator sosial, penjaga nilai moderasi, sekaligus agen rekonsiliasi antarumat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. Menguatkan narasi dakwah moderat berbasis kearifan lokal, dengan menekankan nilai-nilai *sintuvu maroso, nosarara nosabatutu*, dan *pombepentulu* sebagai bagian dari ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin. Dakwah harus disampaikan dengan bahasa budaya agar lebih menyentuh dimensi emosional masyarakat.
- b. Mendorong dialog lintas iman dan budaya melalui forum bersama antara tokoh Islam, Kristen, dan adat

lokal sebagaimana difasilitasi oleh *FKUB* (Forum Kerukunan Umat Beragama). Model dialog ini terbukti efektif dalam memperkuat kepercayaan sosial pasca-konflik (van Klinken, 2007; Aragon, 2001).

- c. Meningkatkan kapasitas digital para da'i lokal agar mampu menggunakan media sosial secara produktif dan mencegah penyebaran disinformasi agama (Wahid Foundation, 2021). Dakwah digital berbasis budaya Kaili perlu dikembangkan sebagai sarana pembelajaran lintas generasi.

2. Rekomendasi bagi Pendidik (Guru, Dosen, dan Pengelola Madrasah/Pesantren)

Pendidikan Islam di Sulawesi Tengah terbukti menjadi instrumen utama dalam menanamkan nilai moderasi dan perdamaian. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Agama (2022) dan **Nurhayati (2020)**, lembaga pendidikan berperan dalam membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan cinta tanah air. Rekomendasinya adalah:

- a. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Kaili dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Fikih, seperti kerja sama sosial (*gotong royong*), penghormatan terhadap sesama (*nosabatutu*), dan nilai kejujuran (*pombetulungi*). Nilai-nilai ini dapat diimplementasikan melalui pembelajaran kontekstual dan projek sosial siswa.
- b. Membangun model pembelajaran Islam moderat berbasis budaya dan digital, yaitu menggabungkan pendekatan *wasathiyah* dengan pembelajaran aktif dan literasi digital. Guru dan dosen perlu dilatih untuk menjadi *pendidik multikultural* yang memahami konteks sosial-budaya daerah.

- c. Memperkuat peran pesantren dan madrasah sebagai pusat moderasi beragama, dengan memfasilitasi kegiatan lintas sekolah dan lintas agama, seperti diskusi budaya, festival toleransi, dan pelatihan kepemimpinan pelajar berbasis moderasi.

3. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjaga kerukunan sosial serta memperkuat ekosistem moderasi beragama. Berdasarkan studi Burhanuddin (2019) dan laporan UIN Palu (2020), keberhasilan rekonsiliasi sosial pasca-konflik di Sulawesi Tengah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah yang berpihak pada pembangunan sosial lintas agama. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Menyusun kebijakan daerah berbasis moderasi beragama dan budaya lokal. Misalnya, dengan memasukkan nilai-nilai adat Kaili ke dalam peraturan daerah tentang pendidikan, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Mendukung program pendidikan dan dakwah damai, dengan memberi insentif kepada lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan pesantren yang aktif mengembangkan kegiatan moderasi beragama serta rekonsiliasi sosial.
- b. Membangun pusat studi dan dokumentasi Islam Kaili, bekerja sama dengan universitas, lembaga adat, dan tokoh agama. Pusat ini berfungsi sebagai ruang riset, pelestarian tradisi, dan inovasi dakwah berbasis kearifan lokal.
- c. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program bersama pemerintah dan ormas keagamaan guna mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ideologi ekstrem di ruang digital (Rahim,

2022). Dengan demikian Sinergi antara tokoh agama, pendidik, dan pemerintah daerah merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan Islam moderat di Tanah Kaili. Ketiganya perlu bekerja dalam kerangka *trilogi moderasi*: spiritualitas yang terbuka, pendidikan yang inklusif, dan kebijakan yang berkeadilan. Dengan kolaborasi tersebut, Tanah Kaili dapat menjadi laboratorium peradaban Islam Nusantara sebuah ruang di mana agama, budaya, dan negara bertemu dalam harmoni.

C. Harapan Penulis untuk Kelanjutan Studi Islam Lokal dan Moderasi Keagamaan

Penulis berharap agar studi tentang Islam lokal dan moderasi keagamaan terus dikembangkan sebagai upaya memperkuat identitas keislaman yang berakar pada budaya Nusantara, khususnya di Sulawesi Tengah dan Tanah Kaili. Berdasarkan berbagai penelitian akademik (Azra, 2021; Abdullah, 2018; Mudzhar, 2020), Islam lokal bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam universal, melainkan hasil dari proses indigenisasi Islam yakni pertemuan harmonis antara nilai-nilai Islam dengan budaya setempat yang menciptakan ekspresi keberagamaan yang damai, toleran, dan kontekstual.

Ke depan, studi-studi Islam lokal perlu diarahkan pada tiga fokus utama.

- a. Pertama, penguatan riset interdisipliner yang menghubungkan kajian keislaman, antropologi, dan pendidikan. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Islam lokal seperti gotong royong, penghormatan terhadap sesama, dan ritual adat religius dapat dikaji secara ilmiah untuk mendukung teori moderasi beragama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hefner (2019),

Islam di Asia Tenggara adalah contoh hidup dari sintesis antara ortodoksi dan kearifan budaya yang menghasilkan stabilitas sosial.

- b. implementasi pendidikan Islam moderat dalam kurikulum madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Studi oleh Miftahuddin (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis Islam moderat mampu meningkatkan empati sosial, dialog lintas iman, dan sikap kritis terhadap ekstremisme. Maka, penulis mendorong agar pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif (pengetahuan hukum fikih dan akidah), tetapi juga afektif dan sosial melalui pembiasaan nilai-nilai toleransi dan kerja sama lintas komunitas.
- c. Ketiga, perluasan jejaring riset dan kebijakan antara akademisi, pemerintah daerah, dan tokoh agama lokal. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat narasi Islam moderat berbasis kearifan lokal di ruang publik, termasuk media digital, guna menghadapi tantangan disinformasi dan radikalisme daring (Al-Rashid & Muttaqin, 2023). Penulis juga menaruh harapan agar para peneliti muda di wilayah Sulawesi Tengah dan daerah lain di Indonesia timur menjadikan Islam lokal sebagai laboratorium sosial untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan konteks masyarakatnya. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya wacana akademik, tetapi menjadi gerakan sosial dan kultural yang meneguhkan Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin di tengah perubahan zaman. Akhirnya, harapan terbesar penulis adalah agar seluruh komponen bangsa ulama, akademisi, pendidik, dan pemerintah terus berkomitmen membangun ekosistem keagamaan yang inklusif, adaptif, dan

berkelanjutan, sehingga nilai-nilai Islam moderat tetap menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa yang damai dan berkeadaban.

D. Profil Tokoh Agama dan Lembaga Lokal

Tokoh agama dan lembaga lokal di Sulawesi Tengah, khususnya di Tanah Kaili, memiliki peran historis dan kultural yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan antara nilai Islam dan kearifan lokal. Berdasarkan hasil penelitian akademik (Abdullah, 2018; Azra, 2021; Daud, 2022), keberadaan para imam, guru mengaji, ulama kampung, dan pengasuh pesantren lokal menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter keagamaan masyarakat yang damai, moderat, dan berakar kuat pada tradisi.

1. Tokoh Agama Lokal: Penggerak Islam Moderat Berbasis Budaya.Tokoh-tokoh agama di Tanah Kaili, seperti Imam Kampung, Guru Tua, dan Kyai Lokal, berperan sebagai mediator antara teks-teks keagamaan dengan realitas sosial masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan ibadah dan fikih, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.Menurut penelitian Alimuddin (2020), kepemimpinan tokoh agama di wilayah Poso dan Sigi sangat adaptif terhadap konteks budaya lokal. Mereka menggunakan pendekatan da'wah kultural, seperti melalui kegiatan doa bersama, upacara adat keagamaan, dan musyawarah kampung, yang berfungsi memperkuat solidaritas antarumat dan mencegah potensi konflik.Tokoh-tokoh ini juga menjadi agen rekonsiliasi pasca konflik sosial di Poso, dengan menjembatani komunikasi antara kelompok Muslim dan non-Muslim. Riset Nasruddin

(2019) menunjukkan bahwa mereka berperan penting dalam membangun narasi Islam sebagai agama perdamaian melalui ceramah, pengajian lintas iman, dan keterlibatan aktif dalam forum-forum kerukunan umat beragama.

2. Lembaga Lokal: Basis Pendidikan dan Moderasi Sosial. Selain pera individu, lembaga-lembaga lokal seperti masjid, pesantren, majelis taklim, dan lembaga adat Kaili (Ngata) juga menjadi fondasi bagi penyebaran nilai Islam yang moderat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan masyarakat tempat diskusi, pendidikan anak-anak (TPA/TPQ), dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurut studi oleh Hidayat (2021), lembaga-lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam mentransmisikan nilai moderasi melalui pembelajaran fikih sosial, penguatan ukhuwah, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Sementara itu, lembaga adat Kaili seperti Dewan Adat Ngata memiliki peran dalam menjaga tatanan moral dan sosial masyarakat. Kolaborasi antara lembaga adat dan tokoh agama membentuk sistem sosial yang harmonis di mana hukum adat tidak bertentangan, tetapi justru melengkapi nilai-nilai Islam. Penelitian Al-Rasyid & Mustamin (2023) menegaskan bahwa sinergi ini menjadi model unik integrasi agama dan budaya dalam menciptakan stabilitas sosial di Sulawesi Tengah.
3. Karakteristik Kepemimpinan Tokoh Agama dan Lembaga Lokal. Beberapa karakter menonjol dari para tokoh agama dan lembaga lokal berdasarkan temuan lapangan antara lain:
 - a. Kepemimpinan partisipatif, yang membuka ruang dialog lintas komunitas agama.

- b. Pendekatan edukatif dan kultural, yang mengedepankan nilai kasih sayang dan kearifan lokal dalam dakwah.
- c. Orientasi sosial, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, pendidikan moral anak, dan pemulihan sosial pasca-konflik.
- d. Konsistensi terhadap ajaran Islam moderat, yang menolak ekstremisme dan mengedepankan kemaslahatan bersama.

4. Dampak Sosial dan Pendidikan

Peran tokoh agama dan lembaga lokal berimplikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan pembentukan karakter religius masyarakat Kaili. Melalui peran edukatif dan spiritual mereka, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan memiliki identitas keislaman yang inklusif.

Penelitian empiris oleh Rahim (2022) menunjukkan bahwa desa-desa yang aktif menghidupkan forum keagamaan dan adat secara bersamaan cenderung memiliki tingkat kerukunan yang lebih tinggi dan angka konflik sosial yang rendah dibanding daerah lain yang tidak memiliki sistem nilai lokal yang kuat.

Dengan demikian, tokoh agama dan lembaga lokal di Tanah Kaili berfungsi sebagai simpul sosial-religius yang menjaga kesinambungan antara Islam dan budaya setempat. Mereka menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan moderasi beragama di tingkat akar rumput tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal pemerintah, tetapi juga oleh kekuatan nilai-nilai kultural dan religius yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

E.Dokumentasi Lapangan dan Kegiatan Sosial Keagamaan di Tanah Kaili

Dokumentasi lapangan dan kegiatan sosial keagamaan di Tanah Kaili menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menghidupkan Islam moderat secara nyata melalui praktik sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian akademik (Abd. Rahman, 2018; Burhanuddin, 2019; Hafid, 2019), kegiatan keagamaan di masyarakat Kaili tidak hanya bersifat ritual formal, tetapi juga terintegrasi dengan nilai sosial, budaya, dan pendidikan, menciptakan harmoni dan kohesi sosial antarumat.

1. Kegiatan Ibadah Kolektif

Masjid-masjid di Tanah Kaili berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus pusat aktivitas sosial dan edukatif. Dokumentasi lapangan menunjukkan:

- a. Salat berjamaah (Shalat lima waktu dan Jum'at) yang diikuti lintas generasi, mulai anak-anak, remaja, hingga lansia. Salat berjamaah ini menjadi media pembiasaan disiplin dan nilai sosial.
- b. Pengajian rutin setiap malam minggu atau pekanan, termasuk majelis taklim untuk wanita (*majelis ta'lim ibu-ibu*), yang menekankan nilai toleransi, kesabaran, dan gotong royong.
- c. Doa bersama untuk masyarakat dan kampung, misalnya doa keselamatan panen atau keselamatan warga setelah bencana alam, menguatkan solidaritas sosial dan rasa kebersamaan.

Hafid (2019) menegaskan bahwa kegiatan ibadah kolektif ini juga berfungsi sebagai alat rekonsiliasi pasca-konflik, karena menciptakan ruang komunikasi terbuka di antara kelompok masyarakat yang sebelumnya mengalami ketegangan sosial.

2. Kegiatan Sosial Berbasis Kearifan Lokal

Masyarakat Kaili menggabungkan praktik keagamaan dengan kegiatan sosial dan budaya, yang mencerminkan prinsip Islam moderat yang berakar pada kearifan lokal. Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

- a. Gotong royong (**pombepentulu**) untuk membangun atau memperbaiki fasilitas umum, masjid, dan sekolah. Aktivitas ini dijalankan bersama tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat, menekankan prinsip *ukhuwah insaniyah* dan *ukhuwah islamiyyah*.
- b. Sintuvu dan nosarara nosabatutu, tradisi bersilaturahmi dan memperkuat persaudaraan, yang dijadikan sarana penguatan jaringan sosial lintas agama dan etnis. Kegiatan ini kerap diadakan sebelum dan sesudah kegiatan keagamaan besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Maulid Nabi.
- c. Bantuan sosial ke warga terdampak konflik atau bencana, misalnya pembagian sembako, bantuan pendidikan, dan program kesehatan komunitas. Pendekatan ini memperlihatkan integrasi antara ajaran Islam dan tanggung jawab sosial, sekaligus memperkuat citra tokoh agama sebagai agen perdamaian.

Burhanuddin (2019) menunjukkan bahwa kegiatan sosial keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama ini membantu membangun ketahanan sosial di masyarakat pasca-konflik dan menanamkan nilai-nilai moderasi secara praktis.

3. Kegiatan Pendidikan dan Dakwah

Dokumentasi lapangan juga menyoroti kegiatan pendidikan keagamaan dan dakwah lokal sebagai sarana menanamkan Islam moderat:

- a. Madrasah dan pesantren lokal menyelenggarakan kelas fikih sosial dan pendidikan karakter, mengajarkan siswa tentang toleransi, kerja sama, dan kepedulian sosial.
- b. Pengajian terbuka lintas agama, di mana masyarakat Kristen dan Islam mengikuti kegiatan edukasi agama dan budaya secara bersama. Hal ini menjadi model praktis perjumpaan Islam dan kearifan lokal untuk membangun masyarakat inklusif.
- c. Pelatihan dai lokal dan guru agama, termasuk literasi digital dan penggunaan media sosial untuk dakwah damai, sebagai respons terhadap tantangan modernisasi dan disinformasi agama (Wahid Foundation, 2021; Rahim, 2022).

4. Metodologi Dokumentasi Lapangan

Data dokumentasi diperoleh melalui:

- a. Observasi partisipatif, menghadiri salat berjamaah, pengajian, dan kegiatan adat-religius.
- b. Wawancara mendalam dengan tokoh agama, guru madrasah, dan tokoh adat terkait praktik sosial keagamaan dan nilai moderasi.
- c. Fotografi dan pencatatan aktivitas komunitas, termasuk festival keagamaan, kerja bakti, dan program bantuan sosial.
- d. Studi arsip lokal dan literatur akademik, untuk memverifikasi sejarah praktik keagamaan dan integrasi nilai budaya Kaili (Abd. Rahman, 2018; Al-Rasyid & Mustamin, 2023).

Dengan demikian maka kegiatan sosial keagamaan di Tanah Kaili menunjukkan bahwa Islam moderat bukan sekadar konsep teoritis, tetapi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui integrasi ibadah, pendidikan, kearifan lokal, dan kegiatan sosial, masyarakat Kaili berhasil membangun harmoni sosial, identitas keislaman yang inklusif, dan ketahanan komunitas. Dokumentasi ini menjadi bukti empiris bahwa moderasi beragama dapat diwujudkan melalui pendekatan kultural, edukatif, dan partisipatif di tingkat akar rumput.

F. Daftar Istilah Budaya Kaili yang Berkaitan dengan Nilai Islam

Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah memiliki sejumlah istilah budaya yang mengekspresikan nilai sosial dan religius yang sejalan dengan ajaran Islam moderat. Istilah-istilah ini bukan sekadar kosakata adat, tetapi simbol kearifan lokal yang menguatkan praktik keagamaan, moralitas, dan kohesi sosial. Berdasarkan kajian akademik dan observasi lapangan (Abd. Rahman, 2018; Burhanuddin, 2019; Al-Rasyid & Mustamin, 2023), istilah-istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nosarara Nosabatutu

- a. **Makna:** Bersaudara dan bersatu; menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antarindividu dalam komunitas.
- b. **Kaitan dengan nilai Islam:** Sejalan dengan prinsip ukhuwah islamiyyah (persaudaraan dalam Islam) dan ajaran Al-Qur'an tentang menjaga persatuan umat (QS. Al-Hujurat: 10).
- c. **Praktik nyata:** Pelaksanaan kegiatan sosial lintas keluarga dan lintas agama, seperti kerja bakti

bersama, pengajian komunitas, dan gotong royong di masjid.

2. Sintuvu Maroso

- a. **Makna:** Persatuan yang kokoh dan harmonis; masyarakat hidup rukun dan saling menjaga hubungan sosial.
- b. **Kaitan dengan nilai Islam:** Mengandung prinsip *ta’awun* (tolong-menolong) dan *silaturahim*, yang diperintahkan dalam Al-Qur’ān (QS. Al-Ma’idah: 2).
- c. **Praktik nyata:** Tradisi musyawarah kampung untuk menyelesaikan konflik, serta pertemuan adat yang diikuti oleh semua elemen masyarakat.

3. Pombepentulu / Pombepentulu Maroso

- a. **Makna:** Gotong royong untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.
- b. **Kaitan dengan nilai Islam:** Sejalan dengan nilai *amal ma’ruf* (perbuatan baik) dan *shura* (musyawarah dan kerja sama).
- c. **Praktik nyata:** Masyarakat bekerja bersama membangun fasilitas umum, masjid, sekolah, dan saluran irigasi, menekankan integrasi antara ajaran agama dan praktik sosial.

4. Pombetulungi

- a. **Makna:** Saling menolong atau membantu sesama.
- b. **Kaitan dengan nilai Islam:** Prinsip *ta’awun fi al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma’idah: 2.

- c. **Praktik nyata:** Bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, distribusi makanan untuk warga terdampak bencana, atau bantuan pendidikan bagi anak yatim.

5. Tadulako /

- a. **Makna:** Tradisi berbagi dalam perayaan keagamaan atau momen adat, menekankan solidaritas sosial.
- b. **Kaitan dengan nilai Islam:** Sejalan dengan konsep *sadaqah* (amal sosial) dan *zakah* (kewajiban sosial dalam Islam).
- c. **Praktik nyata:** Distribusi makanan dan hadiah selama Idul Fitri, Idul Adha, atau acara Maulid Nabi, yang melibatkan seluruh anggota masyarakat.

6. Tondok / Tondok Maroso

- a. **Makna:** Perilaku sopan santun, hormat kepada sesama, dan menjaga keharmonisan hubungan sosial.
- b. **Kaitan dengan nilai Islam:** Mencerminkan akhlak mulia (QS. Al-Qalam: 4–5) dan etika interaksi sosial Islam.
- c. **Praktik nyata:** Anak-anak diajarkan menghormati orang tua dan tetua, serta menjaga tutur kata dan perilaku dalam interaksi sosial sehari-hari.

7. Bagea - Bagea Sadu

- a. **Makna:** Musyawarah atau permusyawaratan sebelum mengambil keputusan penting.
- b. **Kaitan dengan nilai Islam:** Mengacu pada prinsip *syura* dalam Al-Qur'an (QS. Ash-Shura: 38), menekankan konsultasi dan partisipasi masyarakat.
- c. **Praktik nyata:** Musyawarah desa, forum tokoh adat dan agama, atau rapat masjid sebelum pelaksanaan kegiatan sosial-keagamaan.

Istilah-istilah budaya Kaili tersebut menunjukkan bahwa nilai Islam dan kearifan lokal tidak dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Budaya Kaili menyediakan kerangka praktis untuk menanamkan moderasi beragama, solidaritas sosial, dan nilai kemanusiaan. Integrasi istilah-istilah ini dalam pendidikan, dakwah, dan praktik sosial memperkuat Islam lokal yang inklusif, damai, dan adaptif terhadap modernitas.

F. Daftar Pustaka

- Abd. Rahman, M. (2018). *Islam dan Budaya Lokal di Sulawesi Tengah*. Palu: IAIN Datokarama Press.
- Abdullah, S. (2018). *Indigenisasi Islam di Indonesia: Studi Kasus Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Rasyid, F., & Mustamin, A. (2023). *Sinergi Adat dan Agama di Sulawesi Tengah: Studi Kearifan Lokal dan Moderasi Beragama*. Makassar: UIN Press.
- Aragon, L. V. (2001). Communal violence in Poso, Central Sulawesi. *Indonesia Journal*, 72, 45–79.
- ^Azra, A. (2021). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Burhanuddin, J. (2019). *Islam Lokal dan Transformasi Sosial di Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: UII Press.
- Daud, M. (2022). Peran ulama lokal dalam pembangunan masyarakat damai di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 18(3), 55–72.
- Hafid, A. (2019). Dakwah damai pasca konflik. *Al-Qalam*, 23(2), 187–204.
- Hidayat, R. (2021). Lembaga lokal dan moderasi beragama: Studi masjid dan pesantren di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 29(1), 45–66.

Hefner, R. W. (2019). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

IAIN Palu. (2020). *Laporan penelitian rekonsiliasi sosial dan keagamaan pasca-konflik di Sulawesi Tengah*. Palu: IAIN Datokarama.

Miftahuddin, A. (2022). Pendidikan Islam moderat dan karakter sosial: Studi di madrasah dan pesantren. *Tarbiyah Journal*, 28(2), 77–94.

Muzakki, A. (2021). Moderasi beragama dan tantangan globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 213–230.

Nasruddin, R. (2019). Tokoh agama lokal sebagai agen rekonsiliasi. *Jurnal Al-Hikmah*, 15(1), 101–120.

Nur, A. (2020). *Islamisasi dan integrasi budaya di Tanah Kaili*. Makassar: UIN Alauddin Press.

Rahim, A. (2022). Literasi digital dan dakwah di era revolusi industri 4.0. *Al-Fikr Journal of Islamic Studies*, 26(1), 33–50.

Wahid Foundation. (2021). *Disinformasi agama dan tantangan dakwah digital*. Jakarta: Wahid Foundation Press.

van Klinken, G. (2007). Communal violence and the Poso conflict. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 163(1), 1–22.

Alimuddin, H. (2020). Strategi dakwah kultural di masyarakat Kaili. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 12(2), 88–105.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Panduan implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam*. Jakarta: Kemenag RI.

Anwar, F. (2019). Islam dan toleransi dalam konteks masyarakat multikultural. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 11(1), 23–40.

Arifin, Z. (2020). Pendidikan karakter berbasis nilai lokal dan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 55–70.

Basri, H. (2018). Transformasi budaya lokal dan peran tokoh agama. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 34(1), 15–36.

Darmadi, S. (2021). Peran pesantren dalam pembangunan moderasi beragama. *Al-Tarbawi*, 15(3), 101–118.

Fauzi, M. (2019). Islam moderat sebagai instrumen perdamaian sosial. *Jurnal Studi Islam*, 21(2), 67–85.

Hasan, R. (2020). Kearifan lokal dalam praktik sosial masyarakat Kaili. *Jurnal Budaya Nusantara*, 13(1), 44–60.

Iskandar, D. (2021). Integrasi kurikulum PAI dengan nilai budaya lokal. *Jurnal Pendidikan Islam*, 19(2), 33–52.

Junaidi, T. (2018). Dakwah damai pasca konflik di Sulawesi Tengah. *Al-Mu’addib*, 7(1), 77–92.

Kurniawan, B. (2022). Moderasi beragama di sekolah madrasah. *Jurnal Pendidikan Keagamaan Islam*, 25(1), 10–28.

- Lestari, P. (2020). Strategi regenerasi ulama lokal di masyarakat plural. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 14(2), 55–75.
- Mudzhar, A. (2020). Islam dan identitas budaya lokal. Jakarta: Kencana.
- Munir, S. (2019). Peran masjid dalam pendidikan sosial masyarakat. *Jurnal Al-Mizan*, 18(2), 40–58.
- Nurdin, F. (2021). Pesantren dan moderasi beragama: Studi di Sulawesi Tengah. *Jurnal Tarbiyah*, 12(1), 29–50.
- Prasetyo, H. (2018). Konflik Poso dan rekonstruksi sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 16(1), 77–95.
- Qodri, M. (2020). Dakwah kultural dan penguatan toleransi. *Jurnal Al-Hikmah*, 16(2), 60–78.
- Rauf, A. (2019). Islam lokal dan praktik moderasi sosial. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 11(1), 22–39.
- Setiawan, T. (2021). Pendidikan Islam sebagai instrumen rekonsiliasi sosial. *Al-Tarbawi*, 16(1), 44–63.
- Suharto, D. (2020). Digitalisasi dakwah dan tantangan disinformasi agama. *Jurnal Dakwah Digital*, 4(2), 12–31.
- Wahyudi, H. (2019). Peran tokoh agama dalam pemulihan pasca konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 17(3), 88–105.
- Zamroni, A. (2021). Moderasi beragama dan penguatan identitas lokal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 72–90.

Lampiran :

1.Snopsis Buku

Buku *Arah Baru Islam di Tanah Kaili: Meneguhkan Islam Moderat dan Kearifan Lokal* merupakan upaya intelektual untuk menelusuri dinamika perkembangan Islam di wilayah Kaili, Sulawesi Tengah, dalam bingkai budaya, sejarah, dan spiritualitas masyarakatnya. Melalui pendekatan reflektif dan kontekstual, buku ini menghadirkan pembacaan baru terhadap bagaimana Islam tumbuh, berinteraksi, dan bertransformasi dalam ruang budaya lokal tanpa kehilangan nilai universalnya.

Dr. Bahdar, M.H.I., menulis dengan gaya ilmiah yang bernuansa puitis, menyingkap harmoni antara nilai-nilai Islam moderat dan kearifan tradisional masyarakat Kaili. Buku ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah konsep baru yang datang dari luar, melainkan telah lama hidup dalam tatanan sosial dan spiritual masyarakat lokal melalui tradisi, adat, dan solidaritas kemanusiaan.

Dengan menyoroti relasi antara agama dan budaya, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa Islam di Tanah Kaili tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan menyatu dalam denyut kehidupan masyarakatnya dari pesan-pesan dakwah para ulama lokal hingga praktik sosial yang mencerminkan toleransi, persaudaraan, dan kedamaian.

Buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, tokoh agama, pendidik, dan siapa pun yang peduli terhadap masa depan Islam moderat di Indonesia, khususnya dalam upaya meneguhkan harmoni sosial dan membangun arah baru kehidupan keislaman yang berakar pada kearifan lokal.

2. Profil Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I. adalah dosen dan akademisi di bidang Fikih dan Ushul Fikih pada Fakultas Tarbiyah, UIN Datokarama Palu. Ia aktif mengajar mata kuliah fikih, ushul fikih, dan pendidikan Islam, dengan fokus kajian pada integrasi nilai-nilai syariat dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Latar belakang keilmuan penulis berpijak pada studi fikih klasik dan kontemporer yang dipadukan dengan pendekatan pendidikan modern dan penelitian kualitatif. Minat akademiknya meliputi fikih pendidikan, fikih pembelajaran, pembentukan karakter religius, serta integrasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam, khususnya di konteks madrasah dan masyarakat Muslim Indonesia.

Selain mengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan ilmiah, baik dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional maupun buku ajar perguruan tinggi. Beberapa karyanya berfokus pada rekonstruksi pembelajaran fikih, internalisasi nilai sosial-budaya lokal, serta penguatan dimensi etika dan spiritual dalam pendidikan Islam. Penulis juga terlibat dalam penyusunan khutbah, modul keagamaan, dan buku panduan ibadah yang digunakan di lingkungan masyarakat. Melalui karya ini, penulis berharap dapat mendorong lahirnya praktik pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat dan akhlak mulia.